

**PENGARUH PEMBINAAN USAHA KECIL DAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN
BERSAMA MASYARAKAT (PHBM)
TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DESA HUTAN**

(Studi pada Program Kemitraan dalam PKBL Perum Perhutani di Lembaga
Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Lancar Jaya, Desa Ngancar, Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

YERI MIA VIANI

115030113111011



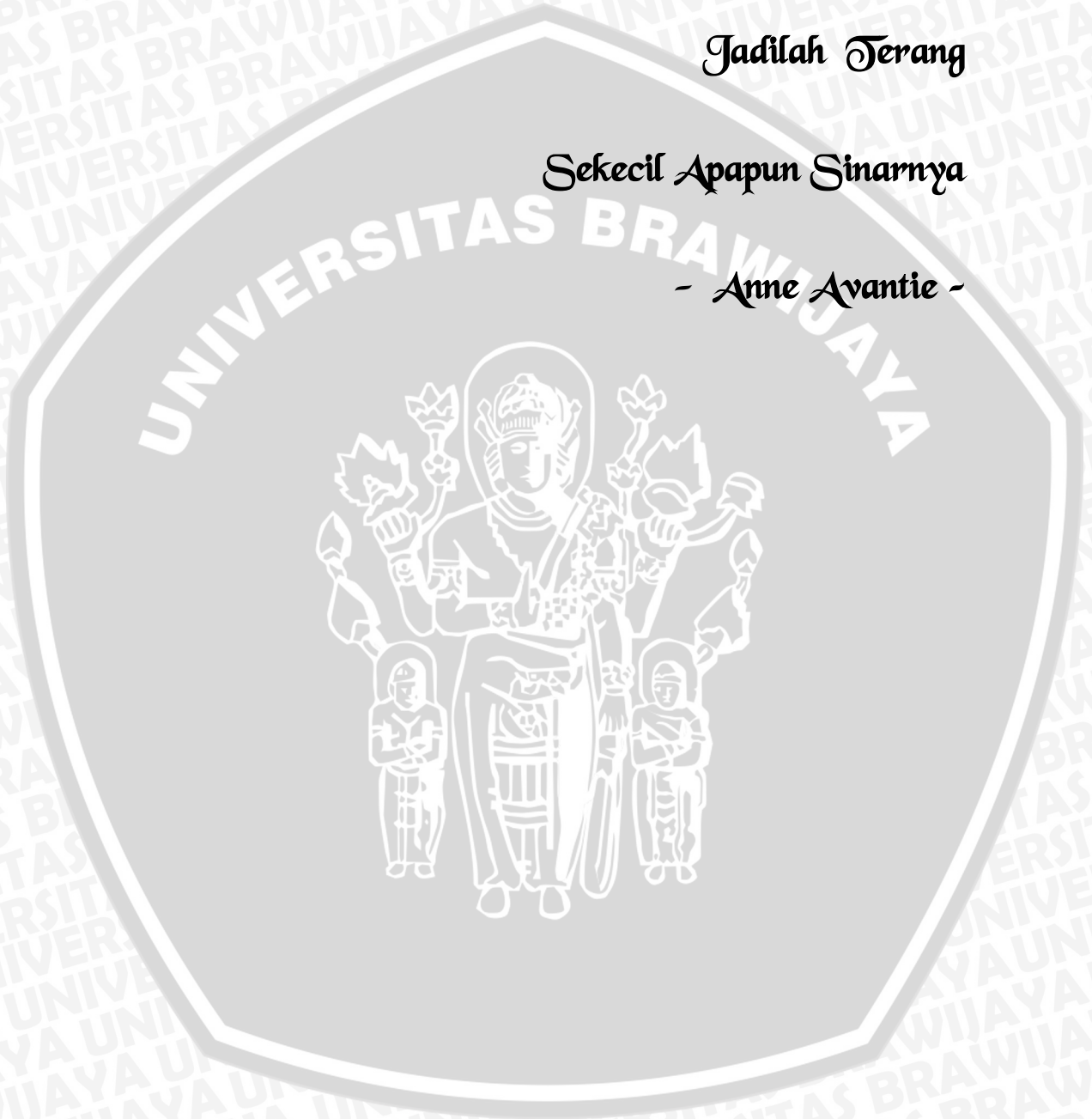
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2015**

MOTTO

Jadilah Terang

Sekecil Apapun Sinarnya

- Anne Avantie -



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Skripsi ini ku persembahkan

Untuk Bapak dan Ibu

Yang Rela Menguras Keringatnya

Demi Keberhasilanku

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi

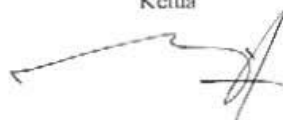
Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 28 April 2015
 Jam : 12.00 WIB
 Skripsi atas nama : Yeri Mia Viani
 Judul : Pengaruh Pembinaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan (Studi pada Program Kemitraan dalam PKBL Perum Perhutani di LMDH Lancar Jaya Desa Ngancar Kabupaten Kediri)

Dan dinyatakan lulus

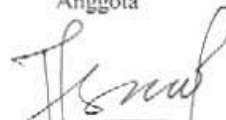
MAJELIS PENGUJI

Ketua



Drs. Mochamad Rozikin, MAP.
 NIP. 19630503 198802 1 001

Anggota



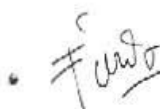
Trisnawati, S.Sos., MAP.
 19800307 200801 2 012

Penguji I



Dr. Endah Setvowati, M.Si.
 19710505 199903 2 001

Penguji II



Dr. Firda Hidayati, M.Si.
 19711013 200003 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2, pasal 70).

Malang, 13 Maret 2015



Yeri Mia Viani
Nim. 115030113111011

RINGKASAN

Yeri Mia Viani. 2015. **Pengaruh Pembinaan Usaha Kecil dan PHBM terhadap Kesejahteraan MDH (Studi pada Program Kemitraan dalam PKBL Perum Perhutani di LMDH Lancar Jaya Desa Ngancar Kabupaten Kediri)**. Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Pembimbing Drs. Mochamad Rozikin, MAP. dan Trisnawati, S.Sos. MAP.

Kata Kunci: Pembinaan Usaha Kecil, PHBM, Kesejahteraan MDH

Pembinaan usaha kecil dan PHBM merupakan upaya Perum Perhutani dalam melaksanakan program PKBL yang merupakan kegiatan sosial yang wajib dilakukan oleh BUMN. Pembinaan usaha kecil dan PHBM yang tercakup dalam program PKBL memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan (MDH). Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh pembinaan usaha kecil dan PHBM terhadap kesejahteraan MDH.

Jenis penelitian ini adalah *explanatory*, yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan dua atau lebih variabel yang diteliti. Metode yang digunakan adalah survai dengan alat bantu menggunakan kuesioner. Berdasarkan populasi sebanyak 1442 anggota LMDH, diambil sampel sebanyak 94 yang ditentukan dengan rumus Slovin. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan Analisis Korelasi Product Moment Pearson, Analisis Korelasi Parsial, Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis dengan menggunakan program SPSS 21.0 for Windows.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pembinaan usaha kecil (X1) dan PHBM (X2) terhadap kesejahteraan MDH (Y) yang ditunjukkan nilai $F_{hitung}=15,127 > F_{tabel}=3,09$ dan diperoleh nilai korelasi yang cukup kuat. Demikian pula dengan uji t (parsial), untuk variabel X1 diperoleh koefisien regresi sebesar 0,462 dan t hitung sebesar 3,139 dengan uji signifikansi sebesar 0,002. Untuk variabel X2 diperoleh koefisien regresi sebesar 0,302 dan t hitung sebesar 2,491 dan nilai signifikansi sebesar 0,015. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa peranan pembinaan usaha kecil terhadap kesejahteraan MDH di LMDH Lancar Jaya cukup baik, yang ditunjukkan dengan nilai korelasi yang berada pada posisi cukup kuat. Sedangkan peranan PHBM terhadap kesejahteraan MDH di LMDH Lancar Jaya rendah, yang ditunjukkan dari nilai korelasi yang berada pada posisi yang rendah. Peranan pembinaan usaha kecil dan PHBM secara bersama-sama terhadap kesejahteraan MDH di LMDH Lancar Jaya cukup baik, yang ditunjukkan dari nilai korelasi yang berada pada posisi cukup kuat.

SUMMARY

Yeri Mia Viani. 2015. **Effect of Small Bussinesses Development and PHBM on Forest Village Community (MDH)'s Welfare (Studies at Partnership Program on PKBL Perum Perhutani in LMDH Lancar Jaya Desa Ngancar Kabupaten Kediri)**. Undergraduate Thesis, Faculty of Administrative Sciences Brawijaya University Malang. Adviser Drs. Mochamad Rozikin, MAP. and Trisnawati, S.Sos. MAP.

Keywords: Small Bussiness Development, PHBM, MDH's Welfare.

Development of small businesses and PHBM an effort of Perum Perhutani in implementing PKBL programs that are social activities that must be performed by SOE. Small business development and PHBM is included in Partnership program has the goal to improve the welfare of particular welfare Forest Village Community (MDH). Based on this, the study aims to measure the effect of small business development and PHBM on MDH's Welfare.

This research is explanatory, ie studies that examined the relationship between two or more research variables. The method used is a survey with a questionnaire tool. Based on a population of 1442 LMDH members, drawn sample of 94 was determined by Slovin's formula. Collected data were analyzed using Pearson Product Moment Correlation Analysis, Partial Correlation Analysis, Regression Analysis and Hypothesis Testing using SPSS 21.0 for Windows.

The results show there is a positive and significant effect among small businesses development (X1) and PHBM (X2) on the welfare of MDH (Y) which indicated the value of $F_{count} = 15.127 > F_{table} = 3.09$ and correlation values are quite strong. Similarly, the t test (partial), to the variable X1 obtained a regression coefficient of 0.462 and t count equal to 3.139 with a significance test of 0.002. To X2 obtained a regression coefficient of 0.302 and 2.491 t of the significance and value of 0.015. Based on these statements can be concluded, that the role of small businesses development for the welfare of MDH in LMDH Lancar Jaya is quite good, as indicated by the correlation value is in a strong enough position. While the role of PHBM for the welfare of MDH in LMDH Jaya is low, as indicated by the correlation value is at a low position. The role of small businesses development and PHBM together for the welfare of MDH in LMDH Lancar Jaya is pretty good, is evident from the correlation value is in a strong enough position.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan berkat dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pembinaan Usaha Kecil dan PHBM terhadap Kesejahteraan MDH (Studi pada Program Kemitraan dalam PKBL Perum Perhutani di LMDH Lancar Jaya Desa Ngancar Kabupaten Kediri)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.AP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Selama proses penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Dr. Chairul Saleh, M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Drs. Mochamad Rozikin, MAP., selaku Dosen Pembimbing 1 yang elah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberi semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
4. Trisnawati S.Sos., MAP., selaku Dosen Pembimbing 2 yang elah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberi semangat dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
5. Dikti, atas kepercayaannya untuk memberikan beasiswa yang sangat bermanfaat untuk penulis. Semoga penulis bisa memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa dan negara.

6. Seluruh dosen pengajar Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Pimpinan, staf dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan ijin dan bantuan selama penulis melakukan penelitian.
8. Pimpinan, Staf dan Karyawan Perhutani KPH Kediri yang telah memberikan ijin dan rekomendasi penelitian.
9. Bapak Kasiman dan seluruh pengurus LMDH dan KMDH Lancar Jaya atas ijin, kerjasama dan dukungan bagi penulis dalam melakukan penelitian.
10. Ayahanda Thomas Supardi dan Ibunda Yulita Warsiyem Suwarni yang selalu totalitas dalam mendukung, berkorban, dan memberikan doa yang tulus bagi keberhasilan penulis.
11. Kakakku Eko Oktavianus dan Adikku Samuel Sapto Wicahyo, yang selalu menyayangi penulis.
12. Yustinus Hendi Prasetyo beserta keluarga, yang selalu mendoakan, mendukung dan menyemangati dalam penulisan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat tempat berbagi suka dan duka, “Ipon Susi Soni Abi Amin”, Teman-teman kos Bu Endah (alm) Hermin, Ana, Mbak Menik.
14. Dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Malang, 17 Maret 2015
Penulis

Yeri Mia Viani

DAFTAR ISI

MOTTO

TANDA PENGESAHAN

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

RINGKASAN.....	i
SUMMARY	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	8
	C. Tujuan Penelitian	8
	D. Kontribusi Penelitian	9
	1. Aspek Praktis	9
	2. Aspek Teoritis	9
	E. Sistematika Pembahasan	9

BAB II	KAJIAN PUSTAKA	11
	A. Pembangunan untuk Mencapai Kesejahteraan	11
	1. Pembangunan	11
	2. Paradigma Pembangunan	12
	3. Kesejahteraan Masyarakat	16
	4. Pembangunan untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat. 21	
	B. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)	23
	1. <i>Good Corporate Governance</i>	23
	2. <i>Corporate Social Responsibility</i>	26
	a. Pembinaan Usaha Kecil	31
	1. Permodalan	33

2. Fasilitas	34
3. Kegiatan Pembinaan	34
b. PHBM	35
1. Peningkatan Usaha Produktif MDH	37
2. Penguatan Kelembagaan	37
3. Keberhasilan Reboisasi	37
4. Penurunan Gangguan Keamanan Hutan	38
C. Penetapan Ho dan Ha	38
D. Kerangka Konseptual	40

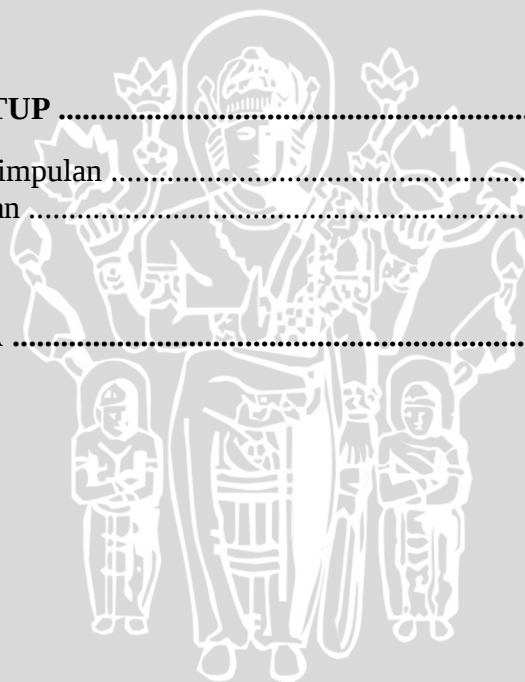
BAB III METODE PENELITIAN 41

A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Definisi Konseptual, Operasional dan Skala Pengukuran	42
1. Definisi Konseptual	42
2. Operasional Variabel	42
3. Skala Pengukuran	44
D. Populasi dan Sampel	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Uji Validitas dan Reliabilitas	46
G. Uji Asumsi Klasik	48
H. Teknik Analisis Data	51

BAB IV PEMBAHASAN 54

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
1. Gambaran Umum Perum Perhutani	54
2. Gambaran Umum Kabupaten Kediri	57
3. Gambaran Umum Desa Ngancar	62
4. Gambaran Umum LMDH Lancar Jaya	65
5. Karakteristik Responden	72
a. Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin	73
b. Distribusi responden berdasarkan usia	74
c. Distribusi responden berdasarkan pendidikan	75
d. Distribusi Responden berdasarkan tempat tinggal	76
B. Penyajian Data	77
1. Variabel Pembinaan Usaha Kecil (X1)	77
2. Variabel PHBM (X2)	82
3. Variabel Kesejahteraan MDH (Y)	88
C. Uji Instrumen Penelitian	94
1. Uji Validitas	94
2. Uji Reliabilitas	96
D. Uji Asumsi Klasik	97
1. Uji Normalitas	97

2. Uji Multikolinearitas	98
3. Uji Heterokedastisitas	99
E. Hasil Pengolahan Data	100
1. Analisis Korelasi	100
a. Analisis Korelasi <i>Product Moment</i>	100
b. Analisis Korelasi Parsial	103
c. Analisis Korelasi Ganda	105
2. Analisis Regresi Linier Berganda	106
3. Uji F (Simultan)	108
4. Uji t (Parsial)	109
5. Koefisien Determinasi R^2	111
F. Pembahasan	112
1. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara Parsial	113
2. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara Simultan	114
3. Pengaruh Variabel yang Paling Dominan terhadap Y ...	115
 BAB V PENUTUP	 117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
 DAFTAR PUSTAKA	 120



DAFTAR GAMBAR

2.1 <i>Nested Spheres of Poverty (NESP)</i>	18
2.2 Kerangka Konseptual	40
4.1 Peta Desa Ngancar	62
4.2 Peta Hutan Pangkuan Desa Ngancar	66
4.3 Budidaya Tanaman Nanas	68
4.4 Budidaya Tanaman Jagung	68
4.5 Dewan Pengurus LMDH Lancar Jaya	71
4.6 Jenis Kelamin Responden	73
4.7 Usia Responden	74
4.8 Pendidikan Terakhir Responden	75
4.9 Lokasi Tempat Tinggal Responden	76
4.10 Grafik P-P Plot untuk Uji Normalitas	98
4.11 Grafik Scatterplot untuk Uji Heterokedastisitas	99

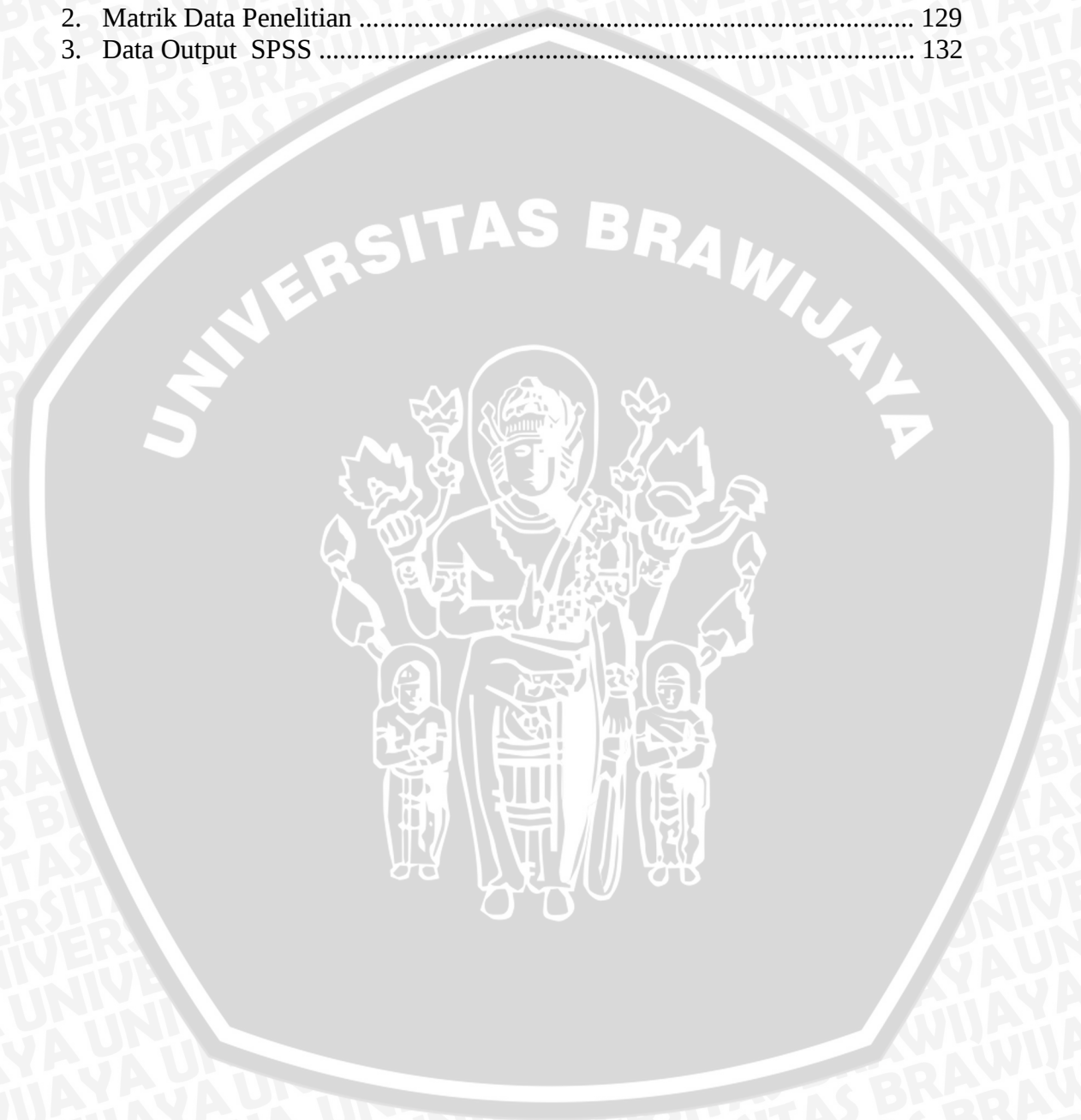


DAFTAR TABEL

2.1 Perbandingan antar Paradigma Pembangunan	13
2.2 <i>Triple P</i>	16
2.3 Prinsip-prinsip <i>social responsibility</i> menurut Alyson	27
3.1 Operasional Variabel	43
4.1 Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kediri	59
4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri	60
4.3 Lapangan Usaha Kabupaten Kediri	60
4.4 Mata Pencarian Penduduk Kabupaten Kediri	61
4.5 PDRB Perkapita Kabupaten Kediri	61
4.6 Daftar Jenis Tanah di Desa Ngancar	64
4.7 Distribusi Jawaban Responden pada Variabel Pembinaan Usaha Kecil (X1)	77
4.8 Distribusi Jawaban Responden pada Variabel PHBM (X2)	82
4.9 Distribusi Jawaban Responden pada Variabel Kesejahteraan MDH (Y)	88
4.10 Uji Validitas	95
4.11 Uji Reliabilitas	97
4.12 Uji Multikolinearitas	98
4.13 Pedoman memberikan interpretasi dari koefisien korelasi	100
4.14 Hasil Uji Korelasi X1 terhadap Y	101
4.15 Hasil Uji Korelasi X2 terhadap Y	102
4.16 Hasil uji korelasi parsial X1 terhadap Y dengan X2 dikontrol	103
4.17 Hasil uji korelasi parsial X2 terhadap Y dengan X1 dikontrol	104
4.18 Hasil Ringkasan Analisis Regresi Linier Ganda	106
4.19 Hasil Uji F (Simultan)	108
4.20 Hasil uji hipotesis koefisien regresi variabel X1	110
4.21 Hasil Uji hipotesis koefisien regresi variabel X2	111
4.22 Koefisien Determinasi R^2	114

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuesioner Penelitian	125
2. Matrik Data Penelitian	129
3. Data Output SPSS	132



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat desa hutan (MDH) merupakan masyarakat yang lokasi tempat tinggalnya didalam atau bersinggungan dengan hutan milik negara. Lokasi tempat tinggal yang jauh dari pusat kota membuat kesejahteraan yang dimiliki oleh MDH kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Selain itu, MDH juga sulit untuk mendapatkan fasilitas seperti yang mudah dinikmati oleh masyarakat kota. Disisi lain, hutan milik negara dikelola oleh perusahaan negara yang disebut Perum Perhutani. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (Kansil, 2001:67). Perusahaan memiliki fungsi untuk mengelola sumber daya ekonomi yang berguna bagi masyarakat, dari pengelolaan sumber daya ekonomi perusahaan juga mendapatkan laba yang mejadi tujuan perusahaan. Keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya alam dan mendapatkan laba juga akan berpengaruh pada pembangunan suatu negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Badan usaha sebagai motor penggerak ekonomi bangsa baik yang berada pada sektor swasta ataupun negara perlu untuk memiliki kesadaran akan tanggung jawab yang diembannya. Kesadaran tersebut perlu untuk dimiliki karena sesungguhnya apa yang menjadi tanggung jawab mereka bukan hanya

menjalankan produksi, tetapi juga untuk memberikan perhatian bagi meningkatnya kondisi ekonomi bangsa yang menjadi tumpuan badan usaha. Kondisi perekonomian akan lebih baik lagi apabila bukan hanya pemerintah yang memikirkan kondisi pemerataan ekonomi, tetapi juga seluruh aktor baik badan usaha dan masyarakat. Masyarakat, dunia usaha, dan bahkan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional, memiliki tugas dan tanggung jawab sosial untuk menyelenggarakan pelayanan sosial di Indonesia (Suharto, 2008:14).

Perum Perhutani merupakan suatu Bahan Usaha Milik Negara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani, yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Perum Perhutani dibentuk untuk mengelola hutan negara. Hutan negara merupakan hutan yang berada pada tanah yang tidak terbebani hak atas tanah. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Meskipun nantinya laba yang didapatkan oleh Perum Perhutani menjadi pendapatan negara dan disalurkan kembali untuk kebutuhan masyarakat dan negara, Perum Perhutani tetap diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan CSR sebagai bentuk kepedulian secara langsung dari Perum Perhutani untuk Masyarakat. Menurut Elkingston dalam Wahyudi dan Azheri (2011:31), terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan CSR yaitu kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan dan keadilan sosial.

Ketiga aspek tersebut harus seimbang sehingga terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat.

Kesejahteraan MDH dapat dicapai melalui kemitraan dalam PKBL. Kegiatan CSR dalam perusahaan milik negara dikenal dengan sebutan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Didalam PKBL terdapat program kemitraan antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan. Menurut Hafsah (2000:47), kemitraan akan menumbuhkan berbagai manfaat. Manfaat dari kemitraan yaitu produktivitas; efisiensi; jaminan kualitas, kuantitas dan kontinuitas; risiko; sosial; dan ketahanan ekonomi. Dalam arti lain, dengan adanya kemitraan yang merupakan salah satu program dalam PKBL Perum Perhutani diharapkan terjadinya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat desa hutan.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur No: 3324/KPTS/II/2007 Pasal 2 disebutkan maksud dan tujuan dari PKBL Perum Perhutani adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan usaha kecil masyarakat, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan usaha kecil milik pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) Perhutanan agar lebih tangguh dan mandiri serta perbaikan kondisi sosial dan lingkungan. Kemitraan Perum Perhutani dilakukan dalam bentuk Pembinaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Kemitraan diharapkan mampu untuk mempercepat kemampuan golongan ekonomi lemah, memecahkan masalah pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Hafsah, 2000:5). Dampak dari program kemitraan oleh Perum Perhutani melalui Pembinaan Usaha Kecil dan PHBM diharapkan tidak

hanya menguntungkan para pelaku ekonomi saja melainkan juga harus membawa dampak positif bagi seluruh kehidupan bangsa. Perhatian yang lebih kepada MDH khususnya perihal kesejahteraan oleh Perum Perhutani perlu untuk dilakukan sebagai tanda bahwa keberadaan Perhutani sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya MDH.

Pembinaan Usaha Kecil dilakukan dalam berbagai kegiatan berupa perangkat lunak maupun perangkat keras. Perangkat lunak dapat dilihat dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, konsultasi, promosi dan berbagai keringanan bagi pengusaha kecil untuk mendorong usahanya. Sedangkan bantuan perangkat keras dapat dilihat dari penyediaan tempat, permodalan dan fasilitas (Syarif, 1991:3). Pendapat Syarif tersebut sejalan dengan pelaksanaan pembinaan usaha kecil oleh Perum Perhutani yang ditetapkan dalam SK Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur No. 3324/KPTS/II/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan PKBL yang melaksanakan kegiatan pembinaan usaha kecil dalam bentuk bantuan permodalan, pemberian fasilitas dan kegiatan pembinaan seperti pendidikan, pelatihan atau pemagangan.

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan MDH dan atau Perum Perhutani dan MDH dengan pihak yang berkepentingan dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional (Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009). Peraturan tersebut sejalan dengan pendapat Arief

(2001:15) mengenai pembangunan hutan yang menyatakan penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari dan pemanfaatan hutan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. PHBM merupakan salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan MDH yang dilakukan dengan cara peningkatan usaha produktif MDH, penguatan kelembagaan bagi LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), keberhasilan reboisasi dan penurunan gangguan keamanan hutan (682/KPTS/DIR/2009).

Hutan dapat menciptakan peluang unik untuk mengurangi kemiskinan, dan dapat pula menghadirkan kondisi yang menjebak masyarakat di dalam kemiskinan (Albornoz, 2007:24). Kemampuan masyarakat dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup akan meningkatkan kualitas hidupnya. Albornoz (2007:10) mengungkapkan, kondisi yang sangat sejahtera ditandai dengan kemakmuran, kebahagiaan dan kepuasan yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk mengetahui sejauhmana kesejahteraan yang dicapai oleh masyarakat, dapat digunakan model *NESP (Nested Spheres of Poverty)* dari Gonner (dalam Albornoz, 2007:12). Model NESP didalamnya mencakup kekayaan materi, kesehatan, pengetahuan dan lingkungan.

Pengelolaan hutan negara diharapkan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat desa hutan. Selain itu, kesejahteraan yang dibangun diharapkan bukan hanya bagi segelintir orang, tapi merata untuk seluruh masyarakat dan berdasar pada asas keberlanjutan. Asas berkelanjutan yang dimaksud yaitu segala upaya pengelolaan sumberdaya hutan dan kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi MDH juga dibarengi dengan

kepedulian dengan kondisi alam dan lingkungan. Penggunaan sumber daya hutan yang bijak dan selalu ada upaya untuk melestarikannya.

Hutan dengan seluruh sumberdaya yang dimilikinya sangat berguna bagi kehidupan masyarakat. Kegiatan membangun rumah misalnya, pasti memerlukan kayu sebagai salah satu bahan utamanya. Kemanfaatan dari sumberdaya hutan sebaiknya tidak membuat hutan terus dieksploitasi sumberdayanya, tetapi hutan harus tetap terjaga kelestariannya. Djumhana (1994:212) mengatakan bahwa pembangunan kehutanan harus bergeser yang semula menekankan pada keuntungan perusahaan di bidang kehutanan harus bergeser ke keuntungan sosial. Hal ini untuk menanggulangi kesenjangan sosial yang terjadi terutamanya pada penduduk sekitar hutan. Mengingat juga bahwa kepemilikan hutan berada ditangan negara. Segala upaya yang dilakukan untuk mengelola hutan, sebaiknya tidak hanya berdasar pada profit, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Melalui PKBL, Perum Perhutani mengemban amanat negara untuk berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan, khususnya pada MDH (*Annual Report* Perum Perhutani,2012).

Pengelolaan hutan yang kondusif terdapat di Kabupaten Kediri. Di Kabupaten Kediri jarang ditemui tindak kriminal dari pencurian sumber daya hutan misalnya pencurian kayu. MDH secara bahu membahu membangun wilayahnya dengan tujuan dapat tercapai kesejahteraan bersama. Seperti misalnya pasca terjadi erupsi Gunung Kelud pada 13 Februari 2014, MDH secara gotong royong membangun wilayahnya sendiri, menghimpun pohon yang tumbang akibat bencana dan melakukan penyebaran benih dengan media ketapel pada wilayah

yang sulit dijangkau. MDH dibantu oleh PKBL Perum Perhutani membangun wilayahnya agar tercapai pembangunan yang berkelanjutan dengan tidak mengesampingkan kelestarian hutan. Dengan pencapaian dan upaya kesejahteraan masyarakat diharapkan tidak ada lagi tindak kriminal khususnya pencurian sumberdaya hutan. Kemitraan antara masyarakat dan Perum Perhutani juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan MDH.

Kabupaten Kediri memiliki 13.733 Ha Hutan Produksi dan 8.217 Ha Hutan Lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Kediri (hutbun.kedirikab.go.id). Hutan di Kecamatan Ngancar adalah wilayah hutan di Kabupaten Kediri yang letaknya paling jauh dari pusat kota. Wilayahnya sendiri terletak di sekitar Gunung Kelud. Wilayah yang jauh dari pusat kota tak jarang membuat masyarakat sulit untuk mengakses fasilitas umum. Albornoz (2007:1) mengungkapkan dibalik sumberdayanya yang besar, Masyarakat desa hutan masih tergolong kelompok paling miskin di dunia.

Pengelolaan hutan yang optimal dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara proporsional dan professional diharapkan mampu menjadi sarana untuk mencapai Visi dan Misi Perum Perhutani. Dengan harapan pelaksanaannya akan lebih fleksibel, akomodatif, partisipatif dengan kesadaran tanggung jawab sosial (*social responsibility*) yang tinggi untuk menuju Masyarakat Desa Hutan Mandiri dan Hutan Lestari. Selain itu pembangunan yang tercipta harus memperhitungkan kelestarian bumi yang hanya ada satu agar tetap memiliki kualitas hidup yang baik dan berguna bagi generasi yang akan datang. Atas dasar tersebut, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mengetahui

“Pengaruh Pembinaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan”. Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan X_1 yaitu Pembinaan Usaha Kecil dan X_2 yaitu Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Kedua variabel tersebut merupakan variabel independen yang akan mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan yang menjadi variabel dependen atau variabel Y yaitu kesejahteraan MDH.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, pokok permasalahan dalam rumusan masalah yang ditentukan peneliti yaitu:

1. Se jauh manakah pengaruh Pembinaan Usaha Kecil terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan?
2. Se jauh manakah pengaruh Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan?
3. Se jauh manakah pengaruh Pembinaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yaitu:

1. Menjelaskan pengaruh Pembinaan Usaha Kecil terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan.

2. Menjelaskan pengaruh Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan.
3. Menjelaskan Pengaruh Pembinaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan.

D. Kontribusi Penelitian

1. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, maupun Perum Perhutani serta seluruh pihak yang berkepentingan sebagai bahan masukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Masyarakat Desa Hutan (MDH) yang mandiri dengan program CSR/PKBL Perum Perhutani dalam bentuk Pembinaan Usaha Kecil serta Pengelolaan Sumberdaya Hutan bersama Masyarakat (PHBM).

2. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan CSR atau PKBL untuk BUMN dan dapat dijadikan acuan atau salah satu sumber informasi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian serupa.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang meliputi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi menjelaskan penelitian terdahulu serta teori-teori yang digunakan dalam pemecahan masalah berkaitan dengan judul atau tema yang diangkat oleh peneliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, yang memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan secara garis besar isi dari hasil penelitian dan pembahasan yang mengulas tentang analisis data penelitian, dan interpretasi hasil analisis dan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari interpretasi hasil analisis data penelitian dengan saran-saran yang dipandang perlu untuk diberikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembangunan untuk Mencapai Kesejahteraan

1. Pembangunan

Pengertian mengenai pembangunan diungkapkan oleh Siagian (2012:4) yang mengungkapkan bahwa pembangunan adalah suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan suatu bangsa, negara dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan nasional yang berkesinambungan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa, sehingga senantiasa mampu mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan hidup lahir dan batin (Lemhannas, 1997:17). Pembangunan merupakan upaya pertumbuhan baik dari sisi sosial, ekonomi dan lingkungan demi mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional tergambar pada pembukaan UUD ‘tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah; memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial’.

Segala bentuk pembangunan yang dilaksanakan diupayakan untuk sebuah peningkatan yang lebih dekat kepada tujuan. Suryono (2010:62) menyatakan bahwa pembangunan nasional harus didukung oleh kemampuan politik (ideologi dan sistem politik), kemampuan ekonomi (sumber-sumber daya), dan kondisi sosial (perubahan sosial) dan pada gilirannya harus mampu menegakkan

ketahanan nasional (*national reliance*) negara yang bersangkutan. Kemampuan-kemampuan tersebut harus dipupuk secara terus menerus agar semakin bertumbuh dan semakin memperkuat negara.

2. Paradigma Pembangunan

Menurut Suryono (2010:15) mengungkapkan kesadaran suatu bangsa yang terbentuk melalui pengalamannya, baik pengalaman sukses maupun kegagalan-kegagalan yang dialami, amat menentukan interpretasi mereka tentang pembangunan. Bangsa yang sadar akan pentingnya bangkit dari kegagalan yang pernah dialaminya akan memiliki antusiasme dalam melakukan berbagai bentuk pembangunan. Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Tjokrowinoto (2012:14) yang mengatakan bahwa keberhasilan paradigma pertumbuhan mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seringkali harus dicapai melalui pengorbanan. Kegagalan yang dialami suatu bangsa jangan sampai membuat kondisi bangsa menjadi semakin terpuruk. Pengorbanan yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat setidaknya jangan sampai justru memperburuk kondisi masyarakat di masa yang akan datang. Maka dari itu, pembangunan yang akan dilaksanakan hendaknya memiliki tujuan jangka panjang pula.

Pembangunan yang dilaksanakan pun mengalami pergeseran paradigma sesuai dengan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Berikut merupakan perbandingan antar paradigma pembangunan yang dikutip dari Suryono (2010:23):

Tabel 2.1 Perbandingan antar Paradigma Pembangunan

Dimensi-Dimensi	Pembangunan Ekonomi (<i>economic development</i>)	Pembangunan Sosial (<i>Social Development</i>)	Pembangunan yang berpusat-kan pada rakyat (<i>people Centered Development</i>)	Pembangunan yang berwawasan lingkungan (<i>environmental development</i>)	Pembangunan Berkelanjutan (<i>sustainable development</i>)
Tujuan	Meningkatkan kapasitas volume barang dan jasa; meningkatkan pendapatan; merubah struktur dalam industrialisasi	Meningkatkan nilai individu-individu/kemampuan; meningkatkan kualitas hidup; merubah struktur sosial	Memperbaiki kualitas hidup; memperbaiki keseimbangan dalam ekologi manusia	Melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup manusia	Memenuhi kebutuhan hidup masa kini, tanpa mengurangi kemampuan nya untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang
Sistem yang dituju	Produksi dalam perindustrian	Konsumsi dan distribusi; pemenuhan kebutuhan dasar	Pemberdayaan organisasi lokal; peningkatan hak akses terhadap sumber-sumber	Lingkungan hidup sosial; lingkungan hidup binaan; lingkungan hidup alami	Produksi yang berkelanjutan; pemenuhan kebutuhan manusia; keadilan sosial dari generasi ke generasi
Faktor Input	Sumber-sumber daya yang relevan dan segera; sumber daya manusia sebagai tenaga kerja ' <i>man power</i> '	Sumber marginal yang relevansinya tidak langsung; sumber manusia yang tidak nampak; keseimbangan antara SDM dengan hak asasi dan	Hak asasi manusia dan kemu-liaan	SDA; perubahan demografi sosial; kebutuhan dasar	Perubahan penduduk; kebutuhan dasar; pertumbuhan ekonomi; ketersediaan sumber daya alam; kualitas lingkungan hidup

Proses	Periode pembangunan secara relatif berjalan dengan singkat	Periode pembangunan secara relatif berjalan lama dan sukar diukur	Strategi jangka pendek mendukung jangka panjang	Periode pembangunan secara relatif berjalan singkat dan terukur	Periode pembangunan berjalan lama dan terukur
Hasil yang diharapkan	Nyata dan dapat diperkirakan	Tidak nyata dan sulit diperkirakan	Periode jangka pendek nyata, tetapi jangka panjang tidak nyata dan sulit diperkirakan	Nyata dan dapat diperkirakan	Dapat diperkirakan sesuai dengan skenario yang dipilih
Prinsip ekonomi	Efisiensi dan masyarakat; perdagangan bebas; saling ketergantungan; spesialisasi	Integrasi dan masyarakat; saling ketergantungan dengan kesadaran kolektif dan solidaritas organik	Integrasi dan komitmen masyarakat; kemandirian; diversifikasi ekonomi; pendekatan ekonomi rakyat	Integrasi lingkungan kedalam agenda pembangunan; aspek lingkungan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan pembangunan ekonomi	Efisiensi sumber daya; pemanfaatan SDA dan SDM secara optimal dan seimbang
Fokus sektor	Industrialisasi	Pelayanan dasar	Pertanian dan industri	Pengelolaan SDA	Integrasi aktivitas ekonomi, ekologi dan sosial
Partisipasi masyarakat	Sebagai tenaga kerja dan konsumen	Ikut memproduksi	Ikut merencanakan (partisipasi terlibat)	Pengelola dan penanggung-jawab	Sebagai pelaksana
Interven-	Lebih	Tidak terlalu	Tidak	Dominan	Dominan

si dari pemerintah	dominan dan <i>feasible</i>	kelihatan atau kurang dominan	dominan	dan didukung hukum lingkungan	sebagai perencana dan pembuat skenario pembangunan
--------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------	-------------------------------	--

Sumber: Suryono, 2010, *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*

Pembangunan yang saat ini sedang gencar untuk dilakukan yaitu lebih mengarah pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). *Sustainable Development* melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tidak melupakan pemenuhan dimasa yang akan datang. *Sustainable Development* mungkin diwujudkan melalui keterkaitan (*interlinkages*) yang tepat antara alam, aspek sosio-ekonomis dan kultur menurut Tjokrowinoto (2012:12). Upaya untuk mencapai kebutuhan sosial, ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat secara seimbang menjadi jalan bagi terwujudnya *sustainable development*.

Sugandhy (2007:41) menyebutkan beberapa petunjuk umum untuk pembangunan berkelanjutan di tingkat masyarakat meliputi hal berikut:

“(a) Mendukung pembangunan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat lebih dari sekedar menghasilkan jumlah barang-barang kebutuhan. (b) Mengintegrasikan infrastruktur perkotaan dan pemanfaatan lahan ke dalam proses ekologi lokal (seperti siklus nutrisi) sehingga tidak melampaui batas ekologi dari bioregion. (c) Meningkatkan kepercayaan dan kecukupan secara mandiri dalam energi, hasil pertanian, serta barang-barang lain berikut jasa, sebagai turunan dari sumber daya ekologi dan mendorong pemakaian barang-barang yang hanya diproduksi dengan cara berkelanjutan. (d) Meningkatkan efisiensi penggunaan lahan untuk menyesuaikan bentuk perkotaan, yang selanjutnya mengurangi kebutuhan untuk transportasi (khususnya penggunaan mobil pribadi). (e) Mengurangi konflik perkotaan/pedesaan dan gangguan wilayah pertanian di wilayah pinggiran kota dan pedesaan.”

Pembangunan suatu bangsa bukan hanya untuk mencapai kesejahteraan, akan tetapi terletak pada esensi dari pembangunan tersebut. Pembangunan bisa

dikatakan berhasil apabila tetap mengarah pada kebutuhan dimasa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu cara untuk melaksanakan pembangunan yang ramah akan masa mendatang. Dalam hal ini, diperlukan kesadaran masyarakat untuk bisa hidup mandiri dan sadar akan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Mengingat akan hal itu, maka faktor lingkungan menjadi hal yang tak terpisahkan, karena dengan lingkungan hidup yang baik akan tercipta kualitas masyarakat yang baik pula. John Elkingston's dalam Wahyudi dan Azheri (2011:31) menegaskan bahwa suatu perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) harus memperhatikan “*Triple P*” yaitu *profit, planet and people*.

Tabel 2.2 *Triple P*

No.	Aspek	Muatan
1.	Sosial (<i>People</i>)	Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan karyawan), kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama, kebudayaan dan sebagainya.
2.	Ekonomi (<i>Profit</i>)	Kewirausahaan, kelompok usaha bersama/ unit mikro kecil dan menengah (KUB/UMKM), agrobisnis, pembukaan lapangan kerja, infrastruktur ekonomi dan usaha produktif lain.
3.	Lingkungan (<i>Planet</i>)	Penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian polusi, serta penggunaan produksi dan energi secara efisien.

Sumber: *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi* oleh Wahyudi dan Azheri 2011.

3. Kesejahteraan Masyarakat

Pengertian mengenai Kesejahteraan Sosial dapat dilihat dalam pengertian berikut ini.

“Kesejahteraan Sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara

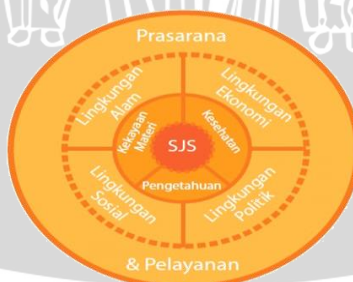
untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila” (Pemerintah dan DPR RI, 1983)

Suatu keadaan yang sejahtera bagi masyarakat memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dengan mudah. Dalam kehidupan sosial, kondisi yang sejahtera digambarkan dengan keadaan yang makmur, kondisi dari kehidupan bermasyarakat yang minim konflik yang berarti. Disaat masyarakat telah mencapai titik sejahtera, diharapkan tingkat kriminalitas dapat menurun.

Pengertian yang lain ingin ditunjukkan oleh Kamerman dan Kahn (dalam Suud, 2006:14) yang menyatakan bahwa sebagai suatu sistem, kesejahteraan sosial terdiri dari beberapa komponen, yaitu pendidikan, kesehatan, pemeliharaan penghasilan, perumahan, pelayanan kerja dan pelayanan sosial personal. Kesejahteraan sosial dianggap sebagai suatu sistem karena dalam rangka pencapaiannya, terdapat beberapa unsur yang saling berkaitan. Tercapainya suatu unsur akan merangsang unsur yang lainnya.

Usaha kesejahteraan sosial tidak hanya menyangkut perubahan dalam tingkat perbaikan kondisi kehidupan tetapi mengedepankan pada masalah pembagian kebaikan itu (Sumarnonugroho, 1991:49). Pengertian yang diungkapkan oleh Sumarnonugroho tersebut mengungkapkan bahwa kesejahteraan seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat melalui pembagian-pembagian yang ditentukan. Pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat perlu menjadi kesadaran seluruh pihak terutama bagi pihak yang telah mencapai kehidupan yang layak.

Menurut Suharto (2008:104) Kesejahteraan Sosial juga diartikan sebagai sebuah proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan menyelenggarakan pelayanan sosial. Kesejahteraan sebagai suatu proses, sejalan dengan apa yang diungkapkan Kamerman dan Kahn mengenai kesejahteraan sebagai suatu sistem. Kesejahteraan sosial tidak akan terjadi apabila tidak ada sinergitas antara masyarakat, pemerintah dan swasta untuk memberantas kemiskinan. Kesejahteraan sosial juga melihat pentingnya pelayanan yang diberikan untuk seluruh masyarakat. Pelayanan dan fasilitas harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai bentuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengingat banyaknya keadaan masyarakat yang masih belum dapat mencapai kesejahteraannya, maka diperlukan tunjangan sosial. Tunjangan sosial didanai dari pendapatan negara yang bisa disebut sebagai upaya pemerataan. Kondisi sejahtera yang disebutkan diatas juga senada dengan Indikator Kesejahteraan Rakyat menurut *Nested Spheres of Poverty (NESP)* (Gönner dalam Albornoz *et al*, 2007:12).



Gambar 2.1 *Nested Spheres of Poverty (NESP)*, Albornoz *et al* 2007.

Kesejahteraan yang dicapai masing-masing orang akan memberikan pandangan yang berbeda. Hal inilah yang disebut bahwa kesejahteraan bersifat subyektif. Akan tetapi ada beberapa indikator yang dapat menilai kesejahteraan.

Pada gambar dari NESP tersebut dapat diketahui bahwa lingkup inti kesejahteraan terdiri dari kekayaan materi, kesehatan dan pengetahuan. Sedangkan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kesejahteraan adalah lingkungan, baik lingkungan alam, sosial, ekonomi dan politik. Secara luas lagi adanya pelayanan dan prasarana yang dapat dinikmati masyarakat juga akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Menurut Poernomosidi dalam Adisasmita (2013:99), Kemudahan (*easyness*) diartikan sebagai tersedianya fasilitas pelayanan (ekonomi dan sosial) sehingga masyarakat dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, informasi, pelayanan ibadah, dan lainnya. Pelayanan tersebut belum semua masyarakat dapat menikmatinya, terlebih bagi masyarakat yang berada didaerah pedalaman.

“Fungsi kesejahteraan nasional menurut Lemhannas (1997:34), meliputi:

1. Pengintegrasian dan penyerasian segenap upaya dan kegiatan pembangunan di berbagai bidang kehidupan nasional dengan berpegang teguh pada tujuan kesejahteraan negara
2. Memelihara dan meningkatkan pendayagunaan potensi nasional secara efisien dan efektif guna pencapaian tujuan kesejahteraan nasional
3. Penyerasian dan penyelarasan kepentingan kesejahteraan nasional terhadap kepentingan keamanan nasional.”

Pemanfaatan potensi sumberdaya berawal dari aktivitas masyarakat lokal dalam memanfaatkan apa yang ada disekitar tempat tinggalnya untuk bertahan hidup. Lalu kemudian dengan berkembangnya sistem perekonomian negara maka sumberdaya yang ada dikelola lebih baik untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Pengelolaan ini bisa ditangani oleh perusahaan maupun negara.

Wibisono (2007:118) mengatakan, komunitas lokal yaitu warga yang bermukim disekitar aset perusahaan. Mereka harus dipandang sebagai satu

kesatuan dengan perusahaan yang dapat memberikan manfaat timbal balik. Manfaat yang dapat didapatkan oleh perusahaan diantaranya yaitu rasa aman dan dukungan masyarakat bagi para pelaku usaha, sumber tenaga kerja dan adanya kondisi yang kondusif. Sedangkan manfaat yang bisa didapat oleh masyarakat yaitu *prestise* karena diwilayahnya terdapat badan usaha tertentu, pendapatan, dll. Dari sebab itu, masyarakat lokal merupakan *stakeholder* eksternal yang sangat penting. Dalam PKBL Perum Perhutani, Masyarakat Desa Hutan dapat disebut Komunitas atau Masyarakat lokal dan *stakeholder* eksternal.

Pada Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 pasal 1 dijelaskan yang dimaksud dengan desa hutan adalah wilayah desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan hutan atau disekitar kawasan hutan. Sedangkan Masyarakat Desa Hutan (MDH) adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya. MDH memanfaatkan lingkungan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lokasi tempat tinggal yang berada diwilayah atau di dekat hutan bahkan cenderung ke pedalaman, membuat MDH sulit untuk mendapatkan akses fasilitas umum yang sesungguhnya mereka juga berhak untuk menikmatinya. Perhatian pemerintah yang belum menjangkau seluruh kebutuhan MDH perlu menjadi perhatian *stakeholder* yang lain yang berhubungan dengan lingkungan hutan yang menjadi keseharian MDH.

MDH disatukan dalam sebuah organisasi yang disebut LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). LMDH adalah lembaga masyarakat desa yang

berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan. LMDH juga menjadikan koordinasi kepada seluruh MDH dapat berjalan dengan mudah. Untuk mendukung kemajuan kesejahteraan ekonomi bersama bagi MDH, dibentuklah KMDH (Koperasi Masyarakat Desa Hutan) yang dibentuk oleh dan untuk MDH.

4. Pembangunan untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan kesejahteraan sosial memiliki arti strategis bagi pembangunan nasional. Sedikitnya ada empat fungsi penting pembangunan kesejahteraan sosial bagi pembangunan nasional menurut Suharto (2005:5).

1. Mempertegas peran penyelenggara negara dalam melaksanakan mandat 'kewajiban negara' (state obligation) untuk melindungi warganya dalam menghadapi resiko-resiko sosial-ekonomi yang tidak terduga (sakit, bencana alam, krisis) dan memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan berkualitas.
2. Mewujudkan cita-cita keadilan sosial secara nyata. Pembangunan kesejahteraan sosial memperhatikan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah agar dapat Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilandasi prinsip solidaritas dan kesetiakawanan sosial pada dasarnya merupakan sarana redistribusi kekayaan suatu daerah dari kelompok berpenghasilan kuat (pengusaha, penguasa, pekerja mandiri) kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan kesejahteraan sosial memberi kontribusi terhadap penyiapan tenaga kerja, stabilitas sosial, ketahanan masyarakat, dan ketertiban sosial yang pada hakikatnya merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi.
4. Meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM (Human development index). Fokus pembangunan kesejahteraan sosial adalah pada pembangunan manusia dan kualitas SDM melalui penyelenggaraan perlindungan sosial, pendidikan dan kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin.

Menurut Sugandhy (2007:41), Perencanaan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang menjamin masa depan masyarakat dan membuat masyarakat sejahtera. Apabila digabungkan dengan pendapat dari Poernomosidi dan Djumhana, penjaminan masa depan masyarakat dapat dilakukan apabila kondisi lingkungan juga dapat terjaga kelestariannya. Kelestarian alam dapat menjamin keseimbangan ekosistem. Bisa dibayangkan apabila terjadi kerusakan alam, maka akan mengganggu kehidupan makhluk hidup yang menempatnya. Selain itu, penjaminan sosial juga harus dilaksanakan untuk tercapainya kesejahteraan bersama.

Pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan untuk pertumbuhan masyarakat secara merata. Pemerataan kesejahteraan juga dapat menghindari konflik sosial yang terjadi dari pihak yang kaya dan yang miskin. Terlebih bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat kota seperti MDH, perlu mendapatkan sentuhan khusus dibidang pembangunannya, agar dapat mencapai kualitas hidup yang layak. Simon (2004:113) mengungkapkan:

“Jalan pemecahan yang paling baik untuk pembangunan masyarakat desa di sekitar hutan adalah kompromi antara kepentingan masyarakat dan kehutanan. Jalan kompromi yang dilakukan meliputi empat aspek, yaitu perluasan lapangan kerja di kehutanan bagi masyarakat setempat akan kayu bakar dan kayu bangunan, peningkatan produktivitas lahan hutan serta pengelolaan hutan bersama antara rakyat dan kehutanan untuk menjamin terlaksananya tiga aspek yang terdahulu.”

MDH memiliki kewajiban untuk ikut melestarikan hutan dan menjaga hutan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai balasannya, karena kondisi MDH yang jauh dari pusat kota, pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan hidupnya. Bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidup akan menunjang semangat MDH dalam ikut serta untuk melestarikan hutan.

B. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

1. *Good Corporate Governance*

Islamy (2003:68) mengatakan bahwa *governance* merefleksikan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang mampu memenuhi empat persyaratan utama yaitu yang kuat legitimasinya, akuntabel, kompeten dan respek terhadap hukum dan hak-hak azasi manusia. Pemerintahan yang baik bukanlah pemerintahan yang intervensinya terlalu besar dalam segala aspek. Pemerintahan yang baik mampu menempatkan diri pada posisinya dan menggandeng seluruh aktor yang terlibat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Seperti yang telah diungkapkan oleh Nasirin (2010:2) yaitu *Governance* mencakup elemen penting, yaitu prinsip-prinsip didalam membangun keseimbangan dan sinergitas diantara aktor yang menangani urusan-urusan publik.

Good Governance memiliki tiga aktor utama yang berperan dalam pembangunan suatu negara. Tiga aktor tersebut yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dan ketiganya bersama-sama mengupayakan pertumbuhan suatu bangsa. Pemerintah harus membuat regulasi yang mencakup seluruh aktor untuk berkomitmen dalam upaya pembangunan. Sektor swasta sebagai pelaku ekonomi memajukan usahanya dan membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan demi berkurangnya tingkat kesenjangan sosial.

Good governance berorientasi pada:

1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada tujuan nasional
2. Pemerintahan yang berorientasi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional
3. Nilai yang menunjang tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan

(nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial.
(Syafri, 2012:178)

Good Governance dalam pelaksanaan pemerintahan juga harus melihat nilai-nilai dalam masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar tercapai kesejahteraan masyarakat dan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Pelaksanaan pemerintahan yang baik pada perusahaan disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG). GCG berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lain (Sutedi, 2012:48). Hal yang sama juga diungkapkan oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FGCI) dalam Tjager (2003:25) yang mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder).”

Dengan GCG, seluruh *stakeholders* mendapatkan perhatian dari perusahaan dalam kesejahteraannya. Masyarakat merupakan salah satu *stakeholder* eksternal yang dimiliki oleh perusahaan. BUMN telah mulai mengaplikasikan teori *Good Corporate Governance* (GCG) pada kegiatan perusahaan. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya Peraturan Menteri BUMN No. PER-01-MBU-2011 yang telah diperbarui menjadi Per-09/MBU/2011 tentang

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*). Dengan penerapan GCG diharapkan BUMN mampu menunjukkan sikap yang profesional dan menjalankan badan usaha secara sehat.

Responsibility atau tanggung jawab juga menjadi perhatian dalam GCG untuk memperhatikan masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan baik secara langsung maupun tidak. Wahyudi (2011:171) menjelaskan dengan berpijak pada konsep menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholders*, maka prinsip *responsibility* dalam GCG akan menelurkan gagasan *corporate social responsibility* (CSR). BUMN pun secara *mandatory* melakukan kegiatan CSR sebagai salah satu kegiatan mereka. Pelaksanaan kegiatan CSR dalam BUMN dikenal dengan sebutan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan).

Menurut Tjager, dkk (2003:142), salah satu hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam penerapan *good corporate governance* adalah tanggung jawab sosial perusahaan dan etika bisnis. Tjager meyakini bahwa pelaksanaan bisnis pada suatu badan usaha tidak hanya mengenai profit yang ingin dicapai, melainkan juga harus menyeimbangkan aspek sosial masyarakat khususnya disekitar perusahaan. Dalam menjalaani suatu perusahaan, keputusan yang diambil harus membawa dampak positif baik bagi seluruh karyawan maupun masyarakat. Yang perlu disadari pula, bahwa sumberdaya sebagai modal utama berjalannya roda bisnis perusahaan perlu dijaga dan dilestarikan demi keberlanjutan perusahaan. Terlebih jika sumber daya yang digunakan merupakan sumber daya yang berasal dari alam, merupakan sebuah kewajiban perusahaan

untuk menjaga lingkungan demi keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan perusahaan.

2. Corporate Social Responsibility (CSR)

Good Corporate Governance juga menjadi dasar dalam pelaksanaan CSR. GCG sebagai bentuk penyelenggaraan perusahaan yang sehat, didalamnya terdapat tanggung jawab sebagai salah satu prinsip pelaksanaan GCG. CSR akan menjadi satu agenda perusahaan apabila ingin menerapkan prinsip GCG. Pelaksanaan CSR juga harus berdasar pada prinsip keadilan. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan CSR bagi orang-orang yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dalam program CSR yang dilaksanakan. Program CSR memiliki tujuan bagi kemajuan ekonomi dan kemandirian masyarakat serta kelestarian lingkungannya.

Terdapat 5 hal yang mempengaruhi CSR menurut *Princes of Wales Foundation* dalam Untung (2009:11):

1. *Human Capital* atau Pemberdayaan manusia
2. *Environments* atau berbicara tentang Lingkungan
3. *Good Corporate Governance*
4. *Social Cohesion*, dalam melaksanakan CSR jangan sampai menimbulkan kecemburuan social
5. *Economic Strength* atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi

Lima hal diatas menunjukkan hal-hal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan CSR. Yang pertama yaitu mengenai pemberdayaan manusia. Misalkan, dalam Perum Perhutani, MDH diberdayakan untuk ikut menjaga

keamanan hutan. Lingkungan juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaan CSR terlebih bagi perusahaan yang berkegiatan dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Selain sebagai tanggung jawab, perhatian kepada lingkungan juga merupakan upaya bagi perusahaan untuk keberlanjutan perusahaan. Apabila sumberdaya alam terus dieksploitasi tanpa menjaga kelestariannya, bukan tidak mungkin perusahaan akan kehilangan sumber daya utama untuk menggerakkan perusahaan tersebut, yang dapat menyebabkan perusahaan gulung tikar.

Banyak hal-hal yang perlu menjadi pegangan dalam penyelenggaraan CSR baik oleh perusahaan maupun oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan CSR. Berikut merupakan prinsip-prinsip CSR yang dikemukakan oleh Alyson.

Tabel 2.3 Prinsip-Prinsip *Social Responsibility* Menurut Alyson dalam Hadi (2011:63):

No.	Prinsip	Uraian
1	Prioritas Korporat	Mengakui tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi perusahaan, sehingga segala aktivitas (operasi) perusahaan tak dapat dilepas dari tanggung jawab sosial.
2	Manajemen Terpadu	Mengintegrasikan kebijakan, program dan praktik kedalam setiap kegiatan bisnis sebagai satu unsur manajemen dalam semua fungsi.
3	Proses Perbaikan	Secara berkesinambungan memperbaiki kebijakan, program dan kinerja sosial korporat, berdasarkan temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara internasional.
5	Pengkajian	Melakukan kajian dampak sosial sebelum memulai kegiatan atau proyek baru dan sebelum menutup satu fasilitas atau meninggalkan lokasi proyek.
6	Produk dan Jasa	Mengembangkan produk dan jasa yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.
7	Informasi Publik	Memberi informasi dan (bila diperlukan) mendidik pelanggan, distributor dan publik tentang penggunaan yang aman, dan begitu pula dengan jasa.
8	Fasilitas dan Operasi	Mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian dampak lingkungan.

No.	Prinsip	Uraian
9	Penelitian	Melakukan atau mendukung penelitian dampak sosial bahan baku, produk, proses, emisi dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha dan penelitian yang menjadi sarana mengurangi dampak negatif.
10	Prinsip Pencegahan	Memodifikasi manufaktur, pemasaran atau penggunaan produk dan jasa, sejalan dengan penelitian mutakhir untuk mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.
11	Kontraktor dan Pemasok	Mendorong penggunaan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial korporat yang dijalankan kalangan kontraktor dan pemasok, disamping itu bila diperlukan masyarakat perbaikan dalam praktik bisnis yang dilakukan kontraktor dan pemasok.
12	Siaga Menghadapi Darurat	Menyusun dan merumuskan rencana menghadapi keadaan darurat, dan bila terjadi keadaan bahaya bekerjasama dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang dan komunitas lokal. Sekaligus mengenali potensi bahaya yang muncul.
13	<i>Transfer Best Practice</i>	Berkontribusi pada pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintah serta lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial
14	<i>Memberi Sumbangan</i>	Sumbangan untuk usaha bersama, pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintah serta lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial.
15	Keterbukaan	Menumbuhkembangkan keterbukaan dan dialog dengan pekerja dan publik, mengantisipasi dan memberi respon terhadap <i>potencial hazard</i> dan dampak operasi, produk dan limbah atau jasa.
16	Pencapaian dan Pelaporan	Mengevaluasi kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria korporat dan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan informasi tersebut pada dewan direksi, pemegang saham, pekerja dan publik.

Sumber: Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*.

John Elkingston's dalam Wahyudi dan Azheri (2011:31) mengelompokkan CSR atas 3 (tiga) aspek lebih dikenal dengan istilah “*Triple Bottom Line*” yang meliputi kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*), dan

keadilan sosial (*social justice*). Pelaksanaan CSR bukan hanya bagaimana meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, tetapi juga harus memperhatikan kualitas lingkungan dan berjalan tanpa adanya diskriminasi bagi seluruh masyarakat yang terlibat. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dibahas terdahulu mengenai pembangunan. CSR yang juga merupakan upaya pembangunan masyarakat perlu untuk memperhatikan ketiga aspek tersebut.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pelaksanaan CSR pada perusahaan juga mempraktikkan upaya agar perusahaan dapat terjamin keberlanjutannya. Keberlanjutan perusahaan tidak akan bisa didapat apabila sumber daya alam sebagai bahan utama produksi usaha tidak dijaga kelestariannya dengan baik. Maka dari itu, usaha yang dilakukan oleh perusahaan harus mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan. Dalam mengupayakan keberlanjutan perusahaan dan lingkungan, maka diperlukan komitmen untuk mendasarkan pembangunan pada pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dapat tergambar dari program CSR yang dilakukan oleh perusahaan.

Komitmen dalam melaksanakan program CSR diperlukan bukan hanya bahwa CSR merupakan sebuah kewajiban, tetapi bahwa CSR dapat berguna bagi keberlanjutan perusahaan. Pelaksanaan PKBL atau CSR bagi BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Secara Khusus untuk Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, PKBL diatur dalam Surat Keputusan Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Nomor 3324/KPTS/II/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Yang disebut dengan PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perum Perhutani (3324/KPTS/II/2007 pasal 1). Pada pasal 2 disebutkan maksud dan tujuan dari PKBL Perum Perhutani adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan usaha kecil masyarakat, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan usaha kecil milik pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) Perhutanan agar lebih tangguh dan mandiri serta perbaikan kondisi sosial dan lingkungan. PKBL merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh BUMN.

Pada PER-05/MBU/2007 Pasal 9 disebutkan sumber dana untuk PKBL. Dana Program Kemitraan bersumber dari penyisihan laba setelah pajakmaksimal sebesar 2%; jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional; pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. Menurut Tennyson dalam Wibisono (2007:109) kemitraan adalah kesepakatan antar sektor dimana individu, kelompok dan organisasi sepakat bekerjasama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, bersama-sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara berkala meminjau kembali hubungan kerjasama. Bagi perusahaan, kemitraan merupakan salah satu contoh penerapan etika bisnis. Dengan kemitraan, diharapkan dapat tercipta kondisi yang saling menguntungkan bagi seluruh aktor yang terlibat.

Manurut Hafsah (2000:47), kemitraan akan menumbuhkan berbagai manfaat. Manfaat dari kemitraan yaitu produktivitas; efisiensi; jaminan kualitas, kuantitas dan kontinuitas; risiko; sosial; dan ketahanan ekonomi. Dengan kemitraan, diharapkan dapat terjadi peningkatan produktivitas masyarakat dan berkembangnya usaha kecil yang dimiliki masyarakat. Dengan adanya kemitraan pula, diharapkan terjadi peningkatan sosial masyarakat dan dapat meningkatkan ketahanan ekonominya. Kemitraan dalam PKBL yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani dilakukan melalui pembinaan usaha kecil dan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM) yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Pembinaan Usaha Kecil

Istilah pembinaan sering kali diidentikkan sebagai upaya untuk menaikkan kualitas dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Thoha (1993:7) mengungkapkan:

“Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian pembinaan yaitu pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan proses, atau penyatuan dari suatu tujuan dan pembinaan juga bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.”

Pembinaan biasanya mencakup transfer sebuah nilai yang dianggap baik dan benar dari satu orang kepada orang lain. Dengan adanya pembinaan diharapkan seseorang mampu melakukan suatu hal lebih baik dari sebelumnya. Seperti yang telah dikatakan oleh Kabul (2005:28) yang menyatakan bahwa pembinaan atau pendidikan haruslah memaparkan tidak sekedar permasalahan

keadilan sebagai satu-satunya tujuan hukum secara dragmatis melainkan ia harus mengemukakan suatu kepatutan sebagai representasi nilai yang hidup dalam masyarakat. Pembinaan yang dilakukan juga harus melihat nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembinaan usaha kecil merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil untuk mengembangkan usahanya melalui transfer nilai dari pembina kepada yang dibina.

Pembinaan usaha kecil yang dimiliki oleh MDH yang dilakukan oleh Perum Perhutani melalui PKBL diharapkan mampu memperbaiki kualitas hidup MDH menjadi lebih baik lagi. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 jt rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 milyar (Hafsah, 2000:10). Pembinaan usaha kecil MDH tidak luput dari perhatian PKBL Perum Perhutani sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan MDH. Pencapaian suatu kesejahteraan bisa diupayakan dengan cara mendukung usaha yang dimiliki MDH.

“Program pembinaan dan pengembangan yang dilakukan terlihat dalam berbagai bentuk kegiatan baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras. Bantuan perangkat lunak dapat dilihat dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi pengusaha kecil, konsultasi peningkatan atau pembinaan usaha, bantuan promosi dagang serta berbagai keringanan dan kemudahan yang diberikan kepada pengusaha kecil dalam rangka mendorong pengembangan usahanya. Sedangkan bantuan perangkat keras terlihat dalam bentuk penyediaan tempat usaha khusus bagi industri kecil, bantuan permodalan, penyediaan fasilitas pelayanan bersama (*common service fasilitas*) pada sentra-sentra industri kecil dan berbagai bantuan yang langsung diberikan kepada pengusaha kecil.” (Syarif, 1991:3)

Pembinaan Usaha Kecil yang dilakukan oleh Perum Perhutani dalam PKBL juga mencakup mengenai perangkat keras dan perangkat lunak seperti yang telah diungkapkan oleh Syarif. Pembinaan usaha kecil dalam PKBL Perum Perhutani sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Srarif dan diatur dalam SK Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur No: 3324/KPTS/II/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan PKBL. Kegiatan-kegiatan pembinaan usaha kecil tersebut dilakukan antar lain:

1. Permodalan

Modal kerja merupakan dana yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat digunakan untuk membelanjai bermacam kebutuhan sesuai dengan bidang usaha (Soeprihanto, 1997:9). Modal yang dipinjamkan kepada masyarakat merupakan upaya untuk membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Usaha Kecil yang dilakukan oleh MDH akan mendapatkan pinjaman untuk membiayai modal kerja sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat tersebut telah ditetapkan dalam SK Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur No: 3324/KPTS/II/2007 pasal 3, yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,00
3. Milik WNI
4. Berbentuk usaha orang, perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk Koperasi LMDH
5. Kegiatan usaha dari mitra binaan Program Kemitraan diprioritaskan pada bidang usaha yang bersangkutan paut dengan perhutanan
6. Usaha berdiri dsendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar

7. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan dan atau sudah menjadi binaan Perhutani minimal 6 bulan
8. Tidak sedang menjadi binaan BUMN lain
9. Poin 1 s/d 8 harus didukung dengan berita acara yang dibuat oleh tim PKBL KPH, Kesatuan Bisnis Mandiri Industri Non Kayu (KBM INK) dan Industri Kayu (KBM IK).

2. Fasilitas untuk meningkatkan produksi dan penjualan mitra binaan

Fasilitas atau aktiva tetap yang dibeli bertujuan untuk meningkatkan produksi dan penjualan mitra binaan. Fasilitas merupakan upaya Perum Perhutani untuk membantu usaha kecil MDH untuk berkembang. Fasilitas yang diberikan yaitu berupa koperasi usaha (KMDH) yang terbuka bagi seluruh LMDH, pengadaan kendaraan bermotor guna menunjang operasionalitas kerja gedung dan inventaris untuk menunjang kegiatan lembaga dan memudahkan pemasaran hasil produksi masyarakat.

3. Kegiatan Pembinaan

Kegiatan pembinaan yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi pendidikan, pelatihan, pemagangan, pameran, dll (SK Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur No: 3324/KPTS/II/2007, Pasal 6 ayat 2 huruf (c)). Kegiatan pembinaan tersebut juga mempengaruhi keberhasilan usaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Dengan mengembangkan skill MDH dalam mengembangkan usahanya maka kemungkinan keberhasilan juga dapat tercapai.

b. PHBM

Arief (2001:14) mengungkapkan bahwa kehutanan adalah suatu kegiatan yang bersangkutan paut dengan pengelolaan ekosistem hutan dan pengurusannya, sehingga ekosistem tersebut mampu memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa. Hutan yang ada juga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sumberdaya yang kaya dimiliki oleh hutan. Dengan ekosistem yang tidak terjamah manusia pun, hutan memiliki jasa besar bagi kehidupan manusia. Maka dari itu, keberadaan hutan perlu dikelola dan dilestarikan agar keberadaannya semakin bermanfaat bagi masyarakat sekarang maupun yang akan datang. Usaha menjaga kelestarian lingkungan juga dapat berupa kegiatan penggantian dan atau penanaman kembali setiap terjadi kerusakan (Usman, 2012:283). Segala usaha yang dilakukan demi kelestarian hutan dapat disebut sebagai pembangunan hutan.

Pembangunan kehutanan merupakan upaya penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari dan pemanfaatan hutan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Arief, 2001:15). Akan tetapi yang perlu diingat pula yaitu pemanfaatan hutan harus berdasar pada prinsip berkelanjutan. Husin (2009:82) mengungkapkan bahwa penggunaan hutan dan lahan secara tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan ekologi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor hukum, manusia, penegak hukum, dan sebagainya. Hal ini semakin memperjelas bahwa pembangunan hutan bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban masyarakat dan swasta.

Menurut Soerjani (1987:1) kelangsungan hidup manusia tergantung dari kelestarian ekosistemnya karena ekosistem itu terbentuk dari hubungan timbal-

balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Apa yang dilakukan oleh manusia akan berpengaruh kepada lingkungan hidupnya. Begitu pula apabila terhadap perubahan-perubahan lingkungan seperti misalnya bencana alam akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pendapat Soerjani diperkuat oleh pendapat dari Djumhana (1994:212) dalam hal Kehutanan. Djumhana mengatakan bahwa pembangunan kehutanan harus bergeser yang semula menekankan pada keuntungan perusahaan di bidang kehutanan harus bergeser ke keuntungan sosial. Pemanfaatan sumber daya hutan bukan hanya untuk dieksploitasi hasilnya tetapi juga harus berdampak bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian sumber daya alam agar dapat terus dimanfaatkan hasilnya dan tercipta keseimbangan ekosistem.

Pembangunan kehutanan yang dilakukan oleh Djumhana sejalan dengan PHBM Perum Perhutani. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional (Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 862/KPTS/DIR/2009, pasal 1 angka 2). Kegiatan PHBM dilakukan diantaranya juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan MDH dengan memperhatikan keberhasilan pembangunan daerah yang diukur dengan IPM yang terdiri dari daya beli, pendidikan dan kesehatan.

Keberhasilan PHBM dapat diukur dengan beberapa indikator berikut ini:

1. Peningkatan usaha produktif MDH

Usaha produktif masyarakat seyogyanya tidak akan mengubah status kawasan hutan, fungsi hutan dan status tanah perusahaan. Upaya untuk mendukung usaha produktif MDH diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan mendukung terciptanya hutan lestari. Kegiatan PHBM juga memperhitungkan keadilan dalam bagi hasil dari keuntungan kerjasama tersebut. Untuk memperkuat ekonomi MDH juga dibentuklah lembaga ekonomi dalam bentuk koperasi yang biasa disebut dengan KMDH (Koperasi Masyarakat Desa Hutan).

2. Penguatan kelembagaan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan)

Kegiatan penguatan kelembagaan dapat dilakukan berupa pelatihan, pendampingan dan fasilitas kepada MDH. LMDH juga menjadi media komunikasi antara Perum Perhutani dengan MDH untuk menselaraskan dan membangun sinergitas dalam mewujudkan hubungan yang harmonis antara Perum Perhutani dengan karyawan, pekerja, masyarakat dan pihak lain dalam rangka pengelolaan hutan lestari. Penguatan kelembagaan LMDH difokuskan pada MDH yang melakukan aktivitas pengelolaan hutan secara langsung.

3. Keberhasilan Reboisasi

Reboisasi merupakan upaya untuk menjaga kualitas dan kelestarian hutan. Kegiatan reboisasi hutan diharapkan mampu menarik partisipasi MDH untuk mendukung kegiatan ini. Reboisasi dan pengawasan hutan diharapkan dapat

mempengaruhi perbaikan fungsi lingkungan yang akan mencapai kelestarian hutan yang berada di lingkungannya.

4. Penurunan gangguan keamanan hutan

Masyarakat juga dilibatkan dalam menjaga keamanan hutan diwilayahnya. Penjagaan hutan diupayakan untuk meningkatkan peran LMDH dalam kegiatan perlindungan sumberdaya hutan. Selain itu masyarakat juga berperan untuk mengamankan sumberdaya hutan dan proses pemanenan hasil hutan.

C. Penetapan hipotesis nol (H_0) dan Hipotesis alternatif (H_a)

Berdasarkan penelitian ini, melalui pemecahan masalah dengan berbagai referensi yang menunjang dalam pencarian data, dmaka diperlukan pula adanya hipotesis. Menurut Purwanto (2011), Hipotesis merupakan pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang masih belum tentu kebenarannya sehingga harus diuji secara empiris. Hipotesis Nol (H_0) yaitu suatu hipotesis tentang tidakadanya pengaruh yang signifikan yang pada umumnya diformulasikan untuk ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) merupakan hipotesis penelitian. Berikut merupakan hipotesis yang dapat digunakan dalam penelitian ini:

1. Hipotesis Pertama

H_{01} : Tidak terdapat pengaruh antara Pembinaan Usaha Kecil terhadap Kesejahteraan MDH.

H_{a1} : Terdapat pengaruh antara Pembinaan Usaha Kecil terhadap Kesejahteraan MDH.

2. Hipotesis Kedua

Ho1 : Tidak terdapat pengaruh antara Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat terhadap Kesejahteraan MDH secara parsial.

Ha1 : Terdapat pengaruh antara Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat terhadap Kesejahteraan MDH secara parsial.

3. Hipotesis Ketiga

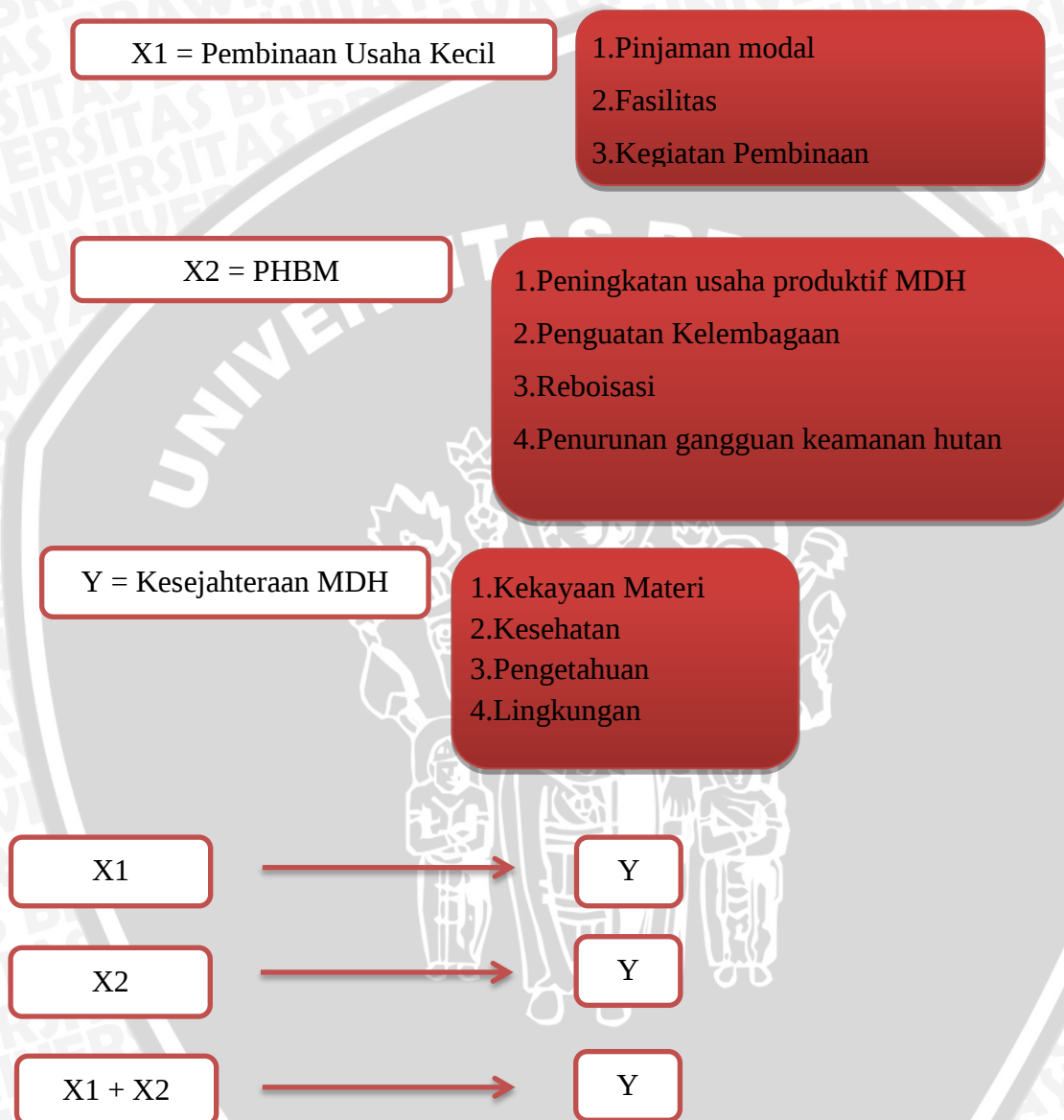
Ho3 : Tidak terdapat pengaruh antara Pembinaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat terhadap Kesejahteraan MDH.

Ha3 : Terdapat pengaruh antara Pembinaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat terhadap Kesejahteraan MDH.



D. Kerangka Konseptual

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual



Sumber: Olahan Penulis. 2015

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian eksplanatif menurut Prasetyo (2008) memiliki tujuan untuk menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki keterkaitan dan menghasilkan pola hubungan sebab akibat. Seperti halnya pembinaan usaha kecil dan PHBM yang memiliki hubungan kausal dengan kesejahteraan MDH. Peneliti ingin mengetahui hubungan kausal antara Pembinaan usaha kecil dan PHBM terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, dan menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa (Singarimbun, 2006:5).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Lancar Jaya Desa Ngancar Kabupaten Kediri dan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kediri. Peneliti melakukan penelitian di LMDH Lancar Jaya karena lokasinya yang jauh dari pusat kota dan pada LMDH tersebut tergambar kegiatan-kegiatan dari KPH Perhutani untuk Masyarakat Desa Hutan termasuk mengenai pembinaan usaha kecil dan PHBM, sehingga pengambilan data lebih mudah. Desa Ngancar diambil sebagai lokasi penelitian karena wilayah hutan terbesar di Kabupaten Kediri terdapat di wilayah tersebut dan kedua kegiatan tersebut terlaksana didalamnya.

C. Definisi konseptual, operasional variabel dan skala pengukuran

1. Definisi Konseptual

- a. Pembinaan usaha kecil merupakan berbagai bentuk kegiatan baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat lunak dapat dilihat dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan promosi. Sedangkan perangkat keras dapat dilihat dari permodalan dan fasilitas.
- b. PHBM adalah Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.
- c. Kesejahteraan yaitu proses atau usaha terencana yang dilakukan perorangan, lembaga, masyarakat maupun pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penyelenggaraan pelayanan sosial.

2. Operasional Variabel

Agar dapat diukur, berbagai konsep dan teori yang dipakai dalam penelitian perlu diturunkan tingkatannya menjadi variabel-variabel penelitian. Variabel per definisi adalah konsep yang mengalami varian nilai atau memiliki varian.

No	Konsep	Variabel	Indikator	Item
1.	Kemitraan dalam CSR/PKBL Perum Perhutani	Pembinaan Usaha Kecil (X1) Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) (X2)	1.Pinjaman modal 2.Fasilitas 3.Kegiatan Pembinaan (Syarif,1991:3 disesuaikan dengan 324/KPTS/II/2007) 1.Peningkatan usaha produktif MDH 2.Penguatan LMDH 3.Reboisasi 4.Penurunan gangguan keamanan hutan (Djumhana,1994:212 disesuaikan dengan 682/KPTS/DIR/2007)	1.Pembiayaan modal kerja usaha kecil MDH 2.Ketepatan waktu membayar cicilan pinjaman modal 3.Penyediaan fasilitas untuk melancarkan usaha masyarakat 4.Pameran untuk memperkenalkan hasil produksi 5.Kegiatan pembinaan manajerial 6.Kegiatan pembinaan teknis produksi 1.Dukungan PHBM terhadap usaha produktif masyarakat 2.Keterlibatan MDH dalam menetapkan nilai dan proporsi 3.Pelatihan kelembagaan bagi MDH 4.Pertemuan dan pendampingan dari Perum Perhutani secara intensif 5.Pengawasan hutan 6.Kualitas hutan 7.Partisipasi MDH dalam pemantauan hutan 8.Partisipasi MDH dalam proses pemanenan hasil hutan
	Kesejahteraan Masyarakat	Kesejah-teraan Masyarakat Desa Hutan (MDH) (Y)	1.Kekayaan Materi 2.Kesehatan 3.Pengetahuan 4.Lingkungan (NESP, 2007)	1.Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 2.Tabungan masyarakat 3.Keluarga MDH yang menderita sakit 4.Prasarana Kesehatan untuk Masyarakat 5.Adanya sarana pendidikan 6.Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat 7.Kondisi lingkungan yang nyaman 8.Kesempatan kerja bagi MDH usia produktif 9. Dampak Pembinaan Usaha Kecil Bagi Masyarakat 10. Dampak PHBM Bagi Masyarakat

Sumber: Olahan Penulis. 2015

3. Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2008:105). Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2008:107). Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Untuk melakukan kuantifikasi maka skala kemudian diberi angka-angka sebagai simbol agar dilakukan perhitungan. Umumnya pemberian kode angkanya sebagai berikut : “sangat tidak setuju” diberi angka 1, “tidak setuju” diberi angka 2, “ tidak tahu (netral)” diberi angka 3, “setuju” diberi angka 4, “sangat setuju” diberi angka 5”. Tentunya nilai dari angka-angka tersebut relatif karena angka-angka tersebut hanya merupakan simbol dan bukan angka sebenarnya.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah semua individu atau unit-unit yang menjadi target penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh anggota LMDH Lancar Jaya. LMDH Lancar Jaya beranggotakan 1.442 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih mengikuti prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Dalam penelitian ini, jumlah sampel akan ditentukan dengan rumus yang dikemukakan oleh Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Presentase ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel (10%)

$$n = \frac{1442}{1 + 1442 \cdot (10\%)^2} = \frac{1442}{1 + 14,42} = \frac{1442}{15,42} = 93,51 = 94$$

Dari jumlah populasi diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang mewakili populasi sebanyak 94 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

1. Pengumpulan Data:

a. Kuesioner

Dalam penelitian ini kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih salah satu dari beberapa alternatif jawaban yang telah disediakan, format jawaban dari kuesioner disusun dengan menggunakan skala Likert.

b. Studi Kepustakaan dan dokumentasi

Studi kepustakaan dan dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan tertulis berupa literatur, media massa, data statistik dan studi dokumentasi untuk memperoleh konsep teoritik dari masalah penelitian.

2. Instrumen Penelitian:

a. Kuesioner

Merupakan daftar pertanyaan yang diajukan pada responden untuk memperoleh data primer. Dalam penelitian ini, kuesioner yang disebar sebanyak 110 dengan pengawalan peneliti. Kemudian diseleksi lagi hingga digunakan 94 kuesioner.

b. Dokumentasi

Mencatat dokumen-dokumen yang dimiliki oleh kantor KPH dan LMDH. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang didalamnya terdapat informasi mengenai upaya CSR yang dilakukan oleh perhutani terhadap MDH seperti jumlah keanggotaan, jadwal kegiatan dan foto-foto.

F. Uji Validitas dan Reliabilitas

Langkah selanjutnya adalah menganalisa terhadap data yang sudah diambil untuk diinterpretasikan. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka analisis data yang akan dilakukan bertujuan untuk menguji kebenaran hipotesa tersebut dengan

penjelasannya. Dalam menguji hipotesis digunakan teknik analisa sebagai berikut:

1. Validitas

Validitas menyangkut tingkat akurasi yang dicapai oleh sebuah indikator dalam menilai sesuatu atau akuratnya pengukuran atas apa yang seharusnya diukur. Menurut Singarimbun (1989:122), validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan suatu intrumen uji validitas yang dapat dihitung dengan teknik statistik korelasi *product moment* dari Pearson dengan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n(\sum X^2) - (\sum X)^2][n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

r_{xy} : Koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y

n : Banyaknya sampel (responden)

X : Variabel yang mempengaruhi (bebas)

Y : Variabel yang dipengaruhi (terikat)

Selanjutnya hasil r_{xy} dikonsultasikan dengan r_{tabel} *product moment* dengan $\alpha = 5\%$, jika $r_{xy} > r_{\text{tabel}}$ maka alat ukur dinyatakan valid. Bila koefisien korelasi (r) sama dengan 0,3 atau lebih (paling kecil 0,3) maka butir instrumen dinyatakan valid. Jadi untuk korelasi antara butir dengan skor total lebih dari 0,3 pada level signifikansi kurang dari 5%, maka butir instrumen tersebut dinyatakan valid.

Pengujian validitas dalam penelitian ini nantinya akan dibantu menggunakan komputer dengan bantuan program *SPSS 21.00 for windows*.

2. Reliabilitas

Dalam Singarimbun (1989:140), reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Artinya bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya atau digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen sudah baik. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menguji skor antar item untuk menguji tingkat reliabilitas, dalam penelitian ini menggunakan metode *Alpha Cronbach*, dengan rumus sebagai berikut:

$$\alpha = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{V_t^2} \right]$$

Keterangan:

α : *Alpha Cronbach*

k : Jumlah item

$\sum \sigma_b^2$: Jumlah varian butir/item

V_t^2 : Varian total

Cronbach's alpha yang baik adalah mendekati 1. Reliabilitas yang kurang dari 0,6 adalah kurang baik, 0,7 dapat diterima dan reliabilitas dengan *Cronbach's alpha* 0,8 atau di atasnya adalah baik.

G. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penelitian dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Uji asumsi klasik yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk melihat bahwa data sampel yang digunakan dalam penelitian mengikuti atau mendekati distribusi normal dan tidak terjadi penyimpangan yang berarti. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat penyebaran data yang dapat diketahui melalui penyebaran titik pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya (Ghozali, 2006:112). Garis dan titik tersebut dilihat dari diaram P-P Plot dengan bantuan program *SPSS for Windows*. Dasar pengambilan keputusannya yaitu:

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berfungsi untuk mengetahui apakah suatu model memiliki hubungan yang sempurna atau hampir sempurna antara variabel bebas, sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh antar variabel-variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Adanya multikolinearitas dapat diketahui dari nilai yang didapat melalui program *SPSS for Windows* pada *Variance Inflation Factors (VIF)* dan *Tolerance*. Nilai cut off yang umum dipakai untuk

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance $<0,10$ atau sama dengan nilai VIF >10 maka terjadi multikolinearitas. Dan sebaliknya apabila VIF >10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2006:91).

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas berfungsi untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas sedangkan jika sebaliknya disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas.

Deteksi adanya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu dari grafik scatterplot, dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat dari ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan SPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$). Jika ada pola tertentu yang teratur (seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka dapat diketahui telah terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas atau dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

H. Teknik Analisis

1. Analisis Deskriptif

Untuk mendeskripsikan secara umum hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengklasifikasikan skor data yang diperoleh sebelum dilakukan persentasenya. Dalam pengklasifikasian ini menggunakan rumus:

$$\text{Lebar interval} = \frac{\text{skor tertinggi} - \text{skor terendah}}{\text{banyaknya interval}}$$

Selanjutnya dilakukan perhitungan persentase dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan: P= persentase jawaban responden
F=frekuensi jawaban responden
N=banyaknya responden

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ialah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara mereka (Riduwan, 2009). Model regresi berganda dikembangkan untuk melakukan estimasi/prediksi nilai variabel dependen (Y) dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen ($X_1, X_2, X_3, \dots$ dst)

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

Y: Kesejahteraan Masyarakat

X_1 : Pembinaan Usaha Kecil

X_2 : PHBM

a : konstanta

b_1, b_2 : Koefisien regresi parsial

3. Uji Hipotesis

a. Uji F (Simultan)

Uji F ini dilakukan untuk menguji hipotesis yang pertama, signifikan atau tidak dengan rumus secara simultan sebagai berikut:

$$F = (R^2/k)/(1-R^2)(n-k-1)$$

Keterangan :

F : Harga F sebagai uji keberartian regresi

R : Koefisien korelasi ganda

K : jumlah variabel independent

n : jumlah anggota sampel

b. Uji t (Parsial)

Uji ini dilakukan untuk menguji signifikansi masing-masing variabel (X_1, X_2) secara parsial atau untuk mengetahui pengaruh yang paling dominan diantara kedua variabel X terhadap variabel Y. Adapun uji hipotesis yang digunakan adalah uji t merupakan uji hipotesis secara parsial yaitu sebagai berikut:

$$t = B / \text{Seb}$$

Keterangan:

t : Koefisien penentu

B : Koefisien variabel beban

Seb : standart error koefisien b (variabel bebas)

4. Analisis korelasi *product moment*

Uji korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel atau untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji korelasi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut ini (Arikunto, 2010:316):

Keterangan :

r_{xy} : koefisien korelasi antara variabel x dengan variabel y

$\sum xy$: Jumlah perkalian x dan y

x^2 : Kuadrat dari x

y^2 : Kuadrat dari y

5. Analisis korelasi parsial

Analisis korelasi parsial digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dimana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap (sebagai variabel kontrol).

$$r_{x_1.y-x_2} = \frac{r_{x_1.y} - (r_{x_2.y}) \cdot (r_{x_1.x_2})}{\sqrt{[1 - (r_{x_2.y})^2][1 - (r_{x_1.x_2})^2]}}$$

$$r_{x_2.y-x_1} = \frac{r_{x_2.y} - (r_{x_1.y}) \cdot (r_{x_1.x_2})}{\sqrt{[1 - (r_{x_1.y})^2][1 - (r_{x_1.x_2})^2]}}$$

Keterangan:

$r_{x_1.y}$: Koefisien korelasi x_1 dengan y

$r_{x_2.y}$: koefisien korelasi x_2 dengan y

$r_{x_1.x_2}$: koefisien korelasi x_1 dengan x_2

$r_{x_1.y-x_2}$: koefisien korelasi parsial x_1 dengan y , mengendalikan x_2

$r_{x_2.y-x_1}$: koefisien korelasi parsial x_2 dengan y , mengendalikan x_1

6. Analisis korelasi ganda

Analisis korelasi ganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara X_1 dan X_2 dengan variabel Y secara bersama-sama dimana sifat hubungannya berkorelasi ganda. Untuk mengetahui korelasi ganda antara variabel tersebut dapat digunakan rumus:

$$r_{yx1x2} = \sqrt{\frac{r^2_{x_1y} + r^2_{x_2y} - 2r_{x_1y}r_{x_2y}r_{x_1x_2}}{1 - r^2_{x_1x_2}}}$$

Keterangan:

$ryx1x2$: korelasi ganda antara X_1 dan X_2 dengan variabel Y

$ryx1$: korelasi sederhana antara X_1 dengan Y

$ryx2$: korelasi sederhana antara X_2 dengan Y

$rx1x2$: korelasi sederhana antara X_1 dengan X_2

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum Perum Perhutani

a. Sejarah Singkat

Perum Perhutani merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada bidang kehutanan dan termasuk BUMN tertua di Indonesia. Pembentukan Perum Perhutani didasarkan pada UU No. 19 Peraturan Pemerintah tahun 1960 yang masih bernama Perusahaan Kehutanan Negara. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1972 namanya diubah menjadi Perum Perhutani. Sebagai BUMN yang bergerak di bidang kehutanan, Perum Perhutani memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Sebagai suatu perusahaan, Perum Perhutani juga memiliki visi dan misi. Visi dari Perum Perhutani yaitu menjadi perusahaan yang unggul dalam pengelolaan hutan lestari. Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut yaitu: Mengelola sumberdaya hutan secara lestari (Planet), meningkatkan pemanfaatan pengelolaan sumberdaya, hutan bagi seluruh pemangku kepentingan (People) dan menyelenggarakan bisnis kehutanan dengan prinsip *good corporate governance* (Profit).

Wilayah kerja Perum Perhutani meliputi seluruh kawasan hutan negara yang terbagi di tiap-tiap provinsi yaitu Jawa Barat dan Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur kecuali kawasan hutan konservasi. Total wilayah hutan yang dikelola

oleh Perum Perhutani sebesar 2.566.889 ha, terdiri atas Hutan Produksi seluas 1.454.176 ha (57%), Hutan Produksi Terbatas seluas 428.795 ha (16%) dan Hutan Lindung seluas 683.889 ha (<http://bumn.go.id/perhutani#>). Perum Perhutani yang terbagi atas tiga wilayah kerja terbagi lagi dalam 57 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang meliputi: wilayah kerja Unit I Jawa Tengah yang terbagi dalam 20 KPH, wilayah kerja Unit II Jawa Timur terbagi dalam 23 KPH dan wilayah kerja Unit III Jawa Barat dan Banten yang terbagi dalam 14 KPH. Perum Perhutani KPH Kediri termasuk dalam wilayah kerja Unit II Jawa Timur.

b. Tugas dan Fungsi

Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani, Perum Perhutani memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

Sebagaimana visi dan misi yang telah dipaparkan sebelumnya, Perum Perhutani memiliki tugas dalam pengelolaan hutan yang mencakup perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Perhutani sebagai perusahaan umum merupakan BUMN yang status kepemilikannya tidak terbagi atas saham yang berarti seluruh modalnya adalah milik negara.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Perum Perhutani memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. Melaksanakan kegiatan pengujian dan pengembangan teknologi, bahan baku, bahan pembantu, proses, peralatan dan hasil produksi.

- b. Memproduksi barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- c. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, termasuk pembinaan teknis, konsultasi dan informasi.
- d. Menyusun laporan hasil-hasil pengujian dan pengembangan yang telah dilakukan.

c. Struktur Organisasi

Perum Perhutani dipimpin oleh seorang Direktur Utama (Dirut) yang berada dibawah Kementerian Kehutanan Dirjen Pembinaan Hutan. Dirut membawahi empat direksi, yaitu:

1. Direktur Produksi
2. Direktur Pemasaran
3. Direktur Keuangan
4. Direktur Umum

Selain itu terdapat juga Kepala Unit kerja dari tiga wilayah kerja yang juga bertanggung jawan pada Dirut. Perum Perhutani Unit II Jawa Timur membawahi sepuluh biro, yaitu:

1. Biro Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan
2. Biro Perlindungan Sumberdaya Hutan
3. Biro Pembinaan Sumberdaya Hutan
4. Biro Produksi
5. Biro Teknik dan Perlengkapan

6. Biro Sumberdaya Manusia dan Umum
7. Biro Pemasaran Hasil Hutan
8. Biro Industri dan Pemasaran Hasil Industri
9. Biro Keuangan
10. Biro Pengawasan

2. Gambaran Umum Kabupaten Kediri

a. Geografis

Kabupaten Kediri memiliki luas wilayah sebesar 1.386,05 Km² atau 138.605 Ha yang terbagi menjadi 26 kecamatan, serta 343 desa dan 1 kelurahan. Sebelum tahun 2004 Kabupaten Kediri terbagi menjadi 23 kecamatan dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 dibentuk tiga kecamatan baru yang merupakan pemekaran dari tiga kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Kayen Kidul, pemekaran dari Kecamatan Pagu.
2. Kecamatan Badas, pemekaran dari Kecamatan Pare.
3. Kecamatan Ngasem, pemekaran dari Kecamatan Gampengrejo.

Wilayah Kabupaten Kediri terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur yaitu terletak antara 111° 47' 05" s/d 112° 18' 20" Bujur Timur dan 7° 36' 12" s/d 8° 0' 32" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Jombang & Nganjuk.
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar & Tulungagung.
3. Sebelah Timur : Kabupaten Malang & Jombang.

4. Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk & Tulungagung.

Secara geologis, karakteristik wilayah Kabupaten Kediri dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Bagian Barat Sungai Brantas, merupakan perbukitan lereng Gunung Wilis dan Gunung Klotok, sebagian besar merupakan daerah kurang subur.
2. Bagian Tengah, merupakan dataran rendah yang sangat subur, melintas aliran Sungai Brantas dari selatan ke utara yang membelah wilayah Kabupaten Kediri.
3. Bagian Timur Sungai Brantas, merupakan perbukitan kurang subur yang membentang dari Gunung Argowayang di bagian utara dan Gunung Kelud di bagian selatan.

Kondisi lahan suatu wilayah dapat digambarkan melalui proporsi guna lahannya. Dari total wilayah Kabupaten Kediri seluas 138.605 Ha, guna lahan dengan luasan yang paling besar adalah guna sawah sebesar 47.580 Ha atau sekitar 34,33% dari total luas wilayah. Kemudian untuk guna lahan bangunan dan pekarangan memiliki luas sebesar 28.178 Ha ($\pm 20,33\%$), untuk guna lahan ladang/tegal sebesar 26.714 Ha ($\pm 19,27\%$), guna lahan hutan sebesar 17.735 Ha ($\pm 12,80\%$), serta guna lahan kering lainnya dengan total seluas 18.398 Ha ($\pm 13,27\%$).

b. Demografis

Wilayah Kabupaten Kediri dibagi atas Desa/Kelurahan sebagai berikut:

TABEL 4.1
JUMLAH DESA/KELURAHAN TAHUN 2011-2013

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (Km2)
1.	Gampengrejo	11	19,89
2.	Ngasem	12	18,70
3.	Grogol	09	34,50
4.	Banyakan	09	74,66
5.	Tarokan	10	47,20
6.	Semen	12	80,42
7.	Pagu	13	24,67
8.	Kunjang	12	29,98
9.	Plemahan	17	47,88
10.	Papar	17	24,67
11.	Purwoasri	23	42,50
12.	Kayen Kidul	12	35,77
13.	Pare	10	47,21
14.	Gurah	21	50,83
15.	Kandangan	12	41,67
16.	Puncu	08	68,25
17.	Badas	08	39,21
18.	Kepung	10	105,65
19.	Ngancar	10	94,05
20.	Plosoklaten	15	88,59
22.	Ringinrejo	11	40,27
23.	Kandat	12	69,48
24.	Mojo	20	102,73
25.	Kras	16	44,81
26.	Ngadiluwih	16	41,85
Jumlah		344	1.386,05

Sumber: <http://kedirikab.go.id>

Aspek kependudukan merupakan aspek penting dalam melaksanakan pembangunan, dalam artian penduduk merupakan faktor utama yang dapat bertindak sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan. Penduduk Kabupaten Kediri jumlahnya sebesar 1.603.041 jiwa dengan luas wilayah 1.386,05 Km² maka kepadatan penduduk rata-rata adalah 1.157 jiwa per Km.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2011	2012*	2013**
1.	Laki-laki	731.222	724.873	812.207
2.	Perempuan	746.881	681.165	790.834
	Jumlah	1.478.103	1.406.038	1.603.041
	<i>Sex ratio (%)</i>	97,90	106,42	102,70

Sumber: <http://kedirikab.go.id>

c. Sosial - Ekonomi

Pelaksanaan pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Kediri pada tahun 2013 secara umum menunjukkan perkembangan yang progresif, dengan ditandainya pemerataan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri tahun 2013 sebesar 5,78% turun 1,2 poin dibandingkan tahun 2012 yang pertumbuhan ekonominya sebesar 6,98%. Apabila dilihat per sektor maka sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor Pengangkutan dan Komunikasi yakni menjadi 7,49%, selanjutnya sektor tertinggi kedua adalah Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 7,87%.

Tabel 4.3 Lapangan Usaha Kabupaten Kediri

NO.	LAPANGAN USAHA	TAHUN		
		2011	2012*	2013**
1.	Pertanian	4.28	4.40	3.48
2.	Pertambangan dan Penggalian	6.46	4.36	4.37
3.	Industri	6.96	7.67	6.71
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	6.32	6.34	3.88
5.	Bangunan	7.63	7.08	5.00
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	7.68	9.23	7.13
7.	Angkutan dan Komunikasi	8.49	8.12	7.49
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7.56	6.93	5.16
9.	Jasa-Jasa	5.45	7.19	6.52
10.	PDRB	6.20	6.98	5.78

Sumber: <http://kedirikab.go.id>

Lapangan usaha yang terdapat di Kabupaten Kediri mayoritas masih terdapat pada sektor primer yaitu agraria yang meliputi Pertanian dan Perkebunan, sedangkan pada bidang sekunder seperti perdagangan, industri dan jasa masih berada jauh dibawah pertanian. Lapangan usaha yang berada di Kabupaten Kediri juga berbanding lurus dengan mata pencaharian yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Kediri yang tersaji dalam tabel 4.4.

Tabel 4.4 Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Kediri

NO.	LAPANGAN USAHA	TAHUN		
		2011	2012	2013**
1.	Pertanian	29.12	28.42	27.80
2.	Pertambangan dan Penggalan	2.38	2.32	2.29
3.	Industri	21.50	21.63	21.82
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.57	0.56	0.55
5.	Bangunan	0.91	0.91	0.90
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	27.32	27.90	28.25
7.	Angkutan dan Komunikasi	2.53	2.56	2.60
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa	2.22	2.22	2.20
9.	Jasa-Jasa	13.45	13.48	13.57

Sumber: <http://kedirikab.go.id>

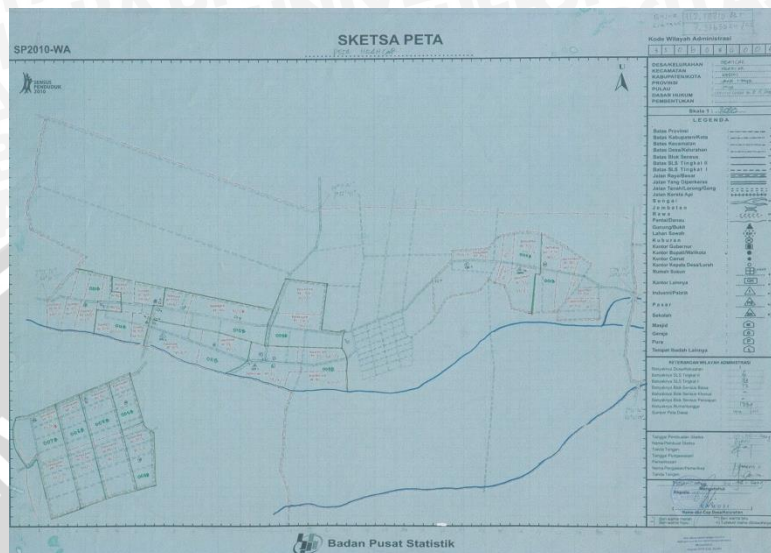
Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri dengan menggunakan Indikator PDRB per kapita tahun 2011-2013 secara lengkap sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 PDRB Perkapita Kabupaten Kediri

NO.	URAIAN	TAHUN		
		2011	2012*	2013**
1.	PDRB per kapita ADHK	5.376.065	5.728.132	5.968.940
2.	PDRB per kapita ADHB	11.589.485	12.972.278	14.514.921

Sumber: <http://kedirikab.go.id>

3. Gambaran Umum Desa Ngancar



Gambar 4.1 Peta Desa Ngancar
Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Ngancar, 2015

Desa Ngancar terletak di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Desa Ngancar terletak pada $7^{\circ}55'54''$ - $7^{\circ}59'54''$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}11'21''$ - $112^{\circ}12'54''$ Bujur Timur. Desa Ngancar memiliki luas wilayah sebesar $7,14 \text{ km}^2$ dengan tingkat kepadatan penduduk $567,93 \text{ km}^2$. Desa Ngancar terdiri dari 4 Dusun, yaitu dusun Ngancar, Panceran, Puhrejo dan Purwodadi. Melihat lokasi yang bersinggungan dengan wisata Gunung Kelud, pemerintah daerah Kabupaten Kediri mengupayakan pembangunan fasilitas jalan dengan sebaik-baiknya. Hal ini terbukti melihat jalan menuju lokasi wisata yang termasuk didalamnya yaitu Desa Ngancar memiliki jalan yang cukup luas.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri tahun 2014, Desa Ngancar memiliki jumlah penduduk sebesar 4.064 dengan rincian 2.075 penduduk Laki-laki dan 1.989 penduduk berjenis kelamin perempuan sehingga diketahui *sex ratio* diantara keduanya yaitu 104,32. Dari 4.064 penduduk yang berada di Desa Ngancar, 1.462 penduduk memiliki mata pencaharian yang berada pada sektor ekonomi utama seperti PNS, TNI, POLRI dan lain-lain. Sedangkan pada bidang 1.249 penduduk memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, 16 penduduk pada bidang industri, 18 penduduk pada bidang konstruksi dan transportasi dan 68 penduduk pada bidang perdagangan. Lokasi Desa Ngancar dapat disebut cukup subur untuk pertanian karena lokasinya yang berada di sekitar Gunung Kelud yang masih aktif. Aktivitas pertanian masyarakat juga didukung oleh program PHBM dari Perum Perhutani yang didalamnya juga memberikan kesempatan masyarakat untuk melakukan aktivitas pertanian pada daerah lahan hutan Perum Perhutani yang biasa dikenal dengan sebutan Tumpangsari.

Penduduk Desa Ngancar mayoritas memeluk agama islam, dengan jumlah penduduk yang memeluk agama islam sebesar 3.945 dan 119 penduduk memeluk agama kristen. Untuk mendukung kegiatan keagamaan masyarakat, terdapat fasilitas 3 unit bangunan Masjid dan 10 unit bangunan Mushola. Sedangkan rumah ibadah untuk agama yang lain masih bergabung pada desa lain disekitar Desa Ngancar. Selain fasilitas untuk mendukung kegiatan keagamaan, masyarakat juga memerlukan fasilitas lain seperti fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Fasilitas kesehatan yang terdapat di Desa Ngancar yaitu 1 unit Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan 6 unit Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Puskesmas

yang terdapat di Desa Ngancar merupakan Puskesmas induk dari seluruh puskesmas pembantu yang ada di wilayah Kecamatan Ngancar. Jadi, dapat dibilang bahwa Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan terbesar di daerah Ngancar, tidak ada klinik atau rumah sakit yang lain.

Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Ngancar yaitu 3 sekolah tingkat Taman Kanak-kanak (TK) dan 3 sekolah tingkat dasar (SD). Sedangkan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat pada Desa dan Kecamatan lain sehingga lebih jauh dari lokasi tempat tinggal untuk masyarakat Desa Ngancar. SD yang terdapat di Desa Ngancar, seluruhnya merupakan SD Negeri dan tidak ada yang berstatus swasta.

Tabel 4.6 Daftar Jenis Tanah di Desa Ngancar

No.	Tgl	Tanah Kering (Ha)	Tanah Perkebunan (Ha)	Tanah Fasilitas Umum (Ha)	Tanah Hutan (Ha)	Luas Desa/ Kelurahan (Ha)
1.	07-01-2014	203,9000	510,0100	17.106,0000	1.019,8000	720,0000
2.	10-10-2013	203,9000	510,0100	17.106,0000	1.019,8000	720,0000

Sumber: Kecamatan Ngancar dalam Angka. 2014

Menurut tabel diatas, dapat diketahui bahwa tanah yang terdapat di wilayah Desa Ngancar cenderung tetap dari tahun 2013 hingga tahun 2014. Begitu pula pada tanah hutan yang terdapat di wilayah Desa Ngancar luasnya masih tetap sama. Luas wilayah hutan yang masih sama perlu diapresiasi ditengah wilayah hutan yang sering terjadi penurunan karena kerusakan lingkungan. Kelestarian lingkungan hutan juga tidak lepas dari peran serta masyarakat dalam menjaga dan

melindungi hutan secara partisipatif. Humas Perum Perhutani BKPH Pare mengungkapkan, “Dengan masyarakat tidak melakukan pencurian terhadap hasil hutan, hal itu sudah termasuk langkah partisipatif masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan”.

4. Gambaran Umum Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

Lancar Jaya

Desa Ngancar merupakan salah satu Desa Hutan yang berada di wilayah Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tepatnya wilayah Kabupaten Kediri bagian timur $\pm$ 30 km dari pusat kota Kabupaten. Wilayah Desa Ngancar berada disekitar Hutan. Desa Ngancar pun memiliki lokasi yang tidak jauh dari pusat Gunung Kelud. Seiring perjalanan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang di luncurkan oleh Perum Perhutani, khususnya di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kediri, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Pare, dan Rosort Pemangkuan Hutan (RPH) Pandantoyo, tepatnya pada tahun 2005 terbentuklah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang diberi nama LMDH ”Lancar Jaya”. Salah satu unit usaha yang dimiliki oleh LMDH Lancar Jaya yaitu Koperasi yang diberi nama Koperasi Masyarakat Desa Hutan (KMDH) Lancar Jaya. Jadi, selain melalui Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), untuk mengembangkan lembaga dan juga usaha yang dimiliki anggotanya, pengurus juga menjalankan koperasi tersebut. KMDH juga mendukung program kemitraan pembinaan usaha kecil yang termasuk kegiatan CSR Perum Perhutani. Selama 1 tahun

pembentukannya, LMDH Lancar Jaya telah mampu membeli gedung untuk kantor LMDH yang sebelumnya hanya sewa.



Gambar 4.2 Peta Hutan Pangkuan Desa Ngancar
Sumber: LMDH Lancar Jaya. 2015

Luas Kawasan Hutan Pangkuan Desa Ngancar yang dikerjasamakan dalam Sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah 517.9 Ha, dengan jumlah masyarakat Desa Hutan yang menjadi anggota LMDH sebanyak ± 1.442 orang. Mata pencaharian umumnya adalah Petani dan buruh tani dengan luas lahan yang sempit. Kondisi ini tentunya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap hutan masih tinggi. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan hutan agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa harus merusak kelestariannya, LMDH "Lancar Jaya" telah menanam tanaman Pertanian seperti nanas, jagung, cabai dan jenis sayur mayur

lainnya dikawasan hutan dengan sistem tumpangsari. Penanaman dengan sistem tumpangsari memanfaatkan lahan hutan disela-sela tanaman pohon untuk ditanami warga dengan tanaman pertanian untuk optimalisasi lahan. Tanaman tumpangsari yang dilakukan warga tidak merusak tanaman inti Perum Perhutani.

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) "Lancar Jaya" mendapatkan pengesahan/legalitas dari Notaris Soebekti Ngardiman, SH. Notaris Kediri dengan No: 78 pada tanggal 12 Oktober 2005 dan diregister Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 19 Oktober 2005 dengan Nomor : 310 / 2005 / PN.KAB.KDR. Akta perjanjian kerjasama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan Perum Perhutani, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kediri yang mendapatkan pengesahan/legalitas dari Notaris Soebekti Ngardiman, SH. Notaris Kediri dengan No: 74 pada tanggal 22 Nopember 2005. Wilayah Kerja Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) "Lancar Jaya" meliputi seluruh wilayah Hutan Pangkuan Desa (HPD) Ngancar, yang sesuai perjanjian kerjasama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan perum Perhutani seluas ± 517.9 ha, terdiri dari hutan produksi.

Selain memanfaatkan Kawasan Hutan Negara dengan sistem PHBM, LMDH "Lancar Jaya" juga memanfaatkan lahan-lahan milik masyarakat untuk mengembangkan usaha. Dalam arti lain, Pengelolaan Hutan diatas dilakukan didalam Kawasan Hutan dan juga diluar Kawasan Hutan. Pengelolaan hutan diluar kawasan hutan tersebut membutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Usaha Produktif didalam kawasan hutan yang sudah dilakukan meliputi :

1. Budidaya Tanaman Nanas



Gambar 4.3 Budidaya Tanaman Nanas
Sumber: Dokumentasi LMDH Lancar Jaya

Budidaya tanaman nanas sudah ada sejak lama, dimulai sejak tahun $\pm$ 1983, ditanam pada kawasan hutan produksi dengan sistem tumpang sari ditanaman muda. Disini LMDH “Lancar Jaya” melibatkan masyarakat Desa Ngancar yang menjadi anggota LMDH dengan kesepakatan yang sudah disepakati sistem pengelolaannya dengan Perum Perhutani. Bibit tanaman merupakan swadaya masyarakat dan hasilnya juga diperuntukkan kepada masyarakat melalui sistem bagi hasil.

2. Budidaya Tanaman Jagung



Gambar 4.4 Budidaya Tanaman Jagung
Sumber: Dokumentasi LMDH Lancar Jaya

Budidaya Tanaman jagung, untuk jangka waktu yang tidak lama, dalam proses penanaman jagung tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga sangat mudah dikembangkan dan dibudidayakan oleh LMDH. Disamping itu bisa mendukung program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi [GP3K]. Seperti tanaman nanas, bibit tanaman jagung juga merupakan swadaya masyarakat. Meskipun begitu, terkadang masyarakat juga mendapatkan bantuan bibit tanaman baik dari Perum Perhutani maupun dari Dinas Pertanian atau Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

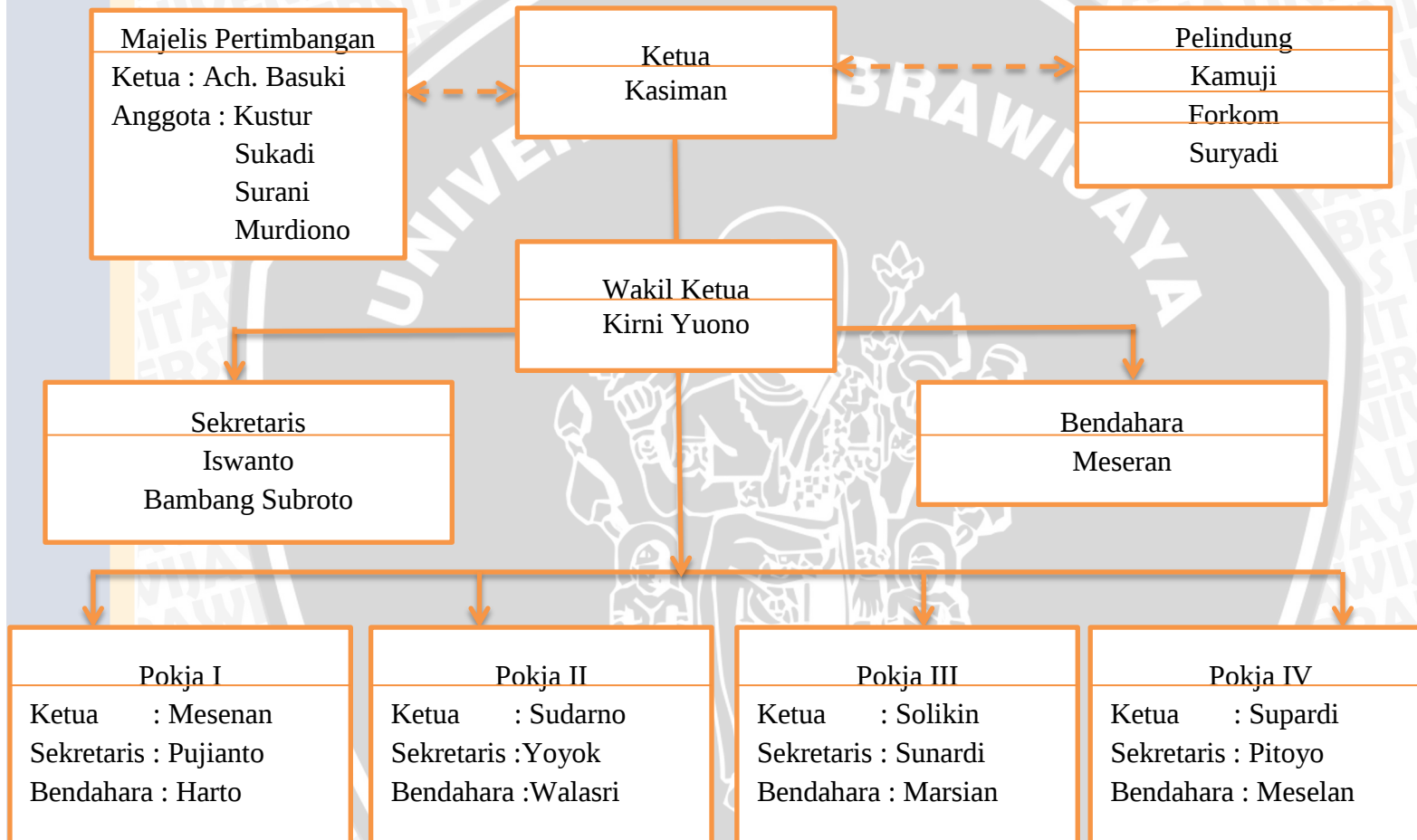
Usaha Produktif diluar kawasan Hutan dikoordinasi dalam suatu wadah koperasi. Koperasi Masyarakat Desa Hutan (KMDH) “Lancar Jaya” mendapatkan pengesahan/legalitas dari Notaris Achmadin, SH. Notaris Kediri dengan No: 32 pada tanggal 19 Desember 2009 dan disahkan oleh Dinas Koperasi, Industri dan perdagangan Kabupaten Kediri dengan Surat Keputusan Nomor : 518/BH/XVI.9/43/2010 tanggal 25 Pebruari 2010.

Koperasi Masyarakat Desa Hutan (KMDH) “Lancar Jaya”, menempati kantor yang merupakan aset LMDH, dan buka kas setiap hari Selasa dan Jumat dengan unit usaha Simpan Pinjam dengan modal per 31 Desember 2012 Rp. 315.564.500,- yang terdiri dari simpanan anggota, dana Sharing, pinjaman Bank dan pinjaman Program Kemitraan Bina Lingkungan Perhutani KPH Kediri. Unit usaha lainnya masih dalam proses pengembangan di bidang kehutanan, maupun pemenuhan kebutuhan pertanian bagi anggota dan pemasaran panen anggota LMDH.

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), harus menjadi kekuatan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya, dan hal tersebut harus ada terobosan-terobosan dari anggota LMDH dan dukungan dari Pemerintah. Pemerintah pun harus selalu melakukan pengawasan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh LMDH agar dana yang dipercayakan pemerintah kepada LMDH dapat digunakan dengan optimal. Demi mendukung terobosan baru dari masyarakat, maka Lembaga secara berkala mengadakan pertemuan agar terjalin komunikasi dua arah antara anggota dengan pengurus yang kemudian disampaikan kepada Perum Perhutani maupun pemerintah.

Oganisasi LMDH didirikan atas dasar keinginan masyarakat sekitar hutan untuk berkumpul dan berserikat dalam wadah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dengan nama LMDH “Lancar Jaya”. Sesuai dengan keberadaannya, organisasi ini tidak jauh beda dengan organisasi-organisasi yang sudah ada di masyarakat, yang didalam organisasi juga terdapat struktur organisasi pada umumnya, yang terdiri : Ketua, Sekretaris, Bendahara, dibantu seksi-seksi dan pokja sebagai kelengkapan organisasi. Selain struktur organisasi tersebut, LMDH Lancar Jaya juga beranggotakan ± 1.442 orang. Anggota LMDH Lancar Jaya merupakan warga Desa Ngancar yang secara sadar mendaftarkan diri ke Lembaga. Didalam perjalannya LMDH mulai mendirikan usaha Produktif, baik dalam kawasan hutan dan diluar kawasan hutan.

Bagan 4.5 Dewan Pengurus LMDH Lancar Jaya Periode 2012 - 2017



Sumber: Data LMDH Lancar Jaya, 2015

Administrasi LMDH “Lancar Jaya” juga tidak jauh berbeda dengan administasi yang dimiliki oleh lembaga lain yang pernah ada. Administasi LMDH dilengkapi berbagai buku keperluan operasional lembaga dan lengkap, meliputi : buku induk anggota, buku keuangan, buku notulen rapat, buku tamu, Kartu Tanda Anggota (KTA) LMDH dan masih banyak lagi. Dalam menyusun administrasi keuangan LMDH “Lancar Jaya” menggunakan sistem yang sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia akan tetapi karena keterbatasan, bentuk administrasi belum sempurna sesuai yang diharapkan.

4. Karakteristik Responden

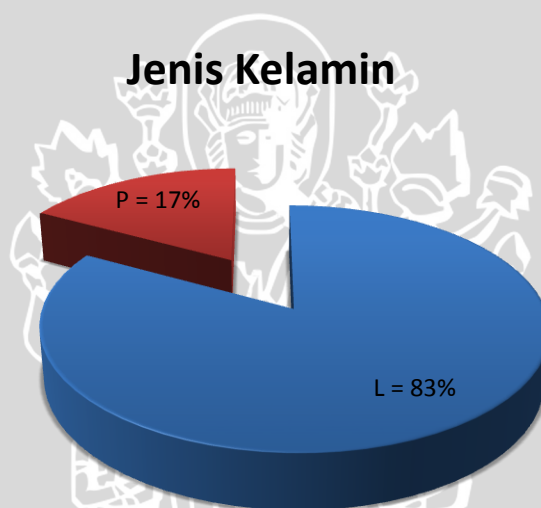
Responden diambil dari sampel yang jumlahnya dihitung berdasarkan jumlah populasi. Berdasarkan pada penentuan jumlah sampel seperti yang telah dijelaskan pada Bab III dengan rumus Slovin, maka jumlah responden yang representatif untuk penelitian ini yaitu sejumlah 94 orang. Adapun sampel diambil dengan teknik *Probability Sampling* karena setiap individu dari populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel.

Responden merupakan masyarakat Desa Ngancar yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Lancar Jaya Desa Ngancar. Desa Ngancar yang dikelilingi oleh hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani berhak mendapatkan binaan sebagai suatu gambaran dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Perum Perhutani. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap 94 anggota LMDH Lancar Jaya melalui penyebaran kuesioner, maka penulis dapat menarik beberapa gambaran umum responden yang

diteliti dalam penelitian meliputi gambaran responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir dan lokasi tempat tinggal responden.

a. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambaran distribusi responden yang merupakan anggota LMDH Lancar Jaya Desa Ngancar berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 4.6 dibawah ini.

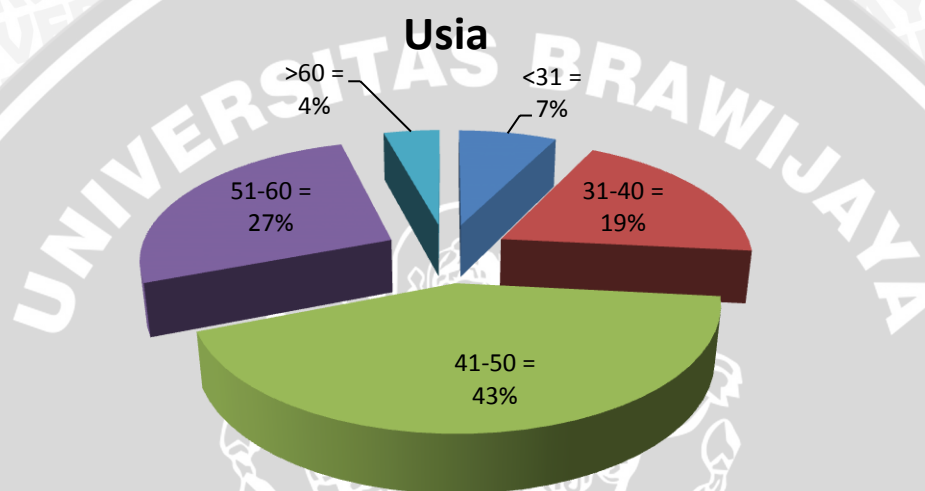


Gambar 4.6 Jenis Kelamin Responden
Sumber : Kuesioner Penelitian, 2015

Melalui gambar diagram 4.6 diketahui bahwa responden terdiri dari 83% Laki-Laki dan 17% Perempuan. Rincian dari persentase tersebut yaitu responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 78 orang, sedangkan untuk responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 16 orang. Berdasarkan data diatas, maka dapat diketahui bahwa responden paling banyak yaitu berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 78 orang.

b. Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Gambaran distribusi responden yang merupakan anggota LMDH Lancar Jaya Desa Ngancar berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

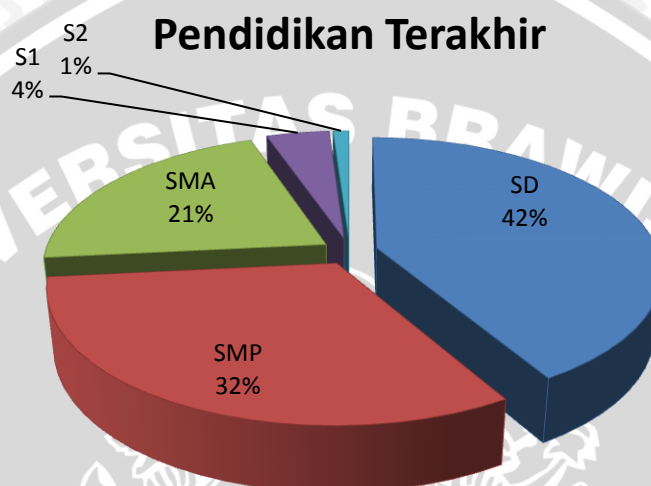


Gambar 4.7 Usia Responden
Sumber: Kuesioner Penelitian. 2015

Berdasarkan data yang tercantum pada gambar 4.7 dapat diketahui persentase usia responden. Responden dengan usia kurang dari 31 tahun sebesar 7%, untuk responden dengan usia 31-40 tahun sebesar 19%, responden dengan usia 41-50 sebesar 43%, responden dengan usia 51-60 tahun sebesar 27% dan responden dengan usia lebih dari 60 tahun sebesar 4%. Persentase tersebut didapat dari rincian responden dengan usia kurang dari 31 tahun sebanyak 7 orang, untuk responden dengan usia 31-40 tahun sebanyak 18 orang, responden dengan usia 41-50 sebanyak 40 orang, responden dengan usia 51-60 tahun sebanyak 25 orang dan responden dengan usia lebih dari 60 tahun sebanyak 4 orang.

c. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Gambaran distribusi responden yang merupakan anggota LMDH Lancar Jaya Desa Ngancar berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



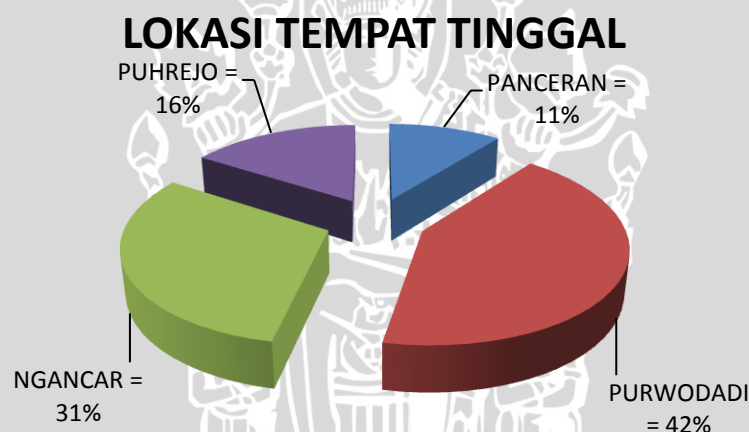
Gambar 4.8 Pendidikan Terakhir Responden
Sumber: Kuesioner Penelitian. 2015

Berdasarkan data yang tercantum pada gambar 4.8 dapat diketahui persentase untuk responden dengan tamatan Sekolah Dasar (SD) sebesar 42%, untuk tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 32%, responden dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 21%, responden dengan pendidikan terakhir S1 sebesar 4% dan responden dengan tingkat pendidikan terakhir S2 sebesar 1%. Persentase tersebut didapat dari rincian responden dengan pendidikan terakhir SD sebanyak 39 orang, SMP sebanyak 30 orang, SMA sebanyak 20 orang, S1 sebanyak 4 orang serta S2 sebanyak 1 orang. Dari data diatas dapat diketahui bahwa responden paling

banyak memiliki pendidikan terakhir SD yaitu sebanyak 39 orang, dengan persentase 42%.

d. Distribusi Responden Berdasarkan Lokasi Tempat Tinggal

LMDH Lancar Jaya berada di Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Desa Ngancar sendiri terbagi atas 4 Dusun yaitu dusun Purwodadi, Ngancar, Puhrejo dan Panceran. Gambaran distribusi responden yang merupakan anggota LMDH Lancar Jaya berdasarkan lokasi tempat tinggal dapat dilihat pada Gambar 4. dibawah ini.



Gambar 4.9 Lokasi Tempat Tinggal Responden
Sumber: Kuesioner Penelitian, 2015

Data yang tampak pada Gambar 4.9 menunjukkan persentase bahwa responden yang bertempat tinggal di Dusun Purwodadi sebesar 42%, responden yang bertempat tinggal di Dusun Ngancar sebesar 31%, responden yang bertempat tinggal di Dusun Puhrejo sebesar 16% dan responden yang bertempat tinggal di Dusun Panceran sebesar 11%. Persentase tersebut didapat dari rincian bahwa responden yang bertempat tinggal di Dusun Purwodadi sebanyak 40 orang,

di Dusun Ngancar sebanyak 27 orang, di Dusun Puhrejo sebanyak 16 orang dan yang bertempat tinggal di Dusun Panceran sebanyak 11 orang. Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa responden terbanyak bertempat tinggal di Dusun Purwodadi dengan 42%.

B. Penyajian Data

Responden dalam penelitian ini berjumlah 94 orang anggota LMDH Lancar Jaya yang telah memberikan pernyataan terkait dengan judul penelitian melalui kuesioner yang disebarakan penulis. Jawaban-jawaban responden dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Variabel Pembinaan Usaha Kecil (X_1)

Responden telah memberikan tanggapan terhadap 6 pertanyaan mengenai variabel pembinaan usaha kecil (X_1) dalam kuesioner yang disebarakan oleh penulis. Gambaran distribusi frekuensi jawaban terhadap variabel pembinaan usaha kecil (X_1) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Distribusi Jawaban Responden pada Variabel Pembinaan Usaha Kecil (X_1)

No.	Item	Opsi	Jumlah	
			f	%
1	Pinjaman modal tersebut bermanfaat untuk mendukung usaha Bapak/Ibu.	a. Sangat Setuju	33	35.11
		b. Setuju	58	61.70
		c. Tidak tahu	0	0.00
		d. Tidak Setuju	3	3.19
		e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
2	Apakah Bapak/Ibu selalu tepat waktu dalam membayar cicilan pinjaman modal kerja?	a. Selalu tepat waktu	38	40.43
		b. Pernah terlambat 1-5 hari	42	44.68
		c. Pernah terlambat 6-10 hari	7	7.45

No.	Item	Ops	Jumlah	
			f	%
		d. Pernah terlambat 11-15 hari	5	5.32
		e. Pernah terlambat ≥ 16 hari	2	2.13
3	KMDH atau Perum Perhutani telah memberikan fasilitas untuk memudahkan pemasaran hasil produksi Bapak/Ibu.	a. Sangat Setuju	21	22.34
		b. Setuju	40	42.55
		c. Tidak tahu	29	30.85
		d. Tidak Setuju	4	4.26
		e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
4	Apakah KMDH atau LMDH sering mengadakan atau mengikuti pameran untuk memperkenalkan hasil produksi Bapak/Ibu?	a. Sangat Sering (≥ 7 Kali)	1	1.06
		b. Sering (5-6 Kali)	1	1.06
		c. Cukup (3-4 Kali)	13	13.83
		d. Kurang (1-2 Kali)	20	21.28
		e. Tidak pernah	59	62.77
5	Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pelatihan Manajerial yang diselenggarakan oleh LMDH atau Perum Perhutani?	a. > 3 kali	7	7.45
		b. 3 kali	3	3.19
		c. 2 kali	3	3.19
		d. 1 kali	12	12.77
		e. Tidak pernah	69	73.40
6	Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pelatihan Teknik Produksi yang diselenggarakan oleh LMDH atau Perum Perhutani?	a. > 3 kali	6	6.38
		b. 3 kali	2	2.13
		c. 2 kali	6	6.38
		d. 1 kali	10	10.64
		e. Tidak pernah	70	74.47

Sumber: Data primer diolah, 2015

Tabel 4.7 diatas menggambarkan frekuensi dan persentase jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan mengenai Pembinaan Usaha Kecil. Pertanyaan pertama dan kedua berkaitan dengan pinjaman modal yang diberikan oleh LMDH kepada anggota LMDH. Pertanyaan pertama mengenai manfaat dari pinjaman modal terhadap kegiatan usaha yang dijalani oleh responden. Pinjaman modal digunakan untuk mendukung usaha masyarakat yang didapat dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usaha masyarakat diantaranya yaitu dibidang pertanian, pekebunan, peternakan, perdagangan dan lain-lain. 33

responden menyatakan sangat setuju, bahwa mereka dapat merasakan manfaat dari pinjaman modal tersebut sedangkan 58 responden yang lain menyatakan setuju atas manfaat dari pinjaman modal. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh 3 orang responden yang memilih jawaban tidak setuju, yang berarti mereka tidak merasakan manfaat dari pinjaman modal dari LMDH melalui KMDH. Persentase jawaban dari 94 responden yaitu 35,11% menjawab sangat setuju, 61,7% menjawab setuju, 0% menjawab tidak tahu, 3,19% menjawab tidak setuju dan 0% menjawab sangat tidak setuju.

Pertanyaan kedua bertanya mengenai ketepatan waktu anggota LMDH dalam membayar cicilan pinjaman modal. Ketepatan waktu dalam membayar cicilan pinjaman modal menggambarkan bahwa anggota dapat mengelola pinjaman modal dan pinjaman modal tersebut mampu meningkatkan kemampuan ekonomi anggota. Penetapan opsi jawaban dalam pembayaran cicilan ditetapkan dari laporan rekapitulasi pembayaran pada tahun sebelumnya yang mayoritas keterlambatan hanya sampai pada 15 hari. 38 responden menjawab bahwa mereka selalu tepat waktu dalam membayar cicilan pinjaman modal, 42 responden yang lain menjawab pernah terlambat 1-5 hari untuk membayar cicilan. 7 responden pernah terlambat 6-10 hari dalam membayar cicilan, 5 responden pernah terlambat 11-15 hari dalam membayar cicilan modal dan 2 responden yang lain pernah terlambat membayar cicilan lebih dari 16 hari. Persentase jawaban responden pada pertanyaan kedua yaitu 40,43% menjawab selalu tepat waktu; 44,68% pernah terlambat 1-5 hari; 7,45% pernah terlambat 6-10 hari; 5,32% pernah terlambat 11-15 hari dan 2,13% pernah terlambat lebih dari 16 hari.

Pertanyaan ketiga dan keempat menyatakan mengenai fasilitas yang diberikan kepada anggota seperti yang terdapat dalam SK No. 3324/KPTS/II/2007. Fasilitas yang diberikan yaitu berupa koperasi usaha, kendaraan bermotor, gedung dan inventaris guna menunjang kegiatan lembaga dan memudahkan pemasaran hasil produksi masyarakat. 21 responden menjawab sangat setuju bahwa KMDH atau Perum Perhutani telah memberikan fasilitas untuk memudahkan pemasaran hasil produksi anggota. 40 responden setuju bahwa Perum Perhutani memberikan fasilitas untuk memudahkan pemasaran hasil produksi, 29 responden tidak tahu mengenai fasilitas yang disediakan untuk pemasaran hasil produksi dan 4 responden yang lain tidak setuju bahwa KMDH atau Perum Perhutani telah memberikan fasilitas untuk memudahkan pemasaran hasil produksi. Persentase dari jawaban responden pada pertanyaan ketiga yaitu 22,34% menjawab sangat setuju; 42,55% menjawab setuju; 30,85% menjawab tidak tahu; 4,26% menjawab tidak setuju dan 0% menjawab sangat tidak setuju.

Pertanyaan keempat ditentukan berdasarkan jangka waktu satu tahun. Pertanyaan keempat bertanya mengenai pameran untuk memperkenalkan hasil produksi anggota. Pameran merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan hasil produksi masyarakat. 1 responden menjawab sangat sering, 1 responden menjawab sering, 13 responden menjawab cukup, 20 responden menjawab kurang dan 59 responden menjawab tidak pernah. Persentase dari jawaban responden pada pertanyaan keempat yaitu 1,06% menjawab sangat sering, 1,06% menjawab sering, 13,83% menjawab cukup, 21,28% menjawab kurang dan 52,77% menjawab tidak pernah.

Pertanyaan kelima dan keenam menyatakan mengenai pelatihan yang diberikan kepada anggota seperti yang terdapat dalam SK No. 3324/KPTS/II/2007. Pertanyaan kelima bertanya mengenai pelatihan Manajerial yang diselenggarakan oleh LMDH atau Perum Perhutani. Sebagaimana pertanyaan nomor empat, opsi jawaban pada nomor lima juga didasarkan pada jangka waktu satu tahun. 7 responden menjawab pernah mengikuti pelatihan manajerial lebih dari 3 kali. 3 responden menjawab pernah mengikuti pelatihan manajerial 3 kali, 3 responden menjawab pernah mengikuti pelatihan manajerial 2 kali, 12 responden menjawab pernah mengikuti pelatihan manajerial 2 kali dan 69 responden menjawab tidak pernah mengikuti pelatihan manajerial. Persentase dari jawaban responden pada pertanyaan kelima yaitu 7,45% menjawab >3 kali; 3,19% menjawab 3 kali; 3,19% menjawab 2 kali; 12,77% menjawab 1 kali dan 73,4% menjawab tidak pernah.

Pertanyaan keenam bertanya mengenai pelatihan teknik produksi yang diselenggarakan oleh LMDH atau Perum Perhutani. Seperti pertanyaan nomor empat dan lima, opsi jawaban pada nomor enam juga didasarkan pada jangka waktu satu tahun. 6 responden menjawab pernah mengikuti pelatihan manajerial lebih dari 3 kali. 2 responden menjawab pernah mengikuti pelatihan manajerial 3 kali, 6 responden menjawab pernah mengikuti pelatihan manajerial 2 kali, 10 responden menjawab pernah mengikuti pelatihan manajerial 2 kali dan 70 responden menjawab tidak pernah mengikuti pelatihan manajerial. Persentase dari jawaban responden pada pertanyaan keenam yaitu 6,38% menjawab >3 kali;

2,13% menjawab 3 kali; 6,38% menjawab 2 kali; 10,64% menjawab 1 kali dan 74,47% menjawab tidak pernah.

b. Variabel Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) (X_2)

Responden telah memberikan tanggapan terhadap 8 pertanyaan mengenai variabel Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) (X_2) dalam kuesioner yang disebar oleh penulis. Gambaran distribusi frekuensi jawaban terhadap variabel pembinaan usaha kecil (X_2) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8
Distribusi Jawaban Responden pada Variabel PHBM (X_2)

No.	Item	Opsi	Jumlah	
			f	%
1	Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) mampu mendukung mata pencaharian Bapak/Ibu.	a. Sangat Setuju	38	40.43
		b. Setuju	56	59.57
		c. Tidak tahu	0	0.00
		d. Tidak Setuju	0	0.00
		e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
2	Perum Perhutani melibatkan MDH dalam menetapkan nilai dan proporsi berbagi hasil PHBM.	a. Sangat Setuju	21	22.34
		b. Setuju	66	70.21
		c. Tidak tahu	7	7.45
		d. Tidak Setuju	0	0.00
		e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
3	Apakah Perum Perhutani atau LMDH pernah mengadakan pelatihan kelembagaan bagi MDH?	a. Pernah	36	38.30
		b. Tidak Pernah	58	61.70
4	Apakah Perum Perhutani atau LMDH mengadakan pertemuan atau pendampingan dengan intensif?	a. > 3 kali	23	24.47
		b. 3 kali	11	11.70
		c. 2 kali	24	25.53
		d. 1 kali	9	9.57
		e. Tidak pernah	27	28.72

No.	Item	Opsi	Jumlah	
			f	%
5	Perum Perhutani atau LMDH selalu mengadakan pengawasan hutan untuk memperbaiki kualitas fungsi hutan	a. Sangat Setuju	40	42.55
		b. Setuju	47	50.00
		c. Tidak tahu	6	6.38
		d. Tidak Setuju	0	0.00
		e. Sangat Tidak Setuju	1	1.06
6	Kualitas hutan terjaga dengan baik sehingga mampu mendukung pembangunan berkelanjutan	a. Sangat Setuju	41	43.62
		b. Setuju	45	47.87
		c. Tidak tahu	6	6.38
		d. Tidak Setuju	0	0.00
		e. Sangat Tidak Setuju	2	2.13
7	Bapak/Ibu selalu ikut berpartisipasi dalam memantau pengamanan sumberdaya hutan	a. Selalu berpartisipasi dalam memantau pengamanan sumberdaya hutan	20	21.28
		b. Berpartisipasi dalam memantau pengamanan sumberdaya hutan	40	42.55
		c. Cukup berpartisipasi dalam memantau pengamanan sumberdaya hutan	27	28.72
		d. Kurang berpartisipasi dalam memantau pengamanan sumberdaya hutan	6	6.38
		e. Tidak pernah berpartisipasi dalam memantau pengamanan sumberdaya hutan	1	1.06
8	Bapak/Ibu ikut berpartisipasi dalam memantau proses pemanenan hasil hutan	a. Selalu berpartisipasi dalam memantau proses pemanenan hasil hutan	14	14.89
		b. Berpartisipasi dalam proses pemanenan hasil hutan	19	20.21
		c. Cukup berpartisipasi dalam memantau proses pemanenan hasil hutan	38	40.43

No.	Item	Opsi	Jumlah	
			f	%
		d. Kurang berpartisipasi dalam proses pemanenan hasil hutan	15	15.96
		e. Tidak pernah berpartisipasi dalam proses pemanenan hasil hutan	8	8.51

Sumber: Data primer diolah. 2015.

Tabel 4.8 diatas menggambarkan frekuensi dan persentase jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan mengenai Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pertanyaan pertama dan kedua berkaitan dengan peningkatan usaha produktif MDH melalui PHBM yang dilaksanakan di LMDH Lancar Jaya. Pertanyaan pertama mengenai kemampuan PHBM dalam mendukung mata pencaharian MDH. PHBM dapat mendukung matapencaharian MDH melalui kegiatan penanaman dengan metode tumpangsari pada lahan-lahan milik Perum Perhutani yang dilakukan oleh MDH. 38 responden menyatakan sangat setuju, bahwa mereka dapat merasakan manfaat dari PHBM dalam mendukung mata pencaharian sedangkan 56 responden yang lain menyatakan setuju atas manfaat dari PHBM. Persentase jawaban dari 94 responden yaitu 40,43% menjawab sangat setuju, 59,57% menjawab setuju, 0% menjawab tidak tahu, 0% menjawab tidak setuju dan 0% menjawab sangat tidak setuju.

Pertanyaan kedua bertanya mengenai keterlibatan MDH dalam menetapkan nilai dan proporsi berbagi hasil PHBM. Nilai dan proporsi yang dimaksud adalah nilai dan proporsi dalam bagi hasil kegiatan usaha dalam kemitraan yang dilakukan oleh MDH dan Perum Perhutani. MDH perlu untuk

dilibatkan dalam menetapkan nilai dan proporsi berbagi hasil PHBM untuk menciptakan keadilan antar berbagai pihak yang bersangkutan. 21 responden menjawab sangat setuju, 66 responden menjawab setuju dan 7 responden yang lain menjawab tidak tahu. Persentase jawaban responden pada pertanyaan kedua yaitu 22,34% menjawab sangat setuju; 70,21% setuju; 7,45% tidak tahu; 0% tidak setuju dan 0% sangat tidak setuju.

Pertanyaan ketiga dan keempat menyatakan mengenai penguatan kelembagaan LMDH yang termasuk dalam upaya PHBM sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman PHBM. Pertanyaan ketiga bertanya mengenai pelatihan kelembagaan bagi MDH oleh Perum Perhutani secara langsung maupun melalui LMDH. 36 responden menjawab pernah mengikuti pelatihan kelembagaan sedangkan 58 responden yang lain tidak pernah mengikuti pelatihan kelembagaan. Persentase dari jawaban responden pada pertanyaan ketiga yaitu 38,3% menjawab pernah; 61,7% menjawab tidak pernah.

Pertanyaan keempat bertanya mengenai pertemuan atau pendampingan oleh Perum Perhutani. Pertemuan atau pendampingan merupakan suatu upaya untuk memperkuat kelembagaan LMDH bersama seluruh anggotanya. Opsi jawaban pada pertanyaan nomor empat didasarkan pada jangka waktu satu tahun. 23 responden menjawab lebih dari 3 kali, 11 responden menjawab 3 kali, 24 responden menjawab 2 kali, 9 responden menjawab 1 kali dan 27 responden menjawab tidak pernah. Persentase dari jawaban responden pada pertanyaan

keempat yaitu 24,47% lebih dari 3 kali; 11,7% menjawab 3 kali; 25,53% menjawab 2 kali; 9,57% menjawab 1 kali dan 28,72% menjawab tidak pernah.

Pertanyaan kelima dan keenam menyatakan pengawasan dan perbaikan fungsi hutan sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman PHBM. Pertanyaan kelima bertanya mengenai pengawasan hutan untuk memperbaiki kualitas fungsi hutan oleh LMDH atau Perum Perhutani. 40 responden menjawab sangat setuju bahwa Perum Perhutani atau LMDH selalu mengadakan pengawasan hutan untuk memperbaiki kualitas fungsi hutan. 47 responden setuju bahwa bahwa Perum Perhutani atau LMDH selalu mengadakan pengawasan hutan untuk memperbaiki kualitas fungsi hutan, 6 responden menjawab tidak tahu dan 1 responden yang lain menjawab sangat tidak setuju. Persentase dari jawaban responden pada pertanyaan kelima yaitu 42,55% menjawab sangat setuju; 50% menjawab setuju; 6,38% menjawab tidak tahu; 0% menjawab tidak setuju dan 1,06% menjawab sangat tidak setuju.

Pertanyaan keenam bertanya mengenai kualitas hutan yang terjaga dengan baik. 41 responden menjawab sangat setuju bahwa kualitas hutan terjaga dengan baik sehingga mampu mendukung pembangunan berkelanjutan. 45 responden setuju bahwa kualitas hutan terjaga dengan baik sehingga mampu mendukung pembangunan berkelanjutan, 6 responden menjawab tidak tahu dan 2 responden yang lain menjawab sangat tidak setuju. Persentase dari jawaban responden pada pertanyaan keenam yaitu 43,62% menjawab sangat setuju; 47,87% menjawab

setuju; 6,38% menjawab tidak tahu; 0% menjawab tidak setuju dan 2,13% menjawab sangat tidak setuju.

Pertanyaan ketujuh dan kedelapan menyatakan partisipasi aktif masyarakat dalam pengamanan dan pemanenan hasil hutan. Partisipasi masyarakat dilakukan misalnya dalam kegiatan patroli, pelaporan jika ada kayu yang tumbang, pelaporan jika ada praktek pencurian dan secara sukarela menjaga keamanan lingkungan hutan. Pertanyaan ketujuh bertanya mengenai partisipasi MDH dalam memantau pengamanan sumberdaya hutan. 20 responden menjawab selalu berpartisipasi. 40 responden menjawab sering berpartisipasi, 27 responden menjawab cukup berpartisipasi, 6 responden menjawab kurang berpartisipasi dan 6 responden menjawab tidak pernah berpartisipasi. Persentase dari jawaban responden pada pertanyaan ketujuh yaitu 21,28% menjawab selalu berpartisipasi; 42,55% menjawab sering berpartisipasi; 28,72% menjawab cukup berpartisipasi; 6,38% menjawab kurang berpartisipasi dan 1,06% menjawab tidak pernah.

Pertanyaan kedelapan bertanya mengenai partisipasi MDH dalam memantau proses pemanenan hasil hutan. 14 responden menjawab selalu berpartisipasi dalam memantau proses pemanenan hasil hutan. 19 responden menjawab sering berpartisipasi dalam memantau proses pemanenan hasil hutan 38 responden menjawab cukup berpartisipasi, 15 responden menjawab kurang berpartisipasi dan 8 responden menjawab tidak pernah berpartisipasi. Persentase dari jawaban responden pada pertanyaan kedelapan yaitu 14,89% menjawab selalu berpartisipasi; 20,21% sering berpartisipasi; 40,43% menjawab cukup

berpartisipasi; 15,96% menjawab kurang berpartisipasi dan 8,51% menjawab tidak pernah.

c. Variabel Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan (Y)

Responden telah memberikan tanggapan terhadap 8 pertanyaan mengenai variabel Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan (Y) dalam kuesioner yang disebarakan oleh penulis. Gambaran distribusi frekuensi jawaban terhadap variabel pembinaan usaha kecil (Y) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9
Distribusi Jawaban Responden pada Variabel Kesejahteraan MDH (Y)

No.	Item	Opsi	Jumlah	
			f	%
1	Penghasilan Bapak/Ibu mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga Bapak/Ibu.	a. Sangat Setuju	23	24.47
		b. Setuju	52	55.32
		c. Tidak Tahu	19	20.21
		d. Tidak Setuju	0	0.00
		e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
2	Bapak/Ibu memiliki tabungan dalam bentuk apapun	a. Sangat Setuju	16	17.02
		b. Setuju	49	52.13
		c. Tidak Tahu	29	30.85
		d. Tidak Setuju	0	0.00
		e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
3	Dalam setahun, keluarga Bapak/Ibu menderita sakit kurang dari 10 kali.	a. Sangat Setuju	26	27.66
		b. Setuju	57	60.64
		c. Tidak tahu	11	11.70
		d. Tidak Setuju	0	0.00
		e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
4	Didaerah tempat tinggal Bapak/Ibu terdapat fasilitas kesehatan yang cukup.	a. Sangat Setuju	23	24.47
		b. Setuju	66	70.21
		c. Tidak tahu	3	3.19
		d. Tidak Setuju	2	2.13
		e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
5	Didaerah tempat tinggal Bapak/Ibu terdapat fasilitas pendidikan yang cukup.	a. Sangat Setuju	24	25.53
		b. Setuju	65	69.15
		c. Tidak tahu	2	2.13
		d. Tidak Setuju	3	3.19
		e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00

No.	Item	Opsi	Jumlah	
			f	%
6	Berapa lama pendidikan formal tertinggi yang pernah ditempuh oleh anak Bapak/Ibu?	a. > SMA	5	5.62
		b. SMA	22	24.72
		c. SMP	48	53.93
		d. SD	14	15.73
		e. < SD	0	0.00
7	Kelestarian lingkungan di daerah Bapak/Ibu mampu mendukung pembangunan berkelanjutan	a. Sangat Setuju	31	32.98
		b. Setuju	60	63.83
		c. Tidak tahu	3	3.19
		d. Tidak Setuju	0	0.00
		e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
8	KMDH, LMDH dan Perum Perhutani mampu mengembangkan kesempatan kerja bagi MDH	a. Sangat Setuju	26	27.66
		b. Setuju	68	72.34
		c. Tidak tahu	0	0.00
		d. Tidak Setuju	0	0.00
		e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
9	Bapak/Ibu merasakan manfaat dari Pembinaan Usaha Kecil	a. Sangat Setuju	25	26.60
		b. Setuju	49	52.13
		c. Tidak tahu	20	21.28
		d. Tidak Setuju	0	0.00
		e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00
10	Bapak/Ibu merasakan manfaat dari Program PHBM	a. Sangat Setuju	53	56.38
		b. Setuju	32	34.04
		c. Tidak tahu	9	9.57
		d. Tidak Setuju	0	0.00
		e. Sangat Tidak Setuju	0	0.00

Sumber: Data primer diolah, 2015

Tabel 4.9 diatas menggambarkan frekuensi dan persentase jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan mengenai Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan (MDH). Pertanyaan pertama dan kedua berkaitan dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh MDH. Pernyataan pertama menyatakan mengenai penghasilan MDH yang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga MDH. Penghasilan yang didapat oleh MDH merupakan bentuk pengembangan modal yang didapatnya dari pinjaman modal atau penanaman tumpangsari. 23 responden menyatakan sangat setuju, bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan

hidup keluarga dengan penghasilannya sedangkan 52 responden yang lain menyatakan setuju bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan penghasilannya. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh 19 responden yang memilih jawaban tidak tahu. Persentase jawaban dari 94 responden yaitu 24,47% menjawab sangat setuju; 55,32% menjawab setuju; 20,21% menjawab tidak tahu; 0% menjawab tidak setuju dan 0% menjawab sangat tidak setuju.

Pernyataan kedua menyatakan mengenai kepemilikan tabungan dalam bentuk apapun oleh MDH. Kemampuan ekonomi bukan hanya sekedar kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi bagaimana masyarakat bisa menyisihkan pendapatannya untuk ditabung dan untuk kebutuhan yang tidak terduga. 16 responden menyatakan sangat setuju, bahwa mereka memiliki tabungan dalam bentuk apapun sedangkan 49 responden yang lain menyatakan setuju bahwa mereka memiliki tabungan dalam bentuk apapun. Hal yang berbeda ditunjukkan oleh 29 responden yang memilih jawaban tidak tahu. Persentase jawaban responden pada pertanyaan kedua yaitu 17,02% menjawab sangat setuju; 52,13% menjawab setuju; 30,85% menjawab tidak tahu; 0% menjawab tidak setuju dan 0% menjawab sangat tidak setuju.

Pertanyaan ketiga dan keempat menyatakan mengenai kualitas kesehatan yang dimiliki oleh keluarga MDH. Pernyataan ketiga menyatakan mengenai keluarga MDH menderita sakit kurang dari 10 kali. 26 responden menjawab sangat setuju bahwa keluarga MDH menderita sakit kurang dari 10 kali. 57 responden setuju bahwa keluarga MDH menderita sakit kurang dari 10 kali, dan 11 responden tidak tahu. Persentase dari jawaban responden pada pertanyaan

ketiga yaitu 27,66% menjawab sangat setuju; 60,64% menjawab setuju; 11,7% menjawab tidak tahu; 0% menjawab tidak setuju dan 0% menjawab sangat tidak setuju.

Pernyataan keempat menyatakan mengenai fasilitas kesehatan yang cukup di daerah tempat tinggal MDH. Fasilitas kesehatan turut menentukan kualitas kesehatan bagi MDH. 23 responden menjawab sangat setuju bahwa fasilitas kesehatan cukup di daerah tempat tinggal MDH. 66 responden setuju bahwa fasilitas kesehatan cukup di daerah tempat tinggal MDH, 3 responden tidak tahu dan 2 responden menyatakan tidak setuju. Persentase dari jawaban responden pada pertanyaan keempat yaitu 24,47% menjawab sangat setuju; 70,21% menjawab setuju; 3,19% menjawab tidak tahu; 2,13% menjawab tidak setuju dan 0% menjawab sangat tidak setuju.

Pertanyaan kelima dan keenam menyatakan mengenai tingkat pendidikan yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan. Pernyataan kelima menyatakan mengenai fasilitas pendidikan yang cukup yang berada di daerah tempat tinggal MDH. 24 responden menjawab sangat setuju bahwa fasilitas pendidikan cukup di daerah tempat tinggal MDH. 65 responden setuju bahwa fasilitas pendidikan cukup di daerah tempat tinggal MDH, 2 responden tidak tahu dan 3 responden menyatakan tidak setuju. Persentase dari jawaban responden pada pertanyaan kelima yaitu 25,53% menjawab sangat setuju; 69,15% menjawab setuju; 2,13% menjawab tidak tahu; 3,19% menjawab tidak setuju dan 0% menjawab sangat tidak setuju.

Pernyataan keenam menyatakan mengenai pendidikan formal tertinggi yang pernah ditempuh oleh anak anggota LMDH. 5 responden menjawab pendidikan formal tertinggi yang pernah ditempuh oleh anak anggota LMDH adalah lebih dari SMA. 22 responden menjawab pendidikan formal tertinggi yang pernah ditempuh oleh anak anggota LMDH adalah SMA, 48 responden menjawab pendidikan formal tertinggi yang pernah ditempuh oleh anak anggota LMDH adalah SMP, dan 14 responden menjawab pendidikan formal tertinggi yang pernah ditempuh oleh anak anggota LMDH adalah SD. Persentase dari jawaban responden pada pertanyaan keenam yaitu 5,62% menjawab >SMA; 24,72% menjawab SMA; 53,93% menjawab SMP; 15,73% menjawab SD dan 0% menjawab <SD.

Pertanyaan ketujuh dan kedelapan menyatakan mengenai kelestarian lingkungan terutama hutan diwilayah LMDH Lancar Jaya. Pernyataan ketujuh menyatakan kelestarian lingkungan disekitar MDH mampu mendukung pembangunan berkelanjutan. 31 responden menjawab sangat setuju bahwa kelestarian lingkungan disekitar MDH mampu mendukung pembangunan berkelanjutan. 60 responden menjawab setuju bahwa kelestarian lingkungan disekitar MDH mampu mendukung pembangunan berkelanjutan, dan 3 responden menjawab tidak tahu. Persentase dari jawaban responden pada pertanyaan ketujuh yaitu 32,98% menjawab sangat setuju; 63,83% menjawab setuju; 3,19% menjawab tidak tahu; 0% menjawab tidak setuju dan 0% menjawab sangat tidak setuju.

Pernyataan kedelapan menyatakan mengenai KMDH, LMDH dan Perum Perhutani mampu mengembangkan kesempatan kerja bagi MDH. 26 responden menjawab sangat setuju bahwa KMDH, LMDH dan Perum Perhutani mampu mengembangkan kesempatan kerja bagi MDH. 68 responden menjawab setuju bahwa KMDH, LMDH dan Perum Perhutani mampu mengembangkan kesempatan kerja bagi MDH. Persentase dari jawaban responden pada pertanyaan kedelapan yaitu 27,66% menjawab sangat setuju; 72,34% menjawab setuju; 0% menjawab tidak tahu; 0% menjawab tidak setuju dan 0% menjawab sangat tidak setuju.

Pertanyaan kesembilan dan kesepuluh menyatakan mengenai manfaat pembinaan usaha kecil dan PHBM bagi MDH. Pernyataan kesembilan menyatakan mengenai manfaat dari Pembinaan Usaha Kecil. 25 responden menjawab sangat setuju bahwa mereka merasakan manfaat dari Pembinaan Usaha Kecil. 49 responden menjawab setuju bahwa mereka merasakan manfaat dari Pembinaan Usaha Kecil, dan 20 responden menjawab tidak tahu. Persentase dari jawaban responden pada pertanyaan kesembilan yaitu 26,6% menjawab sangat setuju; 52,13% menjawab setuju; 21,28% menjawab tidak tahu; 0% menjawab tidak setuju dan 0% menjawab sangat tidak setuju.

Pernyataan kesepuluh menyatakan mengenai manfaat dari Program PHBM. 53 responden menjawab sangat setuju bahwa mereka merasakan manfaat dari Program PHBM. 32 responden menjawab setuju bahwa mereka merasakan manfaat dari Program PHBM, 9 responden menjawab tidak tahu. Persentase dari jawaban responden pada pertanyaan keenam yaitu 56,38% menjawab sangat

setuju; 34,04% menjawab setuju; 9,57% menjawab tidak tahu; 0% menjawab tidak setuju dan 0% menjawab sangat tidak setuju.

C. Uji Instrumen Penelitian

Kuesioner merupakan alat yang dipergunakan penulis dalam mendapatkan data primer yang kemudian dianalisis. Dalam kuesioner tersebut terdapat pilihan jawaban yang memiliki nilai atau skor masing-masing. Sedangkan benar atau tidaknya skor responden tersebut tergantung pada pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data (kuesioner) yang baik harus memenuhi dua syarat penting yaitu harus valid dan reliabel. Oleh karena itu, maka diperlukan uji validitas dan uji reliabilitas pada instrumen penelitian (kuesioner).

1. Uji Validitas

Pengujian validitas instrumen sangat diperlukan dalam suatu penelitian, khususnya pada penelitian kuantitatif. Validitas suatu instrumen akan menggambarkan tingkat kemampuan alat ukur yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran.

Pengujian validitas dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing indikator dalam suatu variabel dengan total indikator dalam variabel tersebut dengan menggunakan korelasi (r) *product moment*. Kriteria pengujian untuk menerima atau menolak hipotesisadanya pernyataan yang valid atau tidak dapat dilakukan dengan:

$H_0 : r = 0$, tidak terdapat data yang valid pada tingkat kepercayaan (α) 5%

$H_a : r \neq 0$, terdapat data yang valid pada tingkat kepercayaan (α) 5%

Pada penelitian ini, pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan program *SPSS for Windows ver 21.0* dengan menggunakan analisis korelasi *product moment* menghasilkan nilai pada masing-masing item pertanyaan dengan skor total item pada satu variabel yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4.10
Uji Validitas

No.	Indikator	r hitung	r tabel	Sig.	Keterangan
X1 (Pembinaan Usaha Kecil)					
1.	X1.1	0,397	0,203	0,000	Valid
2.	X1.2	0,480	0,203	0,000	Valid
No.	Indikator	r hitung	r tabel	Sig.	Keterangan
3.	X1.3	0,504	0,203	0,000	Valid
4.	X1.4	0,668	0,203	0,000	Valid
5.	X1.5	0,769	0,203	0,000	Valid
6.	X1.6	0,606	0,203	0,000	Valid
X2 (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat)					
7.	X2.1	0,586	0,203	0,000	Valid
8.	X2.2	0,531	0,203	0,000	Valid
9.	X2.3	0,492	0,203	0,000	Valid
10.	X2.4	0,634	0,203	0,000	Valid
11.	X2.5	0,725	0,203	0,000	Valid
12.	X2.6	0,633	0,203	0,000	Valid
13.	X2.7	0,623	0,203	0,000	Valid
14.	X2.8	0,567	0,203	0,000	Valid
Y (Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan)					
15.	Y1.1	0,816	0,203	0,000	Valid
16.	Y1.2	0,747	0,203	0,000	Valid
17.	Y1.3	0,794	0,203	0,000	Valid
18.	Y1.4	0,494	0,203	0,000	Valid
19.	Y1.5	0,482	0,203	0,000	Valid
20.	Y1.6	0,399	0,203	0,000	Valid
21.	Y1.7	0,620	0,203	0,000	Valid
22.	Y1.8	0,568	0,203	0,000	Valid
23.	Y1.9	0,798	0,203	0,000	Valid
24.	Y1.10	0,617	0,203	0,000	Valid

Sumber: data primer diolah menggunakan SPSS 21.00, 2015

Melalui tabel 4.10 diatas dapat diketahui nilai r hitung pertanyaan lebih besar dari pada r tabel yang bernilai 0,203, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tiap-tiap indikator atau pertanyaan dalam penelitian ini adalah valid. Oleh karena tiap-tiap indikator tersebut adalah valid, maka seluruh indikator layak dan dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas instrumen menggambarkan pada kemantapan alat ukur yang digunakan. Instrumen cenderung reliabel apabila alat ukur tersebut memiliki tingkat stabilitas (hasil pengukuran yang tidak berubah-ubah dan memberikan hasil yang serupa apabila digunakan berkali-kali) sehingga dapat diandalkan dan dapat dipercaya untuk dijadikan alat ukur. Instrumen yang reliabel akan menghasilkan data sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Teknis pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan nilai koefisien reliabilitas alpha. Kriteria penilaian dari hasil penghitungan koefisien reliabilitas alpha yaitu *Cronbach's alpha* yang baik adalah mendekati 1. Reliabilitas yang kurang dari 0,6 adalah kurang baik, 0,7 dapat diterima dan reliabilitas dengan *Cronbach's alpha* 0,8 atau diatasnya adalah baik. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program *SPSS for Windows 21.00*. Hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.861	24

Sumber: data primer diolah menggunakan SPSS 21.00, 2015

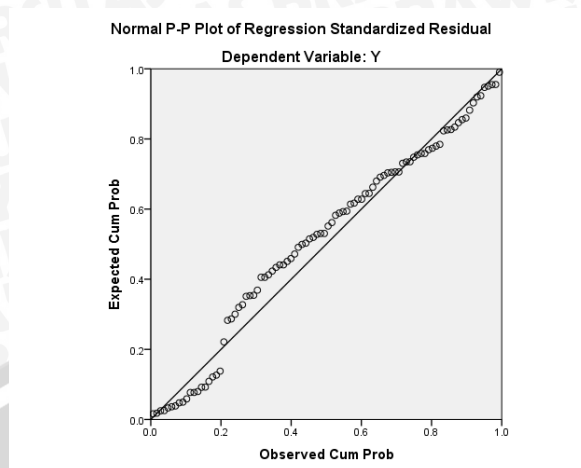
Melalui tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* untuk adalah sebesar 0,861 dari 24 item yang dipakai sebagai instrumen penelitian. Dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, maka semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel dan dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data. Melalui pengujian validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan oleh penulis sudah valid dan reliabel.

D. Hasil Uji Asumsi Klasik

Terpenuhinya asumsi klasik merupakan salah satu syarat untuk dapat menggunakan analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini dilakukan tiga uji asumsi klasik yaitu uji asumsi normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Berikut merupakan penjelasan dari pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan

1. Hasil uji normalitas

Hasil Uji Normalitas dapat diketahui melalui diagram P-P Plot dengan penghitungan menggunakan aplikasi *SPSS for Windows* dan didapat diagram yang tertera dibawah ini:



Gambar 4.10 Diagram P-P Plot Hasil Uji Normalitas
Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan pada gambar diagram 4.10 dapat diketahui bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya dan menunjukkan pola distribusi normal seperti yang telah dijelaskan pada metode penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

2. Hasil uji multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas yang ditentukan dengan *tolerance* dan Nilai VIF pada hasil regresi tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
X1	0,776	1,289	Tidak Terjadi Multikolinearitas
X2	0,776	1,289	Tidak Terjadi Multikolinearitas

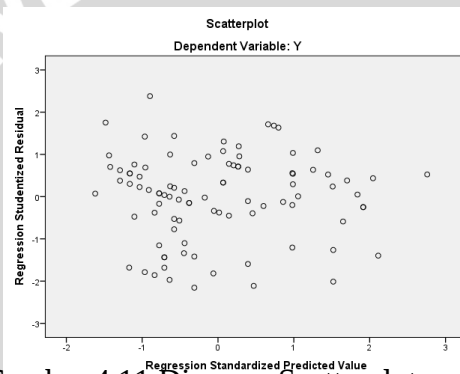
Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Dari hasil perhitungan yang ada di tabel dan ketentuan yang telah dibahas pada metode penelitian dapat diketahui bahwa hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak adanya variabel independen memiliki nilai *tolerance* $< 0,10$

yang berarti tidak adanya korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 50%. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF >10 . Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi penelitian ini.

3. Hasil uji heterokedastisitas

Hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada grafik scatterplot sebagai berikut:



Gambar 4.11 Diagram Scatterplot
Sumber: Data Primer Diolah. 2015

Melalui gambar diagram 4.11 dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar tidak beraturan dan tidak membentuk pola-pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi heterokedastisitas seperti yang ditentukan dalam metode penelitian sehingga dapat dilakukan pengujian regresi linier berganda.

E. Hasil Pengolahan Data

1. Analisis Korelasi

a. Analisis Korelasi *Product Moment*

Penulis menggunakan analisis korelasi *product moment* Pearson untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Nilai korelasi akan diinterpretasikan sesuai dengan pedoman interpretasi dari koefisien korelasi seperti yang telah tercantum pada tabel 4.13 berikut ini:

Tabel 4.13
Pedoman memberikan interpretasi dari Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-1,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Cukup Kuat
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2008:184)

1) Uji Korelasi antara Pembinaan Usaha Kecil (X1) dengan Kesejahteraan MDH (Y)

Penulis menggunakan analisis korelasi *Product Moment* Pearson untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel Pembinaan Usaha Kecil (X1) dengan Kesejahteraan MDH (Y) dan juga untuk mengetahui seberapa erat hubungan antara kedua variabel tersebut. Penulis menggunakan *software SPSS 21.00* untuk mencari nilai korelasi tersebut. Hasil dari analisis dituang dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.14
Hasil Uji Korelasi X1 terhadap Y

Correlations			
		X1	Y1
X1	Pearson Correlation	1	.445**
	Sig. (1-tailed)		.000
	N	94	94
Y1	Pearson Correlation	.445**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	
	N	94	94

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Sumber: data primer diolah menggunakan SPSS 21.00, 2015

Hasil perhitungan SPSS 21.0 pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa korelasi antara pembinaan usaha kecil dengan kesejahteraan MDH termasuk cukup kuat yaitu sebesar 0,445. Ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah diantara kedua variabel tersebut, yang berarti jika pembinaan usaha kecil meningkat, maka kesejahteraan MDH turut meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika Pembinaan Usaha Kecil menurun maka Kesejahteraan MDH juga akan menurun. Pada tabel output didapatkan bahwa nilai Sig (1-tailed) = 0,000. Karena nilai Sig (1-tailed) < 0,05 maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pembinaan usaha kecil dan kesejahteraan MDH.

2) Uji Korelasi antara PHBM (Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat) (X) dengan Kesejahteraan MDH (Y)

Penulis menggunakan analisis korelasi *Product Moment Pearson* untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel PHBM (X1) dengan Kesejahteraan MDH (Y) dan juga untuk mengetahui seberapa erat hubungan

antara kedua variabel tersebut. Penulis menggunakan *software SPSS 21.00* untuk mencari nilai korelasi tersebut. Hasil dari analisis dituang dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.15
Hasil Uji Korelasi X2 terhadap Y

Correlations		
	X2	Y1
X2	Pearson Correlation	1
	Sig. (1-tailed)	.410**
	N	.000
Y1	Pearson Correlation	.410**
	Sig. (1-tailed)	1
	N	.000
		94

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Sumber: data primer diolah menggunakan SPSS 21.00, 2015

Hasil perhitungan SPSS 21.0 pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa korelasi antara PHBM dengan kesejahteraan MDH termasuk cukup kuat yaitu sebesar 0,410. Ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang searah diantara kedua variabel tersebut, yang berarti jika PHBM meningkat, maka kesejahteraan MDH turut meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika PHBM menurun maka Kesejahteraan MDH juga akan menurun. Pada tabel output didapatkan bahwa nilai Sig (1-tailed) = 0,000. Karena nilai Sig (1-tailed) < 0,05 maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara PHBM dan kesejahteraan MDH.

b. Analisis Korelasi Parsial

Analisis korelasi parsial digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dimana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap (sebagai variabel kontrol).

1) Hubungan antara Pembinaan Usaha Kecil (X1) dengan Kesejahteraan MDH (Y) Lancar Jaya

Kekuatan hubungan antara variabel Pembinaan Usaha Kecil dengan Kesejahteraan MDH Lancar Jaya jika dilakukan pengontrolan terhadap variabel PHBM dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut ini:

Tabel 4.16
Hasil uji korelasi parsial X1 terhadap Y dengan X2 dikontrol

Correlations			
Control Variables		X1	Y
X1	Correlation	1.000	.313
	Significance (1-tailed)	.	.001
	Df	0	91
X2	Correlation	.313	1.000
	Significance (1-tailed)	.001	.
	Df	91	0

Sumber: data primer diolah menggunakan SPSS 21.00, 2015

Dari tabel 4.16 diperoleh korelasi parsial antara Pembinaan Usaha Kecil dengan Kesejahteraan MDH, bila variabel PHBM dikontrol/dikendalikan sebesar 0,313. Angka ini lebih kecil dari korelasi yang langsung dan tanpa adanya kontrol dari variabel PHBM ($0,313 < 0,445$). Hal ini juga menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang rendah antara pembinaan usaha kecil dan kesejahteraan MDH.

Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif yang berarti semakin tinggi Pembinaan Usaha Kecil maka semakin meningkatkan kesejahteraan MDH. Nilai signifikan $0,01 < 0,05$ yang berarti terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pembinaan usaha kecil dengan kesejahteraan MDH.

2) Hubungan antara PHBM (X2) dengan Kesejahteraan MDH (Y)

Lancar Jaya

Kekuatan hubungan antara variabel Pembinaan Usaha Kecil dengan Kesejahteraan MDH Lancar Jaya jika dilakukan pengontrolan terhadap variabel PHBM dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut ini:

Tabel 4.17
Hasil uji korelasi parsial X2 terhadap Y dengan X1 dikontrol

Correlations			
Control Variables		X2	Y
X1	Correlation	1.000	.253
	X2 Significance (1-tailed)	.	.007
	Df	0	91
	Correlation	.253	1.000
	Y Significance (1-tailed)	.007	.
	Df	91	0

Sumber: data primer diolah menggunakan SPSS 21.00, 2015

Dari tabel 4.17 diperoleh korelasi parsial antara PHBM dengan Kesejahteraan MDH bila variabel PHBM dikontrol/dikendalikan sebesar 0,253. Angka ini lebih kecil dari korelasi yang langsung dan tanpa adanya kontrol dari variabel PHBM ($0,253 < 0,410$). Hal ini juga menunjukkan bahwa terjadi

hubungan yang rendah antara pembinaan usaha kecil dan kesejahteraan MDH. Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r positif yang berarti semakin tinggi Pembinaan Usaha Kecil maka semakin meningkatkan kesejahteraan MDH. Nilai signifikan $0,007 < 0,05$ yang berarti terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pembinaan usaha kecil dengan kesejahteraan MDH.

c. Analisis Korelasi Ganda

Analisis korelasi ganda dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel X_1 dan X_2 dengan variabel Y secara bersama-sama, sifat hubungannya berkorelasi ganda.

Persamaan korelasi ganda adalah sebagai berikut:

$$r_{yx1x2} = \sqrt{\frac{r^2_{x_1y} + r^2_{x_2y} - 2r_{x_1y}r_{x_2y}r_{x_1x_2}}{1 - r^2_{x_1x_2}}}$$

Keterangan:

r_{yx1x2} : korelasi ganda antara X_1 dan X_2 dengan variabel Y

r_{yx1} : korelasi sederhana antara X_1 dengan Y

r_{yx2} : korelasi sederhana antara X_2 dengan Y

r_{x1x2} : korelasi sederhana antara X_1 dengan X_2

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa korelasi ganda antara pembinaan usaha kecil (X_1) dan pelatihan (X_2) dengan kesejahteraan MDH (Y) termasuk cukup kuat yaitu sebesar 0,500. Ini menunjukkan adanya hubungan searah yang

artinya jika pelaksanaan pembinaan usaha kecil dan PHBM meningkat, maka kesejahteraan MDH juga meningkat. Begitu pula sebaliknya, jika pelaksanaan pembinaan usaha kecil dan PHBM menurun, maka kesejahteraan MDH juga akan menurun.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk dapat mengetahui pengaruh variabel pembinaan usaha kecil (X1) dan PHBM (X2) terhadap Kesejahteraan MDH (Y). Dalam pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, dilakukan beberapa tahap untuk mencari pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan *software SPSS 21.00* didapatkan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 4. 18
Hasil ringkasan analisis regresi linier berganda

Variabel	B	t hitung	Signifikan	Keterangan
Konstanta	25.054			
X1	0.462	3.139	0.002	Signifikan
X2	0.302	2.491	0.015	Signifikan
A	= 0.05			
R	= 0.5			
R ²	= 0.25			
F hitung	= 15.127			
F tabel	= 3.09			
Signifikasi	= 0.000			
t tabel	= 1.660			

Sumber: data primer diolah menggunakan SPSS 21.00, 2015

Dari tabel 4.18 diatas, diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 25.054 + 0.462X_1 + 0.302X_2$$

Interpretasi model regresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. $\beta_0 = 25.054$

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel pembinaan usaha kecil X1 dan PHBM X2 terhadap kesejahteraan MDH Y, maka nilai Y berkisar sebesar 25.054.

2. $\beta_1 = 0.462$

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan skala tanggapan responden sebanyak 1 kali pada variabel pembinaan usaha kecil dan variabel yang lain yang dianggap tetap atau tidak ada perubahan sama sekali, maka akan terjadi peningkatan pada variabel kesejahteraan MDH sebesar 0,462. Dapat dilihat bahwa koefisien yang diperoleh bernilai positif, jadi apabila terjadi peningkatan pada variabel pembinaan usaha kecil, maka variabel kesejahteraan MDH akan meningkat.

3. $\beta_2 = 0.302$

Koefisien regresi ini menunjukkan bahwa apabila terdapat kenaikan skala tanggapan responden sebanyak 1 kali pada variabel PHBM dan variabel yang lain yang dianggap tetap atau tidak ada perubahan sama sekali, maka akan terjadi peningkatan pada variabel kesejahteraan MDH sebesar 0,302. Dapat dilihat bahwa koefisien yang diperoleh bernilai positif, jadi apabila terjadi peningkatan pada variabel pembinaan usaha kecil, maka variabel kesejahteraan MDH akan meningkat.

3. Uji F (Uji Simultan)

Pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua variabel yang digunakan dalam model regresi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Semua variabel tersebut diuji secara serentak dengan menggunakan uji F. Hipotesis yang digunakan dalam pengujian koefisien model regresi secara simultan adalah sebagai berikut:

$H_0: \beta_i = 0$ (Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel X_1 dan X_2 terhadap Y)

$H_a: \beta_i \neq 0$ (Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel X_1 dan X_2 terhadap Y).

Jika hasilnya positif dan signifikan maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sedangkan jika hasilnya tidak positif dan signifikan maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal yang sama ditunjukkan sebagai berikut:

H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$

Berikut merupakan tabel hasil penghitungan uji F (Simultan):

Tabel 4. 19

Hasil Uji F (Simultan)

Hipotesis	Nilai	Keputusan
$H_0: \beta_i = 0$ (Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel X_1 dan X_2 terhadap Y)	$F_{hitung} = 15.127$	H_0 ditolak
$H_a: \beta_i \neq 0$ (Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel X_1 dan X_2 terhadap Y)	$F_{tabel} = 3.09$	
$\alpha = 0.05$	$Sig. = 0.000$	

Sumber: data primer diolah menggunakan SPSS 21.00, 2015

Berdasarkan tabel 4.19 dapat disimpulkan bahwa diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 15,127 sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 3,09. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$

dan memiliki sig $F < 0,005$ yaitu sebesar 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa secara simultan variabel pembinaan usaha kecil X_1 dan Variabel PHBM X_2 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kesejahteraan MDH Y .

4. Uji t (Uji Parsial)

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara individu memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menguji hubungan tersebut, penulis menggunakan uji t yakni dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Variabel independen pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika t hitung $> t$ tabel atau signifikan $< \alpha = 0,05$.

$H_0: \beta_i = 0$ (Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel X_1 atau X_2 terhadap Y)

$H_a: \beta_i \neq 0$ (Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel X_1 atau X_2 terhadap Y)

Jika hasilnya positif dan signifikan maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sedangkan jika hasilnya tidak positif dan signifikan maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal yang sama ditunjukkan sebagai berikut:

H_0 ditolak jika t hitung $> t$ tabel

H_0 diterima jika t hitung $< t$ tabel

Pengujian model regresi secara parsial dilakukan sebagai berikut:

a. Pengujian variabel pembinaan usaha kecil X1 terhadap kesejahteraan MDH Y

Pengujian hipotesis koefisien regresi variabel X1 tergambar dalam tabel

4.20 dibawah ini:

Tabel 4.20
Hasil uji hipotesis koefisien regresi variabel X1

Hipotesis	Nilai	Keputusan
H0: $\beta_i=0$ (Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel X1 terhadap Y)	t hitung = 3.139	H0 ditolak
Ha: $\beta_i \neq 0$ (Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel X1 terhadap Y)	Sig. = 0.002	
$\alpha = 0.05$	t tabel = 1,660	

Sumber: data primer diolah menggunakan SPSS 21.00, 2015

Variabel X1 memiliki koefisien regresi sebesar 0,462 dan diperoleh statistik uji t sebesar 3,139 dengan signifikasi sebesar 0,002. Nilai statistik uji t hitung tersebut lebih besar dari pada t tabel ($3,139 > 1,660$) dan nilai signifikan lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$. Pengujian ini menunjukka bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembinaan usaha kecil X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Y.

b. Pengujian variabel PHBM X2 terhadap kesejahteraan MDH Y

Pengujian hipotesis koefisien regresi variabel X2 tergambar dalam tabel

4.21 dibawah ini:

Tabel 4. 21
Hasil uji hipotesis koefisien regresi variabel X2

Hipotesis	Nilai	Keputusan
H0: $\beta_i=0$ (Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel X2 terhadap Y) Ha: $\beta_i \neq 0$ (Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel X2 terhadap Y) $\alpha = 0.05$	t hitung = 2.491 Sig. = 0.015 t tabel = 1,660	H0 ditolak

Sumber: data primer diolah menggunakan SPSS 21.00, 2015

Variabel X2 memiliki koefisien regresi sebesar 0,302 dan diperoleh statistik uji t sebesar 2,491 dengan signifikansi sebesar 0,015. Nilai statistik uji t hitung tersebut lebih besar dari pada t tabel ($2,491 > 1,660$) dan nilai signifikan lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PHBM X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Y.

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) merupakan ukuran ketepatan atau kecocokan garis regresi yang diperoleh dari hasil pendugaan parameter berdasarkan contoh. Melalui R^2 juga dapat diketahui besar proporsi keragaman total disekitar nilai tengah yang dapat dijelaskan oleh garis regresi. R^2 dalam penelitian ini dapat diketahui dari tabel berikut ini.

Tabel 4.22
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.500 ^a	.250	.233	4.10121

Sumber: Data Primer Diolah. 2015

Besarnya kontribusi dari variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen diketahui berdasarkan koefisien determinasi *R square* sebesar 0,250. Hasil tersebut menjelaskan kontribusi dari variabel independen (X1 dan X2) yang disertakan dalam persamaan regresi terhadap Y adalah sebesar 25% sedangkan 75% lainnya disumbangkan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam persamaan ini.

F. Pembahasan

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner penelitian dapat diketahui bahwa kemitraan merupakan salah satu program CSR atau PKBL dari BUMN termasuk didalamnya Perum Perhutani. Didalam program kemitraan yang dilakukan oleh Perum Perhutani, terdapat kegiatan Pembinaan Usaha Kecil (X1) dan PHBM (X2). Hafsah (2000:47) mengatakan, dengan adanya kemitraan diharapkan mampu untuk mempercepat kemampuan golongan ekonomi lemah, memecahkan masalah pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan kemitraan, diharapkan dapat terjadi peningkatan produktivitas masyarakat dan berkembangnya usaha kecil yang dimiliki masyarakat. Dengan adanya kemitraan pula, diharapkan terjadi peningkatan sosial masyarakat dan dapat meningkatkan ketahanan ekonominya dalam arti lain, dengan adanya kemitraan terjadi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, dengan adanya kemitraan diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan bersama-sama menjaga kelestarian alam.

Salah satu tempat Perum Perhutani dalam melaksanakan kegiatan kemitraan adalah di LMDH Lancar Jaya Desa Ngancar Kabupaten Kediri. LMDH

ini dikenal karena lokasinya yang berdekatan dengan wisata Gunung Kelud. Dilokasi tersebut, Perum Perhutani melaksanakan dua kegiatan kemitraan, yaitu pembinaan usaha kecil dan PHBM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara pembinaan usaha kecil dan PHBM bagi kesejahteraan MDH.

1. Pengaruh Pembinaan Usaha Kecil (X1) terhadap Kesejahteraan MDH (Y)

Hasil perhitungan dari penelitian yang dilakukan penulis dalam program kemitraan dari Perum Perhutani kepada LMDH Lancar Jaya Desa Ngancar pada variabel Pembinaan Usaha Kecil (X1) menunjukkan bahwa X1 memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,462 dan diperoleh statistik uji t sebesar 3,139 dengan signifikansi sebesar 0,002. Nilai statistik uji t hitung tersebut lebih besar daripada t tabel ($3,139 > 1,660$) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0.05. pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembinaan usaha kecil X1 berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan MDH Y. Koefisien yang diperoleh bernilai positif yang artinya apabila terjadi peningkatan pada variabel pembinaan usaha kecil maka kesejahteraan MDH akan meningkat. Peningkatan pembinaan usaha kecil yang dilakukan oleh Perum Perhutani akan semakin meningkatkan kesejahteraan MDH. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Syarif (1993:7): “Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan baik berupa perangkat keras dan perangkat lunak. Bantuan perangkat lunak dapat dilihat dari penyelenggaraan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi

pengusaha kecil, konsultasi peningkatan atau pembinaan usaha, bantuan promosi dagang serta berbagai keringanan dan kemudahan yang diberikan kepada pengusaha kecil dalam rangka mendorong pengembangan usahanya. Sedangkan perangkat keras terdiri dari penyediaan tempat khusus bagi industri kecil, bantuan permodalan, penyediaan fasilitas bersama dan bantuan yang langsung diberikan pada pengusaha kecil”. PKBL dari Perum Perhutani melalui Pembinaan usaha kecil yang menunjukkan manfaat dari pembinaan itu sendiri, yaitu peningkatan kesejahteraan MDH seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Nomor 3324/KPTS/II/2007 pasal 2 disebutkan maksud dan tujuan dari PKBL Perum Perhutani adalah untuk memberdayakan dan meningkatkan usaha kecil masyarakat, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan usaha kecil milik pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) Perhutanan agar lebih tangguh dan mandiri serta perbaikan kondisi sosial dan lingkungan.

2. Pengaruh PHBM (X2) terhadap Kesejahteraan MDH (Y)

Hasil perhitungan dari penelitian yang dilakukan penulis dalam program kemitraan dari Perum Perhutani kepada LMDH Lancar Jaya Desa Ngancar pada variabel PHBM (X2) menunjukkan bahwa X2 memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,302 dan diperoleh statistik uji t sebesar 2,491 dengan signifikansi sebesar 0,015. Nilai statistik uji t hitung tersebut lebih besar daripada t tabel ($0,302 > 0,1660$) dan nilai signifikan lebih kecil dari 0.05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PHBM X2 berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan MDH Y. Koefisien yang diperoleh

bernilai positif yang artinya apabila terjadi peningkatan pada variabel pembinaan usaha kecil maka kesejahteraan MDH akan meningkat.

Peningkatan PHBM yang dilakukan oleh Perum Perhutani akan semakin meningkatkan kesejahteraan MDH. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Arief (2001:15) yang menyatakan, “pembangunan kehutanan merupakan upaya penyelenggaraan pengelolaan hutan secara lestari dan pemanfaatan hutan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pendapat Arief tersebut juga sejalan dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 862/KPTS/DIR/2009, pasal 1 angka 2 yang menyatakan “Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional”. Kegiatan PHBM dilakukan diantaranya juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan MDH dengan memperhatikan keberhasilan pembangunan daerah yang diukur dengan IPM yang terdiri dari daya beli, pendidikan dan kesehatan.

3. Pengaruh Pembinaan Usaha Kecil (X1) dan PHBM (X2) terhadap Kesejahteraan MDH (Y)

Hasil perhitungan dari penelitian yang dilakukan penulis pada LMDH Lancar Jaya Desa Ngancar diperoleh nilai F hitung sebesar 15,127 sedangkan F tabel sebesar 3,09, karena F hitung > F tabel dan memiliki sig F < 0.05 yaitu

sebesar 0.000 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa secara simultan, variabel pembinaan usaha kecil dan PHBM berpengaruh signifikan terhadap variabel kesejahteraan MDH Y. Hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa korelasi ganda antara pembinaan usaha kecil (X_1) dan PHBM (X_2) dengan kesejahteraan MDH (Y) termasuk cukup kuat yaitu sebesar 0,500. Ini menunjukkan bahwa adanya hubungan searah yang berarti jika pelaksanaan pembinaan usaha kecil dan PHBM meningkat maka kesejahteraan MDH juga akan meningkat. Pembinaan Usaha Kecil dan PHBM merupakan langkah Perum Perhutani dalam melaksanakan kemitraan dengan masyarakat. Jadi, pendapat dari Hafsah (2000:5) adalah benar, bahwa dengan adanya “Kemitraan diharapkan dapat mempercepat kemampuan ekonomi lemah, memecahkan masalah pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat”. Begitu pula sebaliknya, jika pelaksanaan pembinaan usaha kecil dan PHBM menurun maka kesejahteraan MDH akan menurun.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini, penulis mencoba mengambil kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan di LMDH Lancar Jaya Desa Ngancar mengenai peranan pembinaan usaha kecil dan PHBM dalam program kemitraan yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani dalam hubungannya dengan Kesejahteraan MDH. Dalam bab ini juga penulis memberikan saran-saran untuk instansi terkait yang harapannya dapat berguna bagi instansi.

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui analisa dan kuesioner yang disebarakan pada LMDH Lancar Jaya menunjukkan bahwa peranan pembinaan usaha kecil di LMDH Lancar Jaya cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,462. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan hubungan yang searah, yang berarti apabila terjadi peningkatan pada variabel pembinaan usaha kecil, maka variabel kesejahteraan MDH juga akan meningkat. Dari skala korelasi variabel pembinaan usaha kecil yaitu sebesar 0,445; dimana angka tersebut berada pada posisi cukup kuat.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui analisa dan kuesioner yang disebarakan pada LMDH Lancar Jaya menunjukkan bahwa peranan PHBM di LMDH Lancar Jaya cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,302. Koefisien regresi

yang bernilai positif menunjukkan hubungan yang searah, yang berarti apabila terjadi peningkatan pada variabel PHBM, maka variabel kesejahteraan MDH juga akan meningkat. Dari skala korelasi variabel PHBM yaitu sebesar 0,410; dimana angka tersebut berada pada posisi cukup kuat.

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui analisa dan kuesioner yang disebarkan pada LMDH Lancar Jaya menunjukkan bahwa peranan pembinaan usaha kecil dan PHBM secara bersama-sama di LMDH Lancar Jaya cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari skala korelasi yaitu sebesar 0,500, dimana angka tersebut berada pada posisi cukup kuat. Nilai F hitung sebesar 15,127 sedangkan F tabel sebesar 3,09. Karena F hitung > F tabel dan memiliki sig. F < 0,05 yaitu sebesar 0,000 sehingga secara simultan variabel pembinaan usaha kecil X1 dan PHBM X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kesejahteraan MDH Y, sehingga hipotesis penulis yang menyatakan bahwa “jika pelaksanaan pembinaan usaha kecil dan PHBM dilaksanakan dengan baik, maka kesejahteraan MDH akan meningkat” dapat diterima.

B. SARAN

1. Pembinaan usaha kecil yang dilakukan dalam program kemitraan oleh Perum Perhutani sudah cukup baik yang ditunjukkan dari koefisien regresi sebesar 0,462 dan memiliki nilai positif. Namun, pembinaan usaha kecil yang berjalan di LMDH Lancar Jaya dititikberatkan pada pemberian

pinjaman modal, sehingga aspek yang lainnya kurang diperhatikan, seperti pelatihan usaha bagi masyarakat yang tentunya juga akan memengaruhi keberhasilan usaha masyarakat. Pelatihan untuk masyarakat bisa dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pihak lain seperti dinas atau akademisi.

2. PHBM yang dilakukan dalam program kemitraan oleh Perum Perhutani sudah cukup baik yang ditunjukkan dari koefisien korelasi dan koefisien regresi sebesar 0,302 dan memiliki nilai positif. Akan tetapi, diperlukan pertemuan yang lebih intensif lagi antara pihak yang berkepentingan. Pertemuan tersebut juga akan membangun partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga keamanan hutan.
3. Kemitraan antara Perum Perhutani dan LMDH harus terus dibangun guna menciptakan hubungan yang erat diantara keduanya maupun *stakeholder* yang lainnya. Untuk itu, diperlukan pertemuan-pertemuan yang intensif baik untuk sekedar bersosialisasi maupun untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang sangat berguna bagi masyarakat. Pertemuan yang ada juga akan saling mempererat hubungan antar masyarakat dan menumbuhkan rasa memiliki akan hutan pangkuan yang berada di wilayah tersebut.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Albornoz, et al. 2007. *Menuju Kesejahteraan dalam Masyarakat Desa Hutan*. Bogor: Center of International Forest Research.
- Annual Report Perum Perhutani Tahun 2010. *Meraih Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari Kelas Dunia*.
- Annual Report Perum Perhutani Tahun 2011. *Peningkatan Produktivitas Sumberdaya Hutan*.
- Annual Report Perum Perhutani Tahun 2012. *Pemantapan Proses Bisnis: Menuju Perhutani Ekselen*.
- Anonymous. 2014. *Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Kabupaten Kediri*. Online (<http://hutbun.kedirikab.go.id/content/kawasan-hutan-produksi-dan-hutan-lindung-kab-kediri>, diakses pada tanggal 1 Desember 2014).
- Arief, Arifin. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Aviliani. 2009. Pengangguran dan Kemiskinan: Berdayakan Sektor Pertanian. *Jurnal Sekretariat Negara RI: NEGARAWAN*. No 14 November 2009 hal 76-93.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2012. *Indikator Kesejahteraan Rakyat-Welfare Indicators 2011*. Jakarta: BPS-Statistic Indonesia.
- Bahri, Efri S. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi*. FAM Publishing.
- Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Djanegara, Moermahadi Soerja. 2008. *Menuju Good Corporate Governance: Suatu Kajian Empiris*. Bogor: Kesatuan Press.
- Djumhana, Muhamad. 1994. *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- DPR dan Presiden RI. 1983. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial*.

- Dwiyanto, Agus. 2012. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fajar, Mukti. 2013. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firdaus, Rachmat, et al. 2011. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya*. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hafsah, M. Jafar. 2000. *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Husin, Sukanda. 2009. *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Islamy, Irfan. 2003. *Dasar-Dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik*. Malang.
- Kabul, Imam. 2005. *Paradigma Pembangunan Hutan di Indonesia*. Surabaya: Guna Widya.
- Kansil, C.S.T, Christie Kansil. 2001. *Kitab Undang-undang Hukum Perusahaan (Jilid I)*. Malang: Pradnya Paramita.
- Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 682/KPTS/DIR/2009. 2009. *Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)*.
- Lemhannas. 1997. *Pembangunan Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasirin, Chairun, Dedy Hermawan. 2010. *Governance & Civil Society*. Malang: Indo Press.
- Nurjaman, Asep, Krisno Hadi. 2002. *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan*. Malang: Umm Press.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2005 tentang Pemberdayaan Masyarakat setempat didalam dan atau Sekitar Hutan dalam Rangka *Social Forestry*.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-

05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).

Prasetyo, Bambang, Lina Miftahul Jannah. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Purwanto, Erwan Agus, Dyah Ratih. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif: Untuk Administrasui Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.

Rahman. Reza. 2009. *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*. Yogyakarta: Medpress.

Raka. 2008. *Surat dari LDMH di KRPH Jatirejo untuk Perhutani*. Online (<http://alha-raka.org/surat-dari-lmdh-di-krph-jatirejo-untuk-perhutani/>, diakses pada tanggal 30 Mei 2014).

Roesanto, Edi, *et al.* 2008. *Kelembagaan dalam Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan*. Malang.

Ruslan, Rosadi. 2010. *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Santosa, Awan. 2013. *Perekonomian Indonesia: Masalah, Potensi dan Alternatif Solusi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siagian, Sondang P. 2012. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dab Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Siahaan, NHT. 2007. *Hutan, Ligkungan dan Paradigma Pembangunan*. Jakarta: Pancuran alam.

- Simon, Hasan. 1994. *Merencanakan Pembangunan Hutan untuk Strategi Kehutanan Sosial*. Yogyakarta: Yayasan Pusat Studi Sumberdaya Hutan.
- _____. 2004. *Pembangunan Desa Hutan: Studi Kasus Sambiroto*. Yogyakarta: UGM Press.
- Singarimbun, Masri, Sofian Efendi. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Soeprihanto, John. 1997. *Manajemen Modal Kerja*. Yogyakarta: BPFE.
- Soerjani, Moh, dkk. 1987. *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. Jakarta: UI-Press.
- Sugandhy, Aca, Rustam Hakim. 2007. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyanto. 2004. *Analisis Statistika Sosial*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- _____. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2008. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2009. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR(Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Keputusan Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Nomor: 3324/KPTS/II/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suud, Mohammad. 2006. *3 orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.

- Syarif, Syahrial. 1991. *Industri Kecil dan Kesempatan Kerja*. Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas.
- Thoha, Miftah. 1993. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tjager, I Nyoman, dkk. 2003. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 2012. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Untung, Hendrik Budi. 2009. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utama, Adi Candra. 2006. *LSM vs LAZ: Bermitra atau berkompetisi? Mencari Model Kemitraan bagi Optimalisasi Potensi Filantropi Menuju Keadilan Sosial*. Depok: Piramida.
- Usman, Sunyoto. 2012. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wahyudi, Isa, Busyra Azheri. 2011. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*. Malang: Setara Press.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.

LAMPIRAN**1. Kuesioner Penelitian**

KUESIONER
PENELITIAN SKRIPSI
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2015

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Pembinaan Usaha Kecil dan PHBM terhadap Kesejahteraan MDH” saya mengharapkan kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner yang saya ajukan ini. Kuesioner ini sangat menunjang penelitian yang saya lakukan untuk menyusun tugas akhir skripsi yang merupakan suatu kewajiban dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Keberhasilan saya dalam melakukan penelitian ini tidak lepas dari kerelan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan saya dengan lengkap. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan saya jamin kerahasiaannya, karena semata-mata hanya untuk kepentingan akademis dalam penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kesediaannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Yeri Mia Viani

Identitas Responden

Nama :
Jenis Kelamin :
Usia :
Pendidikan Terakhir :

Pilihlah 1 (satu) jawaban yang sesuai.

Variabel Pembinaan Usaha Kecil (X1)

1. Pinjaman modal tersebut bermanfaat untuk mendukung usaha Bapak/Ibu.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak tahu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
2. Apakah Bapak/Ibu selalu tepat waktu dalam membayar cicilan pinjaman modal kerja?
 - a. Selalu tepat waktu
 - b. Pernah terlambat 1-5 hari
 - c. Pernah terlambat 6-10 hari
 - d. Pernah terlambat 11-15 hari
 - e. Pernah terlambat ≥ 16 hari
3. KMDH atau Perum Perhutani telah memberikan fasilitas untuk memudahkan pemasaran hasil produksi Bapak/Ibu.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak tahu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
4. Apakah KMDH atau LMDH sering mengadakan atau mengikuti pameran untuk memperkenalkan hasil produksi Bapak/Ibu?
 - a. Sangat Sering (≥ 7 Kali)
 - b. Sering (5-6 Kali)
 - c. Cukup (3-4 Kali)
 - d. Kurang (1-2 Kali)
 - e. Tidak pernah
5. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pelatihan Manajerial yang diselenggarakan oleh LMDH atau Perum Perhutani?
 - a. > 3 kali
 - b. 3 kali
 - c. 2 kali
 - d. 1 kali
 - e. Tidak pernah
6. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pelatihan Teknik Produksi yang diselenggarakan oleh LMDH atau Perum Perhutani?
 - a. > 3 kali
 - b. 3 kali
 - c. 2 kali
 - d. 1 kali
 - e. Tidak pernah

Variabel PHBM (X2)

7. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) mampu mendukung mata pencaharian Bapak/Ibu.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak tahu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
8. Perum Perhutani melibatkan MDH dalam menetapkan nilai dan proporsi berbagi hasil PHBM.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak tahu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

9. Apakah Perum Perhutani atau LMDH pernah mengadakan pelatihan kelembagaan bagi MDH?
 - a. Pernah
 - b. Tidak Pernah
10. Apakah Perum Perhutani atau LMDH mengadakan pertemuan atau pendampingan dengan intensif?
 - a. > 3 kali
 - b. 3 kali
 - c. 2 kali
 - d. 1 kali
 - e. Tidak pernah
11. Perum Perhutani atau LMDH selalu mengadakan pengawasan hutan untuk memperbaiki kualitas fungsi hutan
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak tahu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
12. Kualitas hutan terjaga dengan baik sehingga mampu mendukung pembangunan berkelanjutan
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak tahu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju
13. Apakah Bapak/Ibu selalu ikut berpartisipasi dalam dalam memantau pengamanan sumberdaya hutan?
 - a. Selalu berpartisipasi dalam memantau pengamanan sumberdaya hutan
 - b. Berpartisipasi dalam memantau pengamanan sumberdaya hutan
 - c. Cukup berpartisipasi dalam memantau pengamanan sumberdaya hutan
 - d. Kurang berpartisipasi dalam memantau pengamanan sumberdaya hutan
 - e. Tidak pernah berpartisipasi dalam memantau pengamanan sumberdaya hutan
14. Apakah Bapak/Ibu ikut berpartisipasi dalam memantau proses pemanenan hasil hutan?
 - a. Selalu berpartisipasi dalam memantau proses pemanenan hasil hutan
 - b. Berpartisipasi dalam memantau proses pemanenan hasil hutan
 - c. Cukup berpartisipasi dalam memantau proses pemanenan hasil hutan
 - d. Kurang berpartisipasi dalam memantau proses pemanenan hasil hutan
 - e. Tidak pernah berpartisipasi dalam memantau proses pemanenan hasil hutan

Variabel Kesejahteraan MDH (Y)

15. Penghasilan Bapak/Ibu mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga

Bapak/Ibu.

- | | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| a. Sangat Setuju | b. Setuju | c. Tidak tahu |
| d. Tidak Setuju | e. Sangat Tidak Setuju | |

16. Bapak/Ibu memiliki tabungan dalam bentuk apapun.

- | | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| a. Sangat Setuju | b. Setuju | c. Tidak tahu |
| d. Tidak Setuju | e. Sangat Tidak Setuju | |

17. Dalam setahun, keluarga Bapak/Ibu menderita sakit kurang dari 10 kali.

- | | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| a. Sangat Setuju | b. Setuju | c. Tidak tahu |
| d. Tidak Setuju | e. Sangat Tidak Setuju | |

18. Didaerah tempat tinggal Bapak/Ibu terdapat fasilitas kesehatan yang cukup.

- | | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| a. Sangat Setuju | b. Setuju | c. Tidak tahu |
| d. Tidak Setuju | e. Sangat Tidak Setuju | |

19. Didaerah tempat tinggal Bapak/Ibu terdapat fasilitas pendidikan yang cukup.

- | | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| a. Sangat Setuju | b. Setuju | c. Tidak tahu |
| d. Tidak Setuju | e. Sangat Tidak Setuju | |

20. Berapa lama pendidikan formal tertinggi yang pernah ditempuh oleh anak

Bapak/Ibu?

- | | | |
|---------|--------|--------|
| a. >SMA | b. SMA | c. SMP |
| d. SD | e. <SD | |

21. Kelestarian lingkungan di daerah Bapak/Ibu mampu mendukung pembangunan berkelanjutan

- | | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| a. Sangat Setuju | b. Setuju | c. Tidak tahu |
| d. Tidak Setuju | e. Sangat Tidak Setuju | |

22. KMDH, LMDH dan Perum Perhutani mampu mengembangkan kesempatan kerja bagi MDH

- | | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| a. Sangat Setuju | b. Setuju | c. Tidak tahu |
| d. Tidak Setuju | e. Sangat Tidak Setuju | |

23. Apakah Bapak/Ibu merasakan manfaat dari Pembinaan Usaha Kecil?

- | | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| a. Sangat Setuju | b. Setuju | c. Tidak tahu |
| d. Tidak Setuju | e. Sangat Tidak Setuju | |

24. Apakah Bapak/Ibu merasakan manfaat dari Program PHBM?

- | | | |
|------------------|------------------------|---------------|
| a. Sangat Setuju | b. Setuju | c. Tidak tahu |
| d. Tidak Setuju | e. Sangat Tidak Setuju | |

X11	X12	X13	X14	X15	X16	X1	X21	X22	X23	X24	X25	X26	X27	X28	X2	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16	Y17	Y18	Y19	Y110	Y1
5	4	5	3	1	5	23	5	3	2	4	5	5	4	3	30	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41
5	1	3	1	1	1	12	4	4	2	1	4	5	5	4	28	4	3	5	4	4	2	4	4	5	4	39
4	4	4	3	1	1	17	4	4	2	5	4	4	3	4	29	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	43
5	4	5	1	1	1	17	5	5	1	1	5	5	3	3	27	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	38
2	2	2	2	1	1	10	5	4	1	5	4	4	3	2	27	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	40
5	4	5	1	1	1	17	5	3	1	1	5	5	5	1	25	3	3	5	3	3	3	5	4	3	5	37
4	5	5	1	1	1	17	5	5	1	5	5	5	5	5	35	4	4	5	5	5	3	5	5	4	5	45
4	5	5	1	1	1	17	5	5	1	5	5	5	5	5	35	4	4	5	5	5	3	5	5	4	4	44
4	5	4	4	4	2	23	4	4	2	4	5	5	4	4	31	4	3	4	4	5	3	5	4	4	4	40
4	5	4	2	1	1	17	4	4	2	2	4	5	3	2	25	3	3	4	4	5	3	4	5	3	3	37
4	5	5	1	1	1	17	5	5	1	5	5	5	5	5	35	3	3	5	5	5	2	5	5	3	5	41
4	5	5	1	1	1	17	5	4	1	2	4	4	3	2	24	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	37
4	4	3	2	2	1	16	5	4	2	5	5	5	4	3	32	4	4	3	3	4	2	4	4	4	4	36
4	4	4	1	1	1	15	4	4	1	1	4	4	4	4	25	3	3	4	4	2	4	3	4	3	3	33
5	5	2	1	1	1	15	4	4	1	3	5	4	5	1	26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
5	3	3	3	3	4	21	4	4	1	5	3	4	4	3	27	5	5	4	4	4	3	5	4	5	5	44
4	5	4	1	1	5	20	5	5	2	5	5	5	4	3	33	5	4	4	4	4	3	5	4	5	5	43
5	4	5	3	1	1	19	5	5	2	3	5	5	4	4	32	5	4	3	4	4	4	4	4	5	5	42
4	5	4	1	1	1	16	4	4	1	2	4	4	3	3	24	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	36
4	4	4	1	1	1	15	4	4	1	1	4	4	3	4	24	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	35
4	5	3	1	1	1	15	4	4	1	1	4	4	4	2	23	5	5	4	4	4	3	4	4	5	5	43
4	5	3	1	1	1	15	4	4	1	1	4	4	3	3	23	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	35
4	5	4	1	1	1	16	4	4	1	1	4	4	4	4	25	3	3	4	4	4	4	4	4	3	5	38
4	5	4	3	5	5	26	5	4	2	5	4	4	4	3	30	4	4	5	5	5	2	5	5	4	4	43
4	5	5	2	1	1	18	5	5	1	1	5	5	5	5	31	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
5	5	5	3	4	4	26	5	5	2	4	5	5	5	5	35	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
5	2	3	2	2	1	15	4	4	1	2	4	4	4	3	25	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	35
5	4	3	1	1	1	15	5	5	2	2	4	4	3	3	27	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	35
5	5	4	3	5	3	25	5	4	2	5	4	4	4	3	30	5	4	4	2	2	3	4	4	5	5	38
4	4	3	1	1	1	14	4	4	1	1	4	4	2	3	22	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	40
4	5	3	1	1	1	15	4	4	1	3	3	3	4	3	24	3	3	4	4	4	0	4	4	3	5	34
4	5	3	1	1	1	15	4	4	1	2	1	1	4	3	19	5	5	4	4	4	3	4	4	5	5	43
2	4	4	3	1	1	15	4	4	2	4	5	5	4	3	30	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	38

5	4	2	2	1	19	5	4	2	3	5	5	4	2	29	4	4	3	4	5	3	4	4	4	4	4	39
4	4	3	1	1	5	18	4	3	2	5	5	5	3	2	28	5	4	5	5	4	2	5	5	5	5	45
4	5	2	1	1	1	14	5	4	1	3	4	5	5	2	28	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	41
5	4	2	1	1	1	14	5	4	2	2	4	5	3	2	26	3	3	4	4	5	4	4	4	3	4	38
4	5	5	2	5	2	23	4	4	2	4	5	4	5	3	30	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	37
2	4	4	1	1	1	13	5	5	1	1	5	5	3	1	25	4	4	4	4	4	2	5	4	4	5	40
4	4	3	1	1	1	14	4	4	1	3	3	3	3	3	23	4	4	4	4	4	0	4	4	4	5	37
4	4	3	1	1	1	14	4	4	1	3	4	4	4	3	26	4	4	4	4	4	2	3	4	4	5	38
5	3	4	1	1	1	15	4	4	1	3	4	4	4	3	26	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	36
4	5	4	2	4	3	22	4	5	2	4	5	5	5	5	34	5	5	4	4	4	3	5	5	5	5	45
4	4	3	1	1	1	14	4	4	1	1	3	3	3	3	21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
4	4	3	1	1	1	14	4	4	1	3	4	4	4	3	26	3	3	4	4	4	0	4	4	3	4	33
4	2	3	2	1	1	13	4	4	1	1	4	4	4	4	25	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	36
5	5	5	1	1	2	19	4	4	1	1	5	5	5	4	28	3	3	5	5	4	3	4	4	3	4	38
4	5	4	1	1	1	16	4	4	1	3	4	4	4	3	26	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39
4	4	3	1	1	1	14	4	4	1	1	4	4	4	3	24	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	40
4	4	3	3	1	5	20	4	5	2	5	5	5	3	3	31	4	4	5	4	4	3	5	5	4	5	43
5	5	4	1	2	1	18	5	4	2	2	4	5	5	1	27	4	4	3	5	4	3	5	4	4	5	41
4	2	4	2	1	1	14	4	5	1	4	5	5	4	4	31	4	4	5	5	5	4	5	4	4	5	45
4	3	4	1	1	1	14	4	4	1	3	3	3	3	3	23	4	3	4	4	4	3	4	4	4	5	39
4	3	3	1	3	3	17	4	4	1	3	4	3	4	3	25	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	44
4	2	3	1	1	1	12	4	4	1	3	4	4	3	4	26	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	35
5	5	4	1	1	1	17	4	3	2	1	4	4	2	1	20	4	4	4	5	5	3	4	4	4	4	41
4	5	4	3	1	1	18	4	4	1	1	4	4	2	2	21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
4	3	4	2	1	1	15	4	4	1	3	4	4	4	3	26	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	45
5	4	5	5	5	1	25	5	5	1	1	5	5	5	5	31	5	5	3	4	4	2	5	5	5	5	43
5	4	5	1	5	1	21	5	5	1	1	5	5	5	5	31	5	5	5	4	4	3	5	5	5	5	46
4	5	3	1	1	5	19	4	5	2	5	5	5	4	3	32	5	5	4	4	4	3	5	5	5	5	45
4	4	4	2	1	1	16	4	4	1	4	4	1	3	4	24	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39
5	5	5	3	1	1	20	5	4	1	5	5	5	2	3	29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
5	5	5	2	2	2	21	5	5	2	3	5	5	4	5	33	4	4	5	5	5	3	5	5	4	5	45
4	4	4	1	1	1	15	4	4	1	1	4	4	4	4	25	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	40
4	4	3	1	1	1	14	4	4	1	1	4	4	3	4	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	4	3	1	1	1	14	4	4	1	1	4	3	4	3	23	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	36
5	5	5	1	1	1	18	5	5	1	1	3	5	1	1	21	4	4	5	5	5	3	5	5	4	4	44

4	5	4	1	1	1	16	4	4	1	4	4	4	4	2	26	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	38
4	4	5	1	1	1	16	5	4	1	5	5	5	4	4	32	5	3	3	5	5	4	4	4	4	5	43
4	4	3	1	1	1	14	4	4	1	1	4	4	4	5	26	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39
4	5	4	2	2	2	19	5	5	2	3	5	5	3	5	32	4	4	5	4	5	2	5	5	4	4	43
5	4	3	2	2	2	18	4	4	1	3	4	4	4	3	26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	5	3	1	1	1	15	4	4	1	3	4	4	3	3	25	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	35
5	4	4	1	1	1	16	5	4	2	4	4	4	5	4	31	5	5	3	4	4	3	4	4	5	5	42
4	4	5	2	2	2	19	5	4	2	3	5	4	5	4	31	4	4	3	5	4	2	4	5	4	5	40
5	4	3	2	2	3	19	4	4	1	1	4	4	3	3	23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41
4	4	4	1	1	1	15	5	4	1	5	5	5	5	5	34	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	39
5	4	4	1	1	2	17	4	4	2	3	5	5	3	3	28	5	5	5	4	4	3	5	5	5	5	46
4	5	4	3	2	2	20	4	4	2	2	4	4	3	3	25	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	45
5	4	3	2	2	2	18	4	4	1	3	4	4	4	4	27	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39
5	3	4	1	1	1	15	5	4	2	5	5	5	5	4	2	31	4	4	5	5	5	3	5	5	4	44
4	5	4	2	3	1	20	5	5	2	5	5	5	5	5	36	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	46
4	4	4	1	1	1	15	4	4	2	3	4	4	3	3	26	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	37
5	4	3	1	1	3	17	4	3	1	3	5	4	3	2	24	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	40
4	4	4	1	1	1	15	5	4	2	5	5	5	4	2	31	4	3	5	5	5	2	5	5	4	4	42
4	4	4	1	1	1	15	4	4	2	5	5	4	4	4	31	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	39
4	3	4	1	1	1	14	4	4	1	1	4	4	3	2	22	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	1	4	1	2	1	13	4	3	1	3	4	4	2	1	21	4	3	4	2	2	0	4	4	4	4	32
4	5	4	1	1	1	16	4	3	1	4	4	4	2	1	22	5	4	4	5	5	3	5	5	5	5	46
5	4	4	1	1	1	16	5	4	2	5	5	5	4	2	31	4	4	5	5	5	3	5	5	4	5	45
5	4	4	1	1	1	16	5	4	2	5	5	5	4	3	32	4	3	5	5	5	3	5	5	4	5	44
5	5	4	3	5	3	25	5	4	2	5	4	4	4	3	30	5	5	4	4	4	3	4	4	5	5	43
5	4	5	2	5	1	22	5	5	1	1	5	5	5	5	31	5	5	5	4	4	3	5	5	5	4	45





2. Data SPSS

X11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	3	3.2	3.2	3.2
4.00	58	61.7	61.7	64.9
5.00	33	35.1	35.1	100.0
Total	94	100.0	100.0	

X12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	2	2.1	2.1	2.1
2.00	5	5.3	5.3	7.4
3.00	7	7.4	7.4	14.9
4.00	42	44.7	44.7	59.6
5.00	38	40.4	40.4	100.0
Total	94	100.0	100.0	

X13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	4	4.3	4.3	4.3
3.00	29	30.9	30.9	35.1
4.00	40	42.6	42.6	77.7
5.00	21	22.3	22.3	100.0
Total	94	100.0	100.0	

X14

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	59	62.8	62.8	62.8
2.00	20	21.3	21.3	84.0
3.00	13	13.8	13.8	97.9
4.00	1	1.1	1.1	98.9
5.00	1	1.1	1.1	100.0
Total	94	100.0	100.0	

X15

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	69	73.4	73.4	73.4
2.00	12	12.8	12.8	86.2
3.00	3	3.2	3.2	89.4
4.00	3	3.2	3.2	92.6
5.00	7	7.4	7.4	100.0
Total	94	100.0	100.0	

X16

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	70	74.5	74.5	74.5
2.00	10	10.6	10.6	85.1
3.00	6	6.4	6.4	91.5
4.00	2	2.1	2.1	93.6
5.00	6	6.4	6.4	100.0
Total	94	100.0	100.0	

X21

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4.00	56	59.6	59.6	59.6
5.00	38	40.4	40.4	100.0
Total	94	100.0	100.0	

X22

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	7	7.4	7.4	7.4
4.00	66	70.2	70.2	77.7
5.00	21	22.3	22.3	100.0
Total	94	100.0	100.0	

X23

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	58	61.7	61.7	61.7
2.00	36	38.3	38.3	100.0
Total	94	100.0	100.0	

X24

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	27	28.7	28.7	28.7
2.00	9	9.6	9.6	38.3
3.00	24	25.5	25.5	63.8
4.00	11	11.7	11.7	75.5
5.00	23	24.5	24.5	100.0
Total	94	100.0	100.0	

X25

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1.00	1	1.1	1.1	1.1
3.00	6	6.4	6.4	7.4
Valid 4.00	47	50.0	50.0	57.4
5.00	40	42.6	42.6	100.0
Total	94	100.0	100.0	

X26

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1.00	2	2.1	2.1	2.1
3.00	6	6.4	6.4	8.5
Valid 4.00	45	47.9	47.9	56.4
5.00	41	43.6	43.6	100.0
Total	94	100.0	100.0	

X27

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1.00	1	1.1	1.1	1.1
2.00	6	6.4	6.4	7.4
Valid 3.00	27	28.7	28.7	36.2
4.00	40	42.6	42.6	78.7
5.00	20	21.3	21.3	100.0
Total	94	100.0	100.0	

X28

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1.00	8	8.5	8.5	8.5
2.00	15	16.0	16.0	24.5
3.00	38	40.4	40.4	64.9
4.00	19	20.2	20.2	85.1
5.00	14	14.9	14.9	100.0
Total	94	100.0	100.0	

Y11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	19	20.2	20.2	20.2
4.00	52	55.3	55.3	75.5
5.00	23	24.5	24.5	100.0
Total	94	100.0	100.0	

Y12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	29	30.9	30.9	30.9
4.00	49	52.1	52.1	83.0
5.00	16	17.0	17.0	100.0
Total	94	100.0	100.0	

Y13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	15	16.0	16.0	16.0
4.00	52	55.3	55.3	71.3
5.00	27	28.7	28.7	100.0
Total	94	100.0	100.0	

Y14

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	14	14.9	14.9	14.9
4.00	53	56.4	56.4	71.3
5.00	27	28.7	28.7	100.0
Total	94	100.0	100.0	

Y15

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	2	2.1	2.1	2.1
3.00	10	10.6	10.6	12.8
4.00	58	61.7	61.7	74.5
5.00	24	25.5	25.5	100.0
Total	94	100.0	100.0	

Y16

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2.00	1	1.1	1.1	1.1
3.00	15	16.0	16.0	17.0
4.00	55	58.5	58.5	75.5
5.00	23	24.5	24.5	100.0
Total	94	100.0	100.0	

Y17

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	3	3.2	3.2	3.2
4.00	60	63.8	63.8	67.0
5.00	31	33.0	33.0	100.0
Total	94	100.0	100.0	

Y18

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4.00	62	66.0	66.0	66.0
5.00	32	34.0	34.0	100.0
Total	94	100.0	100.0	

Y19

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	20	21.3	21.3	21.3
4.00	49	52.1	52.1	73.4
5.00	25	26.6	26.6	100.0
Total	94	100.0	100.0	

Y110

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3.00	9	9.6	9.6	9.6
4.00	32	34.0	34.0	43.6
5.00	53	56.4	56.4	100.0
Total	94	100.0	100.0	

No.	Indikator	r hitung	Keterangan
1.	X1.1	0,397	Valid
2.	X1.2	0,480	Valid
3.	X1.3	0,504	Valid
4.	X1.4	0,668	Valid
5.	X1.5	0,769	Valid
6.	X1.6	0,606	Valid
7.	X2.1	0,586	Valid
8.	X2.2	0,531	Valid
9.	X2.3	0,492	Valid
10.	X2.4	0,634	Valid
11.	X2.5	0,725	Valid
12.	X2.6	0,633	Valid
13.	X2.7	0,623	Valid
14.	X2.8	0,567	Valid
15.	Y1.1	0,816	Valid
16.	Y1.2	0,747	Valid
17.	Y1.3	0,794	Valid
18.	Y1.4	0,494	Valid
19.	Y1.5	0,482	Valid
20.	Y1.6	0,399	Valid
21.	Y1.7	0,620	Valid
22.	Y1.8	0,568	Valid
23.	Y1.9	0,798	Valid
24.	Y1.10	0,617	Valid

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X11	4.2872	.63284	94
X12	4.1596	.93099	94
X13	3.8298	.82486	94
X14	1.5638	.84952	94
X15	1.5851	1.18603	94
X16	1.5532	1.13229	94
X21	4.4043	.49338	94
X22	4.1489	.52788	94
X23	1.3830	.48872	94
X24	2.9362	1.53671	94
X25	4.3298	.69388	94
X26	4.3085	.77635	94
X27	3.7660	.89713	94
X28	3.1702	1.13249	94
Y11	4.0426	.67066	94
Y12	3.8617	.68157	94
Y13	4.1277	.65965	94
Y14	4.1383	.64925	94
Y15	4.1064	.66346	94
Y16	4.0638	.66895	94
Y17	4.2979	.52527	94
Y18	4.3404	.47639	94
Y19	4.0532	.69355	94
Y110	4.4681	.66724	94

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	94	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	94	100.0

- a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.861	24

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 ^b	.	Enter

- a. Dependent Variable: Y
b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.500 ^a	.250	.233	4.10121	.250	15.127	

- a. Predictors: (Constant), X2, X1

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	508.886	2	254.443	15.127	.000 ^b
Residual	1530.614	91	16.820		
Total	2039.500	93			

- a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X2, X1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	25.054	3.189		7.857	.000
X1	.462	.147	.324	3.139	.002
X2	.302	.121	.257	2.491	.015

a. Dependent Variable: Y

